KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

MEMBACA TANGGUNG JAWAB DALAM WACANA

(Model Analisis Wacana Kritis atas Representasi, Legimitasi dan Respons)



Deasy Wahyu Hidayati
Prima Gusti Yanti
Imam Safi'i
Editor: Fauzi Rahman

MEMBACA TANGGUNG JAWAB DALAM WACANA

(Model Analisis Wacana Kritis atas Representasi, Legitimasi, dan Respons)

Penulis:
Deasy Wahyu Hidayati
Prima Gusti Yanti
Imam Safi'i

Editor:
Fauzi Rahman

KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MEMBACA TANGGUNG JAWAB DALAM WACANA

(Model Analisis Wacana Kritis atas Representasi, Legitimasi, dan Respons)

Penulis:
Deasy Wahyu Hidayati
Prima Gusti Yanti
Imam Safi'i

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Anggota IKAPI No. 075/SBA/2025

ISBN: 978-634-7769-84-8
Editor: Fauzi Rahman
Penyunting: Tira Mei Darnis, S.Si.
Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi, S.A.P.

Diterbitkan Oleh: Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Alamat: JL. PEPAYA II NO. 121, Desa/Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25157
Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com
Email: cvkaryabukudanjurnalindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2026
Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul **"Membaca Tanggung Jawab dalam Wacana (Model Analisis Wacana Kritis atas Representasi, Legitimasi, dan Respons)"** dapat diselesaikan. Buku ini berangkat dari gagasan bahwa ketika sebuah peristiwa hadir dalam ruang publik, yang dipertarungkan bukan hanya persoalan tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana peristiwa tersebut diberi makna. Bahasa, pemberitaan, pilihan sumber, posisi aktor, dan bentuk respons yang ditampilkan dapat memengaruhi cara publik melihat pihak yang dianggap bertanggung jawab. Karena itu, tanggung jawab tidak selalu hadir sebagai sesuatu yang sudah jelas sejak awal, melainkan dapat terbentuk dan dinegosiasikan melalui wacana.

Persoalan tersebut dibaca melalui Analisis Wacana Kritis dengan memanfaatkan model tiga dimensi Norman Fairclough. Buku ini kemudian mengembangkan pembacaan tersebut ke arah persoalan representasi, agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, dan respons institusional. Perhatian khusus diberikan pada situasi ketika suatu peristiwa menjadi perhatian publik dan mendorong munculnya berbagai tuntutan, mulai dari penjelasan dan penilaian hingga perlindungan, pemulihan, dan tindakan institusional. Dari titik inilah konsep akuntabilitas pascainsiden ditempatkan sebagai bagian penting dalam memahami bagaimana suatu peristiwa dibicarakan, bagaimana respons dibentuk, dan bagaimana legitimasi institusi dipertahankan atau dipersoalkan.

Buku ini menawarkan Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab sebagai kerangka untuk membaca hubungan tersebut secara lebih terarah. Model ini mempertemukan representasi bahasa, distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, tiga mekanisme legitimasi—formal, moral, dan administratif—serta respons institusional dan pencegahan struktural. Pembahasannya tidak berhenti pada apa yang tampak dalam wacana setelah sebuah insiden terjadi, tetapi turut memperhatikan hal-hal yang mungkin tidak muncul secara menonjol, termasuk kondisi struktural, relasi kuasa, perlindungan kelompok rentan, dan upaya pencegahan. Dari sini, akuntabilitas dipahami bukan sebagai rangkaian tahapan yang selalu berjalan lurus, melainkan sebagai formasi diskursif yang dapat berubah sesuai dengan aktor, konteks, media, dan situasi yang melingkupinya.

Kerangka yang ditawarkan dalam buku ini bersifat terbuka sehingga tidak terbatas pada satu jenis peristiwa atau satu lingkungan media. Pembahasannya dapat digunakan untuk membaca wacana pendidikan, kekerasan dan perlindungan anak, kesehatan, layanan publik, krisis institusional, korporasi, pemerintahan, media digital, maupun bencana dan kegagalan sistem. Ruang penerapan tersebut sekaligus membuka kemungkinan untuk mengembangkan model melalui perbandingan lintas kasus, lintas media, lintas budaya, dan analisis multimodal. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin memahami bagaimana bahasa bekerja dalam membentuk representasi, legitimasi, respons, dan tanggung jawab di ruang publik.

Jakarta Selatan, Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB 1 BAHASA, MEDIA, DAN KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB **1**

A. Bahasa sebagai Praktik Sosial 1

B. Media sebagai Arena Konstruksi Realitas 4

C. Peristiwa, Visibilitas, dan Pembentukan Makna Publik 6

D. Aktor Sosial dan Perebutan Definisi atas Peristiwa 9

E. Tanggung Jawab sebagai Konstruksi Diskursif 11

F. Dari Kejadian Privat Menuju Isu Publik 13

G. Media, Otoritas, dan Legitimasi Tindakan 15

H. Respons Pascaperistiwa dan Ekspektasi Sosial 17

I. Ketegangan antara Penanganan Insiden dan Pencegahan Struktural 19

J. Posisi Persoalan dalam Kajian Wacana Media 21

BAB 2 ANALISIS WACANA KRITIS DAN PERSOALAN TANGGUNG JAWAB **25**

A. Analisis Wacana Kritis: Orientasi dan Ruang Kajian 25

B. Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi 28

C. Model Tiga Dimensi Norman Fairclough 30

D. Dimensi Teks: Representasi dan Pilihan Kebahasaan 32

E. Praktik Diskursus: Produksi, Sirkulasi, dan Otoritas Sumber 34
F. Praktik Sosial: Ideologi, Kekuasaan, dan Struktur 36
G. Dari Analisis Wacana Menuju Pembacaan Akuntabilitas 38
H. Akuntabilitas sebagai Persoalan Representasi 40
I. Keterbatasan Pembacaan Deskriptif atas Respons Institusional 42
J. Kebutuhan akan Kerangka Sintesis Pascaanalisis 44

BAB 3 REPRESENTASI, AGENSI, DAN ATRIBUSI TANGGUNG JAWAB 47

A. Representasi Aktor dalam Wacana 47
B. Agensi dan Posisi Subjek 49
C. Korban sebagai Pusat Penderitaan dan Sumber Legitimasi Moral 51
D. Pelaku, Anonimisasi, dan Penahanan Atribusi 53
E. Keluarga sebagai Jembatan antara Ruang Privat dan Publik 55
F. Institusi sebagai Aktor Penjelas dan Pengelola Respons 57
G. Negara dan Otoritas Formal dalam Penentuan Makna ... 59
H. Kehadiran, Ketidakhadiran, dan Marginalisasi Suara 61
I. Distribusi Agensi sebagai Distribusi Tanggung Jawab 63
J. Dari Representasi Menuju Atribusi Akuntabilitas 65

BAB 4 TIGA MEKANISME LEGITIMASI AKUNTABILITAS 67

A. Legitimasi sebagai Dasar Pengakuan Tanggung Jawab .. 67

B. Legalisasi-Prosedural dan Legitimasi Formal 69
C. Laporan, Penyelidikan, Pemeriksaan, dan Otoritas Resmi 71
D. Medikalisasi Korban dan Legitimasi Moral..... 73
E. Penderitaan, Kerentanan, Perawatan, dan Pemulihan.... 75
F. Akuntabilitas Institusional-Protektif dan Legitimasi Administratif..... 77
G. Pendampingan, Klarifikasi, Penyangkalan, Permintaan Maaf, dan Mediasi 79
H. Hubungan antara Legitimasi Formal, Moral, dan Administratif..... 81
I. Tumpang Tindih Mekanisme Legitimasi dalam Satu Wacana..... 82
J. Dari Tiga Mekanisme Menuju Formasi Akuntabilitas 84
BAB 5 FORMASI DISKURSIF TANGGUNG JAWAB..... 87
A. Pengertian Akuntabilitas Pascainsiden 87
B. Syarat Diskursif Munculnya Akuntabilitas Pascainsiden 89
C. Visibilitas Publik sebagai Titik Aktivasi 91
D. Konvergensi Legitimasi Formal, Moral, dan Administratif..... 93
E. Perubahan Posisi Aktor setelah Insiden Menjadi Publik..... 95
F. Representasi Kasus sebagai 'Sedang Ditangani' 97
G. Orientasi Makna Publik dan Normalisasi Respons..... 98

H. Akuntabilitas Pascainsiden dan Pemulihan Legitimasi Institusi 100

I. Akuntabilitas Pascainsiden sebagai Formasi, Bukan Tahapan Linear 102

J. Batas Konseptual Akuntabilitas Pascainsiden 103

BAB 6 DIMENSI STRUKTURAL DALAM WACANA 107

A. Mengapa Pencegahan Struktural Perlu Dibaca 108

B. Pencegahan Struktural sebagai Dimensi Evaluatif 110

C. Budaya Institusi dan Kondisi yang Memungkinkan Insiden 112

D. Relasi Kuasa dan Kerentanan Struktural 113

E. Deteksi Dini dan Mekanisme Pengaduan 115

F. *Safeguarding* dan Sistem Perlindungan 117

G. Inklusivitas dan Perlindungan Kelompok Rentan 118

H. *Foregrounding* Penanganan dan *Backgrounding* Pencegahan 120

I. Ketidakhadiran Wacana Pencegahan sebagai Temuan Analitis 122

J. Dari Akuntabilitas Reaktif menuju Tanggung Jawab Preventif 124

BAB 7 MODEL AWK KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB 127

A. Posisi Model terhadap Analisis Wacana Kritis Fairclough 127

B. Asumsi Dasar Model 129

C. Representasi Bahasa sebagai Titik Masuk Analisis 131

D. Distribusi Agensi dan Atribusi Tanggung Jawab 132
E. Mekanisme Legitimasi dalam Wacana Pascainsiden 134
F. Orientasi Makna Publik 135
G. Respons Institusional 137
H. Akuntabilitas Pascainsiden sebagai Titik Sintesis 138
I. Pencegahan Struktural sebagai Dimensi Evaluasi 139
J. Relasi Antarkomponen dalam Model 141
K. Batas Inferensi dan Ruang Interpretasi 142
L. Model sebagai Kerangka Analitis yang Terbuka dan Adaptif 143

BAB 8 PRINSIP REPLIKASI MODEL DALAM PENELITIAN 147

A. Replikasi Konseptual, Bukan Penyalinan Teknis 147
B. Prinsip Kesepadanan Masalah dan Konteks 149
C. Prinsip Identifikasi Aktor dan Distribusi Tanggung Jawab 151
D. Prinsip Pembacaan Mekanisme Legitimasi 152
E. Prinsip Pembacaan Respons Pascainsiden 153
F. Prinsip Evaluasi Pencegahan Struktural 155
G. Fleksibilitas Konfigurasi Formal, Moral, dan Administratif 156
H. Kemungkinan Munculnya Mekanisme Legitimasi Tambahan 157
I. Adaptasi pada Korpus, Media, dan Konteks yang Berbeda 158

J. Batas Replikasi dan Keharusan Uji Empiris 160
K. Kriteria Koherensi dalam Penggunaan Model 161
L. Posisi Model sebagai Kerangka untuk Penelitian Lanjutan 162

BAB 9 RUANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MODEL 165

A. Penerapan pada Wacana Pendidikan 165
B. Penerapan pada Wacana Kekerasan dan Perlindungan Anak 167
C. Penerapan pada Wacana Kesehatan dan Layanan Publik 168
D. Penerapan pada Wacana Krisis Institusional 170
E. Penerapan pada Wacana Korporasi dan Reputasi Organisasi 171
F. Penerapan pada Wacana Pemerintahan dan Kebijakan Publik 172
G. Penerapan pada Wacana Digital dan Viralitas 174
H. Penerapan pada Wacana Bencana dan Kegagalan Sistem 175
I. Kemungkinan Perbandingan Lintas Media dan Lintas Kasus 176
J. Kemungkinan Perbandingan Lintas Budaya dan Lintas Negara 177
K. Adaptasi Model pada Wacana Multimodal 179
L. Pengembangan Model di Luar Konteks Awal Perundungan 180

BAB 10 AGENDA PENGEMBANGAN TEORETIS 183

A. Status Teoretis Model Akuntabilitas Pascainsiden 183

B. Batas Generalisasi dan Ketergantungan pada Konteks 185

C. Uji Konseptual pada Domain Wacana yang Berbeda 186

D. Pengayaan Dimensi Legitimasi 188

E. Relasi Akuntabilitas Pascainsiden dan Pencegahan Struktural 189

F. Relasi Model dengan Kajian *Framing*, Krisis, dan Responsibilitas 190

G. Pengembangan pada Media Sosial dan Ekosistem *Platform* 192

H. Pengembangan pada Analisis Multimodal dan Visual .. 193

I. Pengembangan Melalui Studi Komparatif 195

J. Peluang Integrasi dengan Pendekatan Analisis Wacana Lain 196

K. Agenda Validasi, Falsifikasi, dan Penyempurnaan Model 197

DAFTAR PUSTAKA 200

BIOGRAFI PENULIS 219

BAB 1
BAHASA, MEDIA, DAN KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB

Bahasa media tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga menata bagaimana suatu peristiwa dapat dipahami, siapa yang tampil sebagai aktor utama, tindakan siapa yang dianggap relevan, serta kepada siapa tanggung jawab dapat dilekatkan. Perspektif ini menjadi penting ketika wacana publik bergerak di antara fakta, interpretasi, kepentingan institusional, dan respons sosial. Bab ini membangun landasan konseptual untuk membaca tanggung jawab sebagai hasil konstruksi diskursif. Fokusnya bukan menganggap media sebagai kekuatan tunggal yang menentukan pikiran publik, melainkan memahami media sebagai salah satu arena utama tempat realitas, otoritas, legitimasi, dan tuntutan respons dinegosiasikan (Fairclough, 1995, 2003; Wlezien, 2024; Wlezien & Soroka, 2024).

A. Bahasa sebagai Praktik Sosial

Bahasa dalam kajian wacana tidak dipahami sebagai sistem tanda yang bekerja secara terpisah dari kehidupan sosial. Bahasa selalu digunakan oleh pelaku tertentu, dalam situasi tertentu, untuk melakukan tindakan sosial tertentu. Seseorang dapat menjelaskan, menolak, membenarkan, menuduh, meminta, menghindari, mengakui, atau mengalihkan tanggung jawab melalui bahasa. Oleh sebab itu, bentuk linguistik perlu dibaca

bersama dengan konteks sosial yang membuat bentuk tersebut bermakna. Fairclough (1992) menempatkan wacana sebagai bentuk praktik sosial yang memiliki hubungan dialektis dengan struktur sosial: wacana dibentuk oleh kondisi sosial, tetapi pada saat yang sama juga berkontribusi pada pemeliharaan atau perubahan kondisi tersebut.

Pemahaman bahasa sebagai praktik sosial mengubah fokus analisis dari pertanyaan "apa arti kalimat ini?" menjadi "apa yang dilakukan melalui kalimat ini dan bagaimana tindakan tersebut berhubungan dengan struktur sosial?". Sebuah pernyataan seperti "kasus masih didalami" dapat berfungsi sebagai informasi prosedural, penanda kehati-hatian, atau mekanisme penundaan kepastian. Maknanya tidak cukup dijelaskan melalui definisi kata *didalami*. Peneliti perlu melihat siapa yang mengucapkannya, dalam posisi apa, kepada siapa, pada tahap apa suatu persoalan berlangsung, dan konsekuensi diskursif apa yang muncul dari penundaan kepastian tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan Fairclough (2003), yang menekankan hubungan antara makna representasional, relasional, dan tindakan dalam teks.

Dalam linguistik fungsional, bahasa juga dipahami sebagai sumber daya untuk membangun makna, bukan sekadar kumpulan aturan formal. Halliday dan Matthiessen (2014) menunjukkan bahwa pilihan gramatikal berkaitan dengan cara pengalaman dikonstruksi, hubungan sosial dinegosiasikan, dan pesan diorganisasikan. Pilihan antara kalimat aktif dan pasif, misalnya, dapat mengubah fokus terhadap agensi. "Institusi mengabaikan laporan" mengedepankan pelaku tindakan, sedangkan "laporan terabaikan" mengedepankan keadaan dan mengurangi keterlihatan aktor. Perbedaan itu tidak selalu berarti adanya

manipulasi, tetapi tetap memiliki konsekuensi bagi cara tanggung jawab menjadi terlihat.

Analisis Wacana Kritis memperluas perhatian tersebut dengan menempatkan pilihan kebahasaan dalam relasi kekuasaan dan ideologi. Machin dan Mayr (2023) menegaskan bahwa pilihan semiotik yang tampak sederhana dapat membawa nilai, identitas, dan sudut pandang tertentu. Karena itu, peneliti tidak cukup menandai kata yang dianggap "kuat" atau "lemah". Yang lebih penting adalah menemukan pola: pilihan apa yang berulang, aktor apa yang konsisten memperoleh agensi, aktor apa yang sering dihilangkan, serta nilai apa yang terus dinormalisasi melalui pengulangan tersebut.

Konsep praktik sosial juga membantu membedakan antara niat penulis dan efek diskursif teks. Sebuah struktur bahasa dapat menghasilkan konsekuensi representasional tanpa harus diasumsikan sebagai strategi sadar dari jurnalis atau institusi. Misalnya, ketergantungan pada sumber resmi dapat terbentuk karena rutinitas profesional, tuntutan verifikasi, akses narasumber, atau batas waktu produksi berita. Namun, jika praktik itu terus-menerus membuat suara institusi lebih dominan daripada suara kelompok terdampak, ketimpangan representasional tetap dapat dianalisis. Dengan demikian, kritik diarahkan pada pola sosial yang diwujudkan melalui bahasa, bukan semata-mata pada dugaan motif personal.

Bahasa sebagai praktik sosial pada akhirnya menyediakan fondasi bagi konsep tanggung jawab dalam buku ini. Tanggung jawab tidak hanya dinyatakan melalui kata "bertanggung jawab", "bersalah", atau "wajib". Ia dapat dibentuk melalui penempatan aktor, struktur sebab-akibat, modalitas, pilihan sumber, dan bentuk respons yang ditampilkan. Wacana dapat memperluas

tanggung jawab dari individu menuju institusi dan struktur, tetapi dapat pula mempersempit persoalan menjadi tindakan satu atau beberapa orang. Karena itu, pembacaan tanggung jawab harus dimulai dari cara bahasa mengonstruksi dunia sosial.

B. Media sebagai Arena Konstruksi Realitas

Media merupakan salah satu arena utama tempat pengalaman sosial diubah menjadi bentuk yang dapat dikenali publik. Peristiwa yang kompleks harus dipilih, diringkas, diberi judul, disusun menurut urutan tertentu, dan dihubungkan dengan sumber tertentu sebelum menjadi berita. Proses itu membuat realitas media tidak identik dengan keseluruhan realitas sosial. Fairclough (1995) menunjukkan bahwa wacana media merupakan praktik representasi sekaligus praktik institusional: berita dibentuk oleh rutinitas jurnalistik, hubungan dengan sumber, kebutuhan organisasi, dan konvensi genre.

Gagasan konstruksi realitas melalui media memperoleh perluasan penting dalam konsep *mediated construction of reality*. Couldry dan Hepp (2017) menempatkan media bukan sekadar saluran yang membawa pesan dari satu titik ke titik lain, tetapi sebagai bagian dari kondisi sosial tempat realitas sehari-hari dibentuk dan dikoordinasikan. Dalam masyarakat yang sangat termediasi, institusi, individu, dan kelompok sosial memahami banyak peristiwa yang tidak mereka alami secara langsung melalui representasi media. Dengan demikian, kategori yang dipilih media misalnya “krisis”, “pelanggaran”, “tragedi”, “konflik”, atau “kegagalan” memiliki arti penting bagi pembentukan horizon interpretasi.

Teori *framing* membantu menjelaskan proses seleksi tersebut. Entman (1993) menunjukkan bahwa pembingkaian bekerja dengan menyeleksi aspek tertentu dari realitas dan meningkatkan saliensinya sehingga mendukung definisi masalah, interpretasi sebab, evaluasi moral, atau rekomendasi penanganan tertentu. Kerangka ini tidak berarti bahwa setiap berita memiliki satu bingkai yang tunggal atau bahwa khalayak akan selalu menerima bingkai yang sama. Namun, ia menunjukkan bahwa struktur berita dapat menyediakan jalur interpretasi tertentu dengan memberi ruang lebih besar pada unsur tertentu dibandingkan unsur lain.

Penelitian mutakhir tetap memperlihatkan relevansi proses tersebut dalam lingkungan media digital. Boudana dan Segev (2026), misalnya, menunjukkan bahwa media arus utama tidak hanya menggunakan istilah *fake news*, tetapi juga mendefinisikan dan membingkainya dalam hubungan dengan masalah, kausalitas, tanggung jawab, dan solusi. Temuan semacam ini penting karena memperlihatkan bahwa media dapat menjadi arena tempat batas-batas suatu persoalan dirumuskan. Ketika sebab tertentu ditonjolkan, aktor tertentu menjadi lebih mudah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab; ketika solusi tertentu diprioritaskan, bentuk respons lain dapat menjadi kurang terlihat.

Media digital juga mengubah struktur arena itu sendiri. Bruns (2023) berpendapat bahwa gagasan tentang satu ruang publik yang terpusat semakin sulit digunakan untuk menjelaskan komunikasi kontemporer. Ruang publik kini lebih tepat dipahami sebagai jaringan berbagai publik yang saling beririsan, berbeda ukuran, berbeda tingkat keterbukaan, dan memiliki hubungan yang dinamis. Berita dari media profesional dapat berpindah ke media sosial, dipotong, dikomentari, ditentang, diparafrasekan,

atau dikembalikan lagi ke media arus utama sebagai materi baru. Akibatnya, konstruksi realitas berlangsung melalui sirkulasi, bukan hanya melalui publikasi awal.

Posisi media sebagai arena konstruksi realitas juga menuntut kehati-hatian analitis. Mengatakan bahwa media "mengonstruksi" realitas bukan berarti fakta tidak ada atau bahwa semua representasi sama-sama bebas dari batas empiris. Justru konstruksi berlangsung karena fakta harus diorganisasikan melalui kategori, urutan, sumber, dan bahasa. Penelitian wacana berkepentingan menguji bagaimana organisasi tersebut berlangsung dan apa konsekuensinya bagi distribusi makna. Dengan pendekatan ini, objektivitas jurnalistik tidak ditolak, tetapi dipahami sebagai praktik profesional yang juga diwujudkan melalui pilihan representasional.

C. Peristiwa, Visibilitas, dan Pembentukan Makna Publik

Tidak semua peristiwa memperoleh tingkat visibilitas yang sama. Banyak persoalan berlangsung dalam ruang privat, organisasi, komunitas, atau institusi tanpa segera menjadi bagian dari percakapan publik. Visibilitas muncul ketika suatu peristiwa terdokumentasi, diberitakan, dibagikan, dikomentari, atau dihubungkan dengan isu yang lebih luas. Dalam konteks digital, visibilitas tidak hanya ditentukan oleh redaksi media, tetapi juga oleh infrastruktur *platform*, jaringan pengguna, mekanisme rekomendasi, dan praktik berbagi.

Fu dan Cooper (2022) menunjukkan bahwa visibilitas komunikasi di media sosial dapat menghasilkan kondisi paradoksal. Menjadi terlihat dapat memperkuat akses, legitimasi,

dan daya jangkau, tetapi pada saat yang sama juga dapat meningkatkan pengawasan, risiko, dan tekanan. Temuan tersebut menegaskan bahwa visibilitas bukan keadaan netral. Ketika suatu persoalan menjadi terlihat, relasi antarpelaku berubah: institusi dapat terdorong memberi pernyataan, aktor resmi memperoleh ruang untuk menjelaskan, kelompok terdampak mendapatkan perhatian, dan publik memperoleh bahan untuk mengevaluasi tindakan.

Bruns (2023) membantu memahami bahwa visibilitas kontemporer tersebar di dalam jaringan publik yang saling berhubungan. Sebuah isu dapat sangat menonjol dalam satu komunitas digital tetapi hampir tidak tampak di ruang lain. Karena itu, istilah "publik" perlu digunakan secara hati-hati. Tidak semua pengguna terpapar pada isu yang sama, dan tidak semua ekspresi daring mewakili populasi. Yang dapat diamati dari teks dan sirkulasi media adalah terbentuknya ruang pemaknaan publik tertentu, bukan secara otomatis distribusi sikap seluruh masyarakat.

Pemahaman tersebut diperkuat oleh Baden et al. (2025), yang mengonseptualisasikan opini publik di ekosistem media digital sebagai proses negosiasi diskursif. Mereka menekankan bahwa opini yang diekspresikan secara publik, posisi pembicara, interaksi, norma penerimaan, serta logika institusional dan sosioteknis media ikut membentuk apa yang tampil sebagai pendapat yang dapat diterima atau diperdebatkan. Perspektif ini penting bagi analisis wacana karena memungkinkan peneliti berbicara tentang orientasi makna publik tanpa mengklaim bahwa isi media secara langsung identik dengan keadaan psikologis khalayak.

Perbedaan antara makna publik dan efek khalayak perlu ditegaskan. Wlezien (2024) menemukan bahwa hubungan antara berita dan opini publik dapat berjalan dua arah; dalam kasus yang dianalisisnya, opini publik bahkan sering mendahului perubahan dalam pemberitaan. Wlezien dan Soroka (2024) juga menunjukkan bahwa media dapat merefleksikan preferensi publik dan kebijakan, bukan hanya memengaruhinya. Temuan ini merupakan koreksi penting terhadap asumsi kausal yang terlalu sederhana tentang kekuatan media.

Oleh karena itu, ketika penelitian berbasis teks menyatakan bahwa media membentuk orientasi pemaknaan publik, klaim tersebut harus dibatasi pada struktur diskursif yang tersedia. Peneliti dapat menunjukkan bahwa sebuah berita menyediakan kerangka tertentu untuk memahami sebab, korban, pelaku, atau respons. Namun, untuk membuktikan bahwa masyarakat benar-benar mengadopsi kerangka tersebut diperlukan data khalayak, seperti survei, eksperimen, wawancara, atau desain longitudinal. Batas ini bukan kelemahan Analisis Wacana Kritis, melainkan syarat ketepatan epistemik.

Dalam pembacaan tanggung jawab, visibilitas penting karena sering menjadi titik ketika tuntutan keterjawaban mulai memperoleh bentuk publik. Peristiwa yang sebelumnya hanya diketahui oleh pelaku lokal dapat berubah menjadi isu yang menuntut klarifikasi setelah mendapatkan perhatian luas. Akan tetapi, hubungan itu tidak selalu linear. Ada peristiwa yang langsung mendapatkan respons institusional sebelum viral, ada pula yang baru memperoleh perhatian setelah sirkulasi digital. Karena itu, visibilitas harus dianalisis sebagai kondisi diskursif yang berinteraksi dengan otoritas, nilai berita, dan struktur institusional.

D. Aktor Sosial dan Perebutan Definisi atas Peristiwa

Setiap peristiwa sosial melibatkan aktor, tetapi tidak setiap aktor memperoleh posisi yang sama dalam wacana. Sebagian aktor tampil sebagai pelaku tindakan, sebagian sebagai korban, sebagian sebagai saksi, sebagian sebagai ahli, dan sebagian lain sebagai otoritas yang berhak mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi. Perbedaan posisi tersebut merupakan bagian penting dari konstruksi tanggung jawab karena hak untuk mendefinisikan masalah sering mendahului hak untuk menentukan solusi.

Van Leeuwen (2008) menunjukkan bahwa aktor sosial dapat direpresentasikan melalui berbagai strategi: dimasukkan atau dikeluarkan, disebut secara individual atau kolektif, dipersonalisasi atau diabstraksikan, serta ditampilkan sebagai pihak aktif atau pasif. Kerangka ini membantu menjelaskan bahwa penyebutan aktor bukan sekadar urusan gaya. “Seorang pejabat”, “pemerintah”, “tim investigasi”, “keluarga”, “warga”, atau “korban” masing-masing mengaktifkan kategori sosial yang berbeda dan membawa implikasi berbeda terhadap otoritas serta tanggung jawab.

Perebutan definisi terjadi ketika beberapa aktor menawarkan makna yang tidak sepenuhnya sama atas peristiwa. Keluarga dapat menyebut suatu tindakan sebagai kekerasan, institusi dapat menyebutnya sebagai kesalahpahaman, aparat dapat menempatkannya sebagai dugaan yang masih diperiksa, sedangkan media sosial dapat mempopulerkannya melalui label yang lebih tegas. Analisis wacana perlu memperhatikan bukan

hanya siapa yang berbicara, tetapi juga siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat definisinya menjadi dominan.

Saurwein et al. (2025) memberikan contoh mutakhir tentang bagaimana tanggung jawab dibentuk melalui konfigurasi pembicara, objek tanggung jawab, dan subjek yang diberi tanggung jawab. Dalam wacana media tentang otomasi, mereka menunjukkan bahwa kelompok aktor yang memperoleh suara berbeda menurut isu yang dibahas dan bahwa tanggung jawab dapat diarahkan kepada industri, negara, masyarakat, pakar, bahkan teknologi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab dalam media merupakan jaringan relasional: seseorang atau institusi menuntut pihak lain bertanggung jawab atas sesuatu.

Posisi pembicara juga memengaruhi bobot pernyataan. Baden et al. (2025) menekankan bahwa kontribusi dalam ruang publik tidak memiliki pengaruh yang sama karena posisi, kredibilitas, dan modal simbolik pembicara berbeda. Dalam berita, kutipan dari polisi, kementerian, pakar, pimpinan organisasi, atau lembaga resmi sering memperoleh legitimasi yang lebih cepat dibandingkan pernyataan anonim. Ketimpangan ini tidak selalu keliru; sumber resmi dapat diperlukan untuk verifikasi. Namun, analisis tetap perlu membaca konsekuensinya terhadap suara yang tidak memiliki akses serupa.

Perebutan definisi atas peristiwa dengan demikian bukan sekadar perselisihan terminologis. Definisi menentukan jenis persoalan yang dianggap sedang dihadapi. Jika suatu peristiwa didefinisikan terutama sebagai masalah hukum, aktor legal menjadi lebih penting; jika didefinisikan sebagai masalah kesehatan, otoritas medis memperoleh posisi; jika didefinisikan sebagai kegagalan tata kelola, tanggung jawab institusional dan

struktural menjadi lebih kuat. Karena itu, penelitian terhadap aktor sosial harus selalu dihubungkan dengan definisi masalah yang mereka bawa.

E. Tanggung Jawab sebagai Konstruksi Diskursif

Tanggung jawab dapat dipahami secara hukum, moral, politik, profesional, sosial, atau institusional. Namun, sebelum tanggung jawab menjadi keputusan formal, ia terlebih dahulu dapat muncul sebagai persoalan wacana: siapa yang ditunjuk sebagai penyebab, siapa yang diharapkan bertindak, siapa yang diminta menjelaskan, dan bentuk pemulihan apa yang dinilai memadai. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya terdapat pada keputusan akhir, tetapi juga dibentuk melalui proses representasi dan atribusi.

Kajian *framing* mengenai atribusi tanggung jawab memberi dasar kuat bagi pembacaan tersebut. Iyengar (1991) menunjukkan bahwa cara persoalan dipresentasikan secara episodik atau tematik dapat berhubungan dengan cara khalayak mengatribusikan tanggung jawab. Kerangka episodik cenderung menampilkan contoh konkret dan kasus individual, sedangkan kerangka tematik memberi konteks lebih luas terhadap masalah. Perbedaan ini penting karena persoalan yang disajikan sebagai kejadian individual lebih mudah menghasilkan atribusi individual daripada persoalan yang ditempatkan dalam struktur sosial.

Boukes (2022) memberikan bukti yang lebih mutakhir bahwa hubungan antara pembingkaian episodik dan tematik dengan atribusi tanggung jawab bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh orientasi politik khalayak. Temuannya penting

bukan untuk menggeneralisasi satu efek universal, melainkan untuk menunjukkan bahwa struktur berita dan konteks penerima sama-sama relevan. Dalam penelitian berbasis teks, konsep tersebut sebaiknya digunakan untuk mengidentifikasi potensi arah atribusi yang disediakan wacana, bukan untuk mengklaim respons khalayak yang tidak diukur.

Konstruksi tanggung jawab juga berhubungan dengan legitimasi. Van Leeuwen (2007) menjelaskan bahwa praktik sosial dapat dilegitimasi melalui otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan bentuk naratif tertentu. Kerangka ini menunjukkan bahwa tindakan dinilai sah bukan hanya karena dilakukan, tetapi karena dilengkapi alasan yang dapat diterima. Dalam konteks tanggung jawab, sebuah institusi dapat menampilkan respons sebagai sah karena sesuai prosedur, didukung ahli, dianggap bermoral, atau diposisikan sebagai tindakan yang rasional.

Penelitian Saurwein et al. (2025) memperlihatkan bahwa media dapat menata jaringan tanggung jawab dengan menunjukkan siapa menuntut siapa bertanggung jawab atas objek tertentu. Pendekatan "siapa meminta siapa bertanggung jawab atas apa" sangat berguna untuk menghindari reduksi tanggung jawab menjadi atribut individu. Dalam banyak persoalan kontemporer, tanggung jawab dapat tersebar di antara pemerintah, organisasi, industri, profesional, masyarakat, dan sistem teknologi.

Atas dasar itu, tanggung jawab dalam buku ini dipahami sebagai konstruksi relasional. Ia tidak cukup dibaca melalui kata-kata eksplisit tentang kesalahan. Peneliti perlu menelusuri representasi aktor, agensi gramatikal, hubungan sebab-akibat, sumber legitimasi, bentuk tuntutan, serta respons yang dianggap

relevan. Wacana dapat menempatkan seseorang sebagai sumber masalah tetapi tidak sebagai pihak yang harus memperbaiki; sebaliknya, institusi yang tidak diposisikan sebagai penyebab dapat tetap dianggap memiliki kewajiban untuk merespons karena kewenangan yang dimilikinya.

F. Dari Kejadian Privat Menuju Isu Publik

Peralihan dari kejadian privat menuju isu publik merupakan proses penting dalam pembentukan tanggung jawab. Banyak persoalan pada awalnya hanya diketahui oleh individu atau lingkungan terbatas. Ketika peristiwa dibawa ke media, dilaporkan kepada institusi, direkam, atau disirkulasikan melalui *platform* digital, batas antara privat dan publik mulai berubah. Perubahan ini membawa konsekuensi: aktor yang sebelumnya tidak perlu menjelaskan diri dapat menghadapi tuntutan klarifikasi, sementara lembaga yang sebelumnya berada di luar peristiwa dapat masuk sebagai penengah atau pengambil keputusan.

Dalam ekosistem digital, proses tersebut tidak lagi bergantung sepenuhnya pada media arus utama. Bruns (2023) menunjukkan bahwa ruang komunikasi publik terdiri atas jaringan berbagai publik yang saling terkoneksi. Sebuah unggahan lokal dapat bergerak ke komunitas yang lebih luas, diambil oleh akun berpengaruh, menjadi materi berita, kemudian kembali beredar sebagai bagian dari perdebatan digital. Sirkulasi tersebut membuat batas antara produsen dan penerima informasi menjadi lebih cair.

Visibilitas yang meningkat dapat mempercepat proses institusional, tetapi hubungan tersebut harus dibaca secara empiris, bukan diasumsikan. Fu dan Cooper (2022) mengingatkan

bahwa visibilitas memiliki konsekuensi yang ambivalen. Bagi kelompok tertentu, menjadi terlihat memberi daya tawar; bagi kelompok lain, visibilitas meningkatkan risiko pengawasan dan tekanan. Karena itu, pengubahan kejadian privat menjadi isu publik tidak selalu identik dengan pemberdayaan.

Baden et al. (2025) menunjukkan bahwa ruang digital merupakan arena negosiasi opini yang kompleks, tempat suara memiliki posisi dan bobot yang berbeda. Hal ini menjelaskan mengapa viralitas tidak dapat disamakan dengan konsensus. Sebuah isu dapat memiliki jutaan tayangan tetapi tetap berada dalam ruang perdebatan yang terfragmentasi. Peneliti wacana sebaiknya menyatakan bahwa suatu isu memperoleh *public visibility* atau menjadi objek negosiasi publik, bukan langsung menyimpulkan bahwa "masyarakat" memiliki satu sikap tertentu.

Perubahan status dari privat ke publik juga mengubah cara tanggung jawab dapat dibingkai. Dalam ruang privat, tanggung jawab mungkin dibahas sebagai konflik interpersonal. Setelah masuk ke ruang publik, kategori hukum, etika profesional, reputasi institusi, kepentingan komunitas, atau kebijakan dapat terlibat. Peristiwa yang sama kemudian memiliki lebih banyak lapisan pertanggungjawaban karena lebih banyak aktor memperoleh kepentingan dan otoritas untuk menafsirkan.

Media berperan penting dalam proses translasi tersebut. Jurnalisme mengubah pengalaman yang tersebar menjadi narasi yang memiliki awal, perkembangan, sumber, dan fokus tertentu. Karena itu, analisis terhadap perubahan kejadian privat menjadi isu publik perlu melihat bukan hanya tingkat penyebaran, tetapi juga perubahan definisi masalah. Pertanyaan utamanya adalah: kategori apa yang muncul ketika peristiwa memasuki ruang

publik, aktor baru apa yang memperoleh peran, dan tanggung jawab siapa yang menjadi lebih terlihat atau justru berkurang.

G. Media, Otoritas, dan Legitimasi Tindakan

Tanggung jawab dalam wacana berhubungan erat dengan otoritas. Tidak semua pihak memiliki kapasitas yang sama untuk menetapkan bahwa suatu masalah serius, bahwa suatu tindakan diperlukan, atau bahwa suatu perkara telah selesai. Media memberi ruang kepada sumber tertentu untuk berbicara, tetapi otoritas sumber tersebut juga berasal dari posisi sosial di luar media. Aparat memperoleh kewenangan dari hukum, dokter dari pengetahuan profesional, pemerintah dari birokrasi, organisasi dari struktur internal, dan kelompok korban dari pengalaman langsung.

Fairclough (1995) menunjukkan bahwa hubungan media dengan sumber merupakan bagian sentral dari praktik diskursus. Media dapat berfungsi sebagai arena tempat suara institusi disirkulasikan, tetapi sekaligus memiliki kuasa untuk memilih kutipan, menentukan urutan, menempatkan judul, dan memberi konteks. Karena itu, legitimasi dalam berita merupakan hasil interaksi antara otoritas sumber dan otoritas jurnalistik.

Van Leeuwen (2007) memberikan kerangka untuk menjelaskan bagaimana tindakan dilegitimasi. Otorisasi bekerja ketika tindakan dibenarkan melalui hukum, tradisi, atau kewenangan seseorang; evaluasi moral bekerja melalui nilai; rasionalisasi menghubungkan tindakan dengan tujuan atau pengetahuan tertentu; sedangkan narasi dapat menunjukkan ganjaran atau konsekuensi dari tindakan. Dalam praktik media, beberapa mekanisme dapat bekerja secara bersamaan. Sebuah

keputusan dapat dipresentasikan sebagai benar karena sesuai prosedur, melindungi korban, dan direkomendasikan ahli.

Boudana dan Segev (2026) memperlihatkan bahwa pembingkaian media dapat mengorganisasikan tidak hanya definisi masalah, tetapi juga kausalitas, tanggung jawab, dan solusi. Implikasinya bagi legitimasi cukup jelas: ketika solusi tertentu berulang kali diposisikan sebagai respons yang paling relevan, solusi itu memperoleh normalitas diskursif. Sebaliknya, alternatif yang jarang disebut akan kurang tersedia dalam horizon interpretasi pembaca.

Saurwein et al. (2025) menunjukkan bahwa konfigurasi pembicara dalam wacana tanggung jawab berbeda menurut objek persoalan. Dalam pemberitaan teknologi, jurnalis sendiri dapat menjadi aktor yang menuntut pertanggungjawaban, sedangkan pada isu lain pakar lebih dominan. Hal ini menegaskan bahwa media bukan sekadar wadah netral bagi otoritas yang telah ada. Media juga terlibat dalam penataan siapa yang dapat berbicara dengan otoritatif dan siapa yang dijadikan subjek pertanggungjawaban.

Legitimasi tindakan karena itu perlu dibedakan dari efektivitas tindakan. Sebuah respons dapat direpresentasikan sebagai sah, cepat, atau memadai dalam berita, tetapi analisis teks tidak secara otomatis membuktikan hasil praktisnya. Peneliti dapat menunjukkan bagaimana legitimasi dibangun, sumber apa yang menopangnya, dan alternatif apa yang dipinggirkan. Penilaian terhadap efektivitas memerlukan data tambahan. Perbedaan ini menjaga analisis tetap kritis sekaligus metodologis.

H. Respons Pascaperistiwa dan Ekspektasi Sosial

Ketika sebuah persoalan telah memperoleh visibilitas, perhatian publik sering bergeser dari pertanyaan "apa yang terjadi?" menuju "apa yang dilakukan setelah itu?". Pergeseran ini membuat respons menjadi bagian penting dari konstruksi tanggung jawab. Pernyataan mengenai penyelidikan, klarifikasi, pendampingan, permintaan maaf, kompensasi, evaluasi, atau perubahan kebijakan tidak hanya melaporkan tindakan. Pernyataan tersebut juga membentuk gambaran tentang kewajiban yang diharapkan dari aktor tertentu.

Ekspektasi sosial terhadap respons tidak lahir dari satu sumber. Ia dibentuk oleh norma hukum, nilai moral, kebiasaan institusional, pengalaman kasus sebelumnya, dan diskursus media. Dalam satu konteks, respons legal dapat dianggap memadai; dalam konteks lain, publik dapat menuntut pemulihan, transparansi, atau reformasi. Oleh karena itu, analisis perlu melihat hubungan antara definisi masalah dan jenis respons. Cara suatu masalah dibingkai akan berhubungan dengan jenis penyelesaian yang tampak relevan (Entman, 1993; Boudana & Segev, 2026).

Namun, hubungan media dan ekspektasi sosial tidak boleh disederhanakan sebagai hubungan satu arah. Wlezien (2024) menunjukkan bahwa opini publik juga dapat memengaruhi arah pemberitaan. Wlezien dan Soroka (2024) bahkan menekankan fungsi reflektif media dalam hubungan dengan publik dan kebijakan. Dengan demikian, respons yang muncul dalam media dapat merefleksikan tuntutan yang telah berkembang di

masyarakat sekaligus menyediakan bahan baru untuk menilai institusi.

Temuan Boukes (2022) tentang atribusi tanggung jawab juga menunjukkan bahwa bentuk penyajian berita berinteraksi dengan orientasi penerima. Hal ini penting ketika menganalisis ekspektasi sosial. Wacana dapat menawarkan posisi tertentu misalnya menuntut tindakan negara atau menekankan perilaku individu tetapi penerima tidak selalu mengadopsinya dengan cara yang sama. Karena itu, penelitian tekstual sebaiknya membahas "orientasi respons yang disediakan wacana" daripada menganggap adanya satu efek seragam.

Respons pascaperistiwa juga dapat membentuk penutupan naratif. Berita yang berakhir pada pernyataan "kasus telah ditangani", "pihak terkait telah meminta maaf", atau "evaluasi telah dilakukan" dapat menghasilkan kesan bahwa ketertiban sedang dipulihkan. Dalam banyak kasus, struktur semacam itu diperlukan untuk memberi perkembangan informasi. Namun, secara kritis, peneliti dapat menanyakan apakah penutupan tersebut juga mengurangi ruang untuk mempertanyakan sebab struktural, pola berulang, atau akuntabilitas jangka panjang.

Pembacaan respons dalam buku ini karena itu diarahkan pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah respons yang tampak: tindakan konkret yang diklaim telah dilakukan. Tingkat kedua adalah orientasi normatif di baliknya: jenis penyelesaian apa yang dipresentasikan sebagai sah dan cukup. Pembedaan tersebut memungkinkan analisis tanggung jawab bergerak dari deskripsi tindakan menuju pembacaan mengenai bagaimana suatu wacana membangun ekspektasi sosial terhadap aktor dan institusi.

I. Ketegangan antara Penanganan Insiden dan Pencegahan Struktural

Salah satu persoalan penting dalam wacana tanggung jawab adalah ketegangan antara penanganan kejadian yang telah berlangsung dan perhatian terhadap kondisi yang memungkinkan masalah terjadi. Penanganan insiden biasanya lebih mudah diberitakan karena memiliki aktor, tindakan, dan perkembangan yang konkret. Pencegahan struktural lebih sulit dipadatkan menjadi peristiwa karena menyangkut tata kelola, budaya organisasi, distribusi sumber daya, sistem pengawasan, norma, atau desain kebijakan.

Perbedaan antara pembingkaian episodik dan tematik dari Iyengar (1991) membantu menjelaskan ketegangan ini. Ketika berita berpusat pada kasus individual, aktor dan tindakan yang dekat dengan insiden cenderung lebih menonjol. Ketika konteks struktural diberikan, tanggung jawab dapat diperluas menuju institusi, kebijakan, atau kondisi sosial. Boukes (2022) menunjukkan bahwa hubungan pembingkaian dengan atribusi tanggung jawab tetap relevan, meskipun efeknya tidak selalu sederhana atau seragam.

Dalam Analisis Wacana Kritis, persoalan struktural dibaca melalui hubungan antara teks dan praktik sosial. Fairclough (1992, 2003) menekankan bahwa wacana berhubungan dengan struktur sosial yang lebih luas. Karena itu, analisis tidak berhenti pada siapa yang bertindak setelah masalah terjadi, tetapi juga menanyakan kondisi yang membuat jenis tindakan tertentu terus dibutuhkan. Jika suatu wacana terus menampilkan intervensi pascaperistiwa tanpa mengembangkan pembicaraan mengenai

pencegahan, pola tersebut dapat menunjukkan orientasi yang lebih reaktif daripada struktural.

Pencegahan struktural tidak memiliki bentuk yang sama pada setiap domain. Dalam pendidikan, ia dapat berupa budaya aman, mekanisme pengaduan, pengawasan, inklusivitas, dan perlindungan peserta didik. Dalam kesehatan, bentuknya dapat berupa tata kelola layanan, keselamatan pasien, pembiayaan, dan akses. Dalam teknologi, ia dapat berupa desain yang bertanggung jawab, regulasi, audit, transparansi, dan literasi. Saurwein et al. (2025) menunjukkan bahwa wacana tanggung jawab teknologi memang dapat melibatkan objek tanggung jawab yang beragam, termasuk regulasi, pendidikan, transparansi, dan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab.

Ketegangan antara respons dan pencegahan tidak berarti bahwa respons pascaperistiwa selalu buruk. Penyelidikan, perlindungan, pemulihan, atau sanksi dapat sangat diperlukan. Persoalan analitisnya adalah proporsi dan cakupan. Apakah wacana memperlakukan respons sebagai akhir dari masalah, atau menggunakannya sebagai pintu untuk mempertanyakan sistem? Apakah tanggung jawab hanya melekat pada aktor yang paling dekat dengan kejadian, atau juga pada institusi yang memiliki kewenangan mencegah pengulangan?

Dimensi struktural karena itu dapat berfungsi sebagai alat diagnostik dalam pembacaan tanggung jawab. Peneliti tidak harus mengasumsikan bahwa setiap berita wajib memberikan analisis struktural lengkap. Akan tetapi, ketika banyak teks dianalisis sebagai korpus, pola keberadaan dan ketiadaan menjadi bermakna. Dominasi respons reaktif dapat dibandingkan dengan ruang yang diberikan kepada pencegahan, dan perbandingan

tersebut dapat memperlihatkan batas imajinasi tanggung jawab yang tersedia dalam wacana.

J. Posisi Persoalan dalam Kajian Wacana Media

Dari seluruh pembahasan sebelumnya, persoalan tanggung jawab dapat ditempatkan sebagai titik pertemuan antara kajian bahasa, media, representasi, dan struktur sosial. Bahasa menyediakan perangkat untuk memberi nama, menghubungkan sebab, mendistribusikan agensi, dan menyatakan kepastian. Media menyediakan arena institusional tempat pilihan tersebut diproduksi dan disirkulasikan. Ruang publik menyediakan konteks tempat definisi, legitimasi, dan tuntutan respons dinegosiasikan.

Dalam kajian wacana media, pendekatan ini berbeda dari analisis isi yang hanya mengukur frekuensi isu. Frekuensi tetap dapat berguna, tetapi fokus utama berada pada relasi makna. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana satu aktor mendapatkan otoritas, bagaimana pihak lain diposisikan sebagai penerima tindakan, bagaimana sebuah masalah diindividualisasi atau distrukturalkan, serta bagaimana solusi tertentu memperoleh legitimasi. Fairclough (1995, 2003) dan van Leeuwen (2007, 2008) menyediakan fondasi untuk menghubungkan pilihan bahasa dengan praktik sosial dan legitimasi.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa problem tersebut semakin relevan dalam lingkungan media yang terfragmentasi. Bruns (2023) menekankan jaringan publik yang beragam; Baden et al. (2025) melihat opini publik sebagai negosiasi diskursif

dalam ekosistem digital; Fu dan Cooper (2022) memperlihatkan ambivalensi visibilitas; sedangkan Saurwein et al. (2025) menunjukkan bahwa tanggung jawab dapat dipetakan sebagai jaringan antara pembicara, subjek tanggung jawab, dan objek persoalan. Keseluruhan temuan ini memperkuat kebutuhan untuk membaca tanggung jawab sebagai relasi diskursif, bukan sekadar label hukum.

Pada saat yang sama, penelitian mengenai media dan opini publik mengharuskan kehati-hatian terhadap klaim efek. Wlezien (2024) serta Wlezien dan Soroka (2024) menunjukkan bahwa hubungan berita, opini, dan kebijakan dapat bersifat timbal balik. Konsekuensinya, Analisis Wacana Kritis tidak seharusnya menyimpulkan perubahan sikap masyarakat hanya dari struktur teks. Kekuatan pendekatan ini justru terletak pada kemampuannya menjelaskan kondisi interpretatif yang disediakan wacana: apa yang dibuat terlihat, siapa yang diberi suara, siapa yang diberi tanggung jawab, dan respons apa yang dinormalisasi.

Persoalan tersebut membuka jalan menuju model analisis yang lebih terfokus. Jika representasi menentukan cara aktor dan peristiwa ditampilkan, maka langkah berikutnya adalah melihat bagaimana representasi tersebut mendistribusikan agensi. Distribusi agensi kemudian berkaitan dengan atribusi tanggung jawab. Atribusi membutuhkan legitimasi agar tampak masuk akal, dan legitimasi berhubungan dengan respons yang diharapkan. Pada tingkat yang lebih luas, seluruh rangkaian itu perlu diuji terhadap dimensi struktural: struktur apa yang dihadirkan dan struktur apa yang tetap berada di luar perhatian.

Dengan demikian, posisi bab ini bukan untuk menawarkan prosedur teknis analisis, melainkan membangun asumsi dasar bagi kerangka konseptual buku. Tanggung jawab dalam wacana dipandang sebagai hasil hubungan antara representasi, aktor, legitimasi, dan respons. Kerangka tersebut bersifat terbuka untuk berbagai domain karena tidak mensyaratkan jenis peristiwa tertentu. Perundungan, krisis organisasi, kegagalan layanan publik, kontroversi teknologi, isu lingkungan, atau konflik kebijakan dapat dianalisis selama wacana memperlihatkan persoalan tentang siapa melakukan apa, siapa harus menjelaskan, atas dasar apa tuntutan dianggap sah, dan respons apa yang ditempatkan sebagai penyelesaian.

Bab berikutnya akan memperdalam fondasi tersebut melalui Analisis Wacana Kritis dan persoalan tanggung jawab. Pembahasan akan menempatkan model tiga dimensi Fairclough sebagai dasar untuk membaca teks, praktik diskursus, dan praktik sosial, sebelum hasil pembacaan tersebut disintesis menuju hubungan antara representasi, atribusi, legitimasi, respons, dan struktur. Dengan alur ini, model yang dikembangkan tidak dimaksudkan untuk menggantikan teori besar Analisis Wacana Kritis, tetapi untuk memperjelas satu objek konseptual yang dapat direplikasi dalam penelitian selanjutnya: konstruksi tanggung jawab dalam wacana.

BAB 2
ANALISIS WACANA KRITIS DAN PERSOALAN TANGGUNG JAWAB

Analisis Wacana Kritis (AWK) menawarkan cara untuk membaca bahasa sebagai praktik sosial yang terhubung dengan kekuasaan, ideologi, institusi, dan ketimpangan. Dalam buku ini, AWK tidak ditempatkan hanya sebagai teknik membaca teks, tetapi sebagai fondasi untuk menelaah bagaimana tanggung jawab dikonstruksi melalui representasi, distribusi agensi, legitimasi, dan respons. Orientasi tersebut memerlukan disiplin analitis: bentuk kebahasaan harus dibaca secara rinci, tetapi interpretasinya juga harus dihubungkan dengan produksi wacana dan struktur sosial yang relevan. Kerangka dialektis-relasional Fairclough menjadi pijakan utama, sementara literatur mutakhir mengenai metodologi AWK, praktik analisis teks, absensi diskursif, serta studi akuntabilitas digunakan untuk memperkuat dan memperbarui pembacaan (Fairclough, 1992, 2003, 2015; Machin & Mayr, 2023; Pérez-Durán, 2024; Slemon, 2025).

A. Analisis Wacana Kritis: Orientasi dan Ruang Kajian

Analisis Wacana Kritis berkembang dari perhatian terhadap hubungan antara bahasa dan struktur sosial, khususnya ketika penggunaan bahasa berkelindan dengan dominasi, ketidaksetaraan, legitimasi, dan resistensi. Fairclough (1992)

menempatkan wacana sebagai praktik sosial yang bersifat dialektis: struktur sosial membatasi kemungkinan penggunaan bahasa, tetapi praktik diskursif juga dapat mempertahankan atau mengubah struktur tersebut. Van Dijk (1993) memperkuat orientasi ini dengan menempatkan dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai persoalan sentral kajian kritis. Dengan demikian, AWK tidak sekadar menjelaskan apa yang dikatakan, tetapi menelaah bagaimana cara mengatakan sesuatu berhubungan dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Istilah "kritis" dalam AWK tidak identik dengan sikap mencari kesalahan dalam setiap teks. Orientasi kritis berarti menguji apa yang dinaturalisasi, apa yang dianggap lumrah, siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu representasi, dan siapa yang mengalami pembatasan suara atau agensi. Wodak dan Meyer (2016) menegaskan bahwa studi wacana kritis merupakan bidang yang plural, bukan satu metode tunggal. Berbagai pendekatan dapat berbeda dalam teori konteks, unit analisis, dan prosedur, tetapi berbagi perhatian terhadap hubungan bahasa, kekuasaan, ideologi, dan perubahan sosial.

Keluasan bidang tersebut terlihat pula dalam perkembangan penelitian dua dekade terakhir. Analisis bibliometrik Xiao dan Li (2021) menunjukkan bahwa AWK telah berkembang melampaui domain politik dan media menuju pendidikan, kesehatan, identitas, migrasi, gender, organisasi, dan berbagai ranah sosial lain. Perkembangan ini memperlihatkan daya adaptasi AWK, tetapi juga menuntut ketepatan konseptual. Penggunaan label AWK tidak cukup jika penelitian hanya mengidentifikasi tema atau sikap bahasa tanpa menghubungkannya dengan persoalan kekuasaan dan kondisi sosial yang lebih luas. Sejalan dengan itu, Sveinson et al. (2021)

menekankan bahwa AWK perlu dipahami secara serentak sebagai orientasi teoretis, metodologi, dan praktik analisis, sehingga penggunaannya tidak dapat direduksi menjadi pelabelan tema.

Literatur metodologis mutakhir juga menekankan pentingnya kesesuaian antara pertanyaan penelitian, asumsi teoretis, dan pilihan pendekatan diskursus. Ong et al. (2024) menunjukkan bahwa berbagai pendekatan analisis wacana memiliki landasan ontologis dan epistemologis yang berbeda, sehingga peneliti perlu memilih pendekatan berdasarkan jenis pertanyaan yang hendak dijawab. Dalam konteks buku ini, pilihan terhadap Fairclough didasarkan pada kebutuhan untuk menghubungkan bentuk bahasa, praktik produksi dan sirkulasi wacana, serta struktur sosial tempat atribusi tanggung jawab berlangsung.

Ruang kajian AWK karena itu dapat mencakup teks berita, kebijakan, pidato, laporan organisasi, dokumen hukum, laman web, materi visual, media sosial, hingga sistem informasi digital. Morrison (2024), misalnya, menunjukkan relevansi AWK untuk menelaah mesin pencari sebagai infrastruktur informasi yang membawa relasi kekuasaan dan praktik sosial tertentu. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa "teks" dalam AWK tidak harus dipahami secara sempit sebagai tulisan cetak; yang penting ialah adanya praktik semiosis yang dapat dikaitkan dengan relasi sosial dan kekuasaan.

Buku ini menempatkan AWK sebagai kerangka untuk membaca konstruksi tanggung jawab. Fokus tersebut memperluas pertanyaan kritis dari "bagaimana aktor direpresentasikan?" menuju "bagaimana representasi itu membuat pihak tertentu tampak bertanggung jawab, berwenang, wajib menjawab, atau justru terlepas dari perhatian?". Dengan

posisi tersebut, AWK menjadi landasan untuk membaca tanggung jawab sebagai relasi diskursif, bukan hanya sebagai status hukum atau penilaian moral yang sudah final.

B. Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi

Hubungan bahasa dan kekuasaan merupakan salah satu poros utama AWK. Fairclough (2015) membedakan kekuasaan yang berlangsung *dalam* wacana dan kekuasaan yang bekerja *di balik* wacana. Kekuasaan dalam wacana dapat diamati ketika pihak tertentu mengendalikan giliran bicara, topik, kategori, atau bentuk respons yang dianggap sah. Kekuasaan di balik wacana berhubungan dengan struktur institusional dan sosial yang menentukan siapa memiliki akses lebih besar untuk berbicara dan siapa harus berbicara melalui perantara.

Kekuasaan tidak selalu diwujudkan melalui perintah eksplisit. Ia dapat hadir melalui hak untuk mendefinisikan realitas. Pejabat, pakar, aparat, pemimpin organisasi, media, dan lembaga profesional memiliki sumber otoritas yang berbeda. Ketika suatu berita terus-menerus menempatkan aktor institusional sebagai penentu makna sah, struktur sumber tersebut dapat memperkuat posisi epistemik institusi. Sebaliknya, korban atau kelompok subordinat mungkin dihadirkan sebagai objek penderitaan, tetapi tidak memperoleh kewenangan yang sama untuk mendefinisikan penyebab dan solusi.

Ideologi dalam AWK tidak harus muncul sebagai doktrin politik yang terang-terangan. Ia dapat bekerja melalui asumsi dan kategori yang berulang hingga tampak alamiah. Van Dijk (1993) menjelaskan bahwa wacana dapat berkontribusi pada reproduksi dominasi ketika pengetahuan, sikap, dan representasi kelompok diproduksi secara tidak setara. Fairclough (2003) juga

menunjukkan bahwa ideologi berkaitan dengan cara makna berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan relasi kuasa. Karena itu, analisis ideologi harus ditopang oleh pola tekstual dan kontekstual, bukan oleh dugaan bebas mengenai niat penulis.

Kajian mutakhir memperlihatkan bahwa relasi kuasa tetap relevan ketika objek wacana berubah. Morrison (2024) menggunakan AWK untuk menelaah mesin pencari dan menekankan perlunya melihat tidak hanya sistem teknis, tetapi juga lingkungan sosial-politik serta proses yang sering tidak terlihat dalam interaksi pengguna dengan sistem. Perluasan tersebut penting bagi model tanggung jawab karena kekuasaan kontemporer dapat tersebar antara aktor manusia, institusi, infrastruktur digital, dan prosedur teknis.

Machin dan Mayr (2023) menekankan bahwa analisis kritis perlu memperhatikan detail bahasa dan semiotika yang membuat nilai tertentu dinormalisasi. Pilihan leksikal, metafora, modalitas, struktur tindakan, dan representasi sosial dapat menjadi sumber data untuk membaca ideologi. Namun, mereka bukan penanda ideologi secara otomatis. Peneliti perlu menelusuri bagaimana unsur tersebut berulang, berhubungan satu sama lain, dan memperoleh makna dalam konteks produksi wacana.

Dalam pembacaan tanggung jawab, bahasa, kekuasaan, dan ideologi bertemu pada distribusi agensi. Wacana dapat membuat institusi tampak sebagai penyelesai tanpa cukup membahas perannya dalam munculnya masalah; dapat membuat korban tampak sebagai pusat perhatian moral tetapi tidak sebagai pemegang otoritas; atau dapat memusatkan kesalahan pada individu sambil membatasi pembacaan struktural. Tugas AWK bukan menentukan siapa bersalah berdasarkan teks semata,

melainkan menunjukkan bagaimana kemungkinan atribusi tersebut dibangun dan dilegitimasi.

C. Model Tiga Dimensi Norman Fairclough

Model tiga dimensi Fairclough menjadi salah satu kerangka paling berpengaruh dalam AWK karena menghubungkan tiga lapisan analisis: teks, praktik diskursus, dan praktik sosial. Fairclough (1992) memandang setiap peristiwa diskursif sekaligus sebagai teks, sebagai contoh praktik diskursus, dan sebagai bagian dari praktik sosial. Tiga dimensi ini tidak bekerja sebagai kotak terpisah, tetapi sebagai lapisan yang saling menjelaskan. Bentuk bahasa memiliki hubungan dengan cara teks diproduksi dan dikonsumsi, sedangkan produksi dan konsumsi tersebut berlangsung di dalam struktur sosial tertentu.

Dimensi pertama adalah teks. Pada tingkat ini, peneliti memeriksa ciri linguistik dan semiotik yang dapat diamati, seperti leksikon, gramatika, kohesi, modalitas, transitivitas, nominalisasi, negasi, metafora, dan penamaan aktor. Fairclough (2003) menekankan bahwa analisis teks penting karena wacana diwujudkan melalui pilihan kebahasaan konkret. Tanpa pembacaan tekstual yang memadai, interpretasi mengenai kekuasaan atau ideologi berisiko terlepas dari bukti bahasa.

Dimensi kedua adalah praktik diskursus, yakni proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Di sini peneliti mempertimbangkan siapa yang menghasilkan teks, rutinitas apa yang membentuknya, genre apa yang digunakan, teks atau suara lain apa yang dimasukkan, dan bagaimana wacana direkontekstualisasi. Konsep intertekstualitas menjadi penting karena teks hampir selalu berhubungan dengan teks lain:

pernyataan resmi, regulasi, berita terdahulu, laporan ahli, komentar publik, atau dokumen organisasi.

Dimensi ketiga adalah praktik sosial. Analisis bergerak dari teks dan produksi wacana menuju struktur sosial, institusi, ideologi, dan relasi kuasa. Fairclough (1992, 2003) menegaskan hubungan dialektis antara wacana dan praktik sosial: wacana tidak sepenuhnya menentukan realitas, tetapi berpartisipasi dalam pembentukan identitas, relasi, dan pengetahuan. Pada tingkat inilah peneliti menanyakan apakah pola representasi cenderung mempertahankan struktur tertentu, menantangnya, atau menghasilkan kombinasi yang ambivalen.

Model ini terus digunakan dan dikembangkan dalam penelitian mutakhir. Dahlborg et al. (2024) menunjukkan bahwa kerangka Fairclough tetap berguna untuk menghubungkan analisis linguistik dengan praktik sosial dalam penelitian kualitatif, sedangkan Morrison (2024) mengadaptasinya untuk lingkungan pencarian digital. Keberlanjutan penggunaan tersebut menunjukkan kekuatan model tiga dimensi sebagai arsitektur konseptual, meskipun unit dan teknik analisis dapat disesuaikan dengan objek penelitian.

Dalam buku ini, model Fairclough diperlakukan sebagai "mesin analisis" yang menghasilkan pembacaan berlapis. Namun, tiga dimensi itu belum dengan sendirinya merupakan model khusus konstruksi tanggung jawab. Setelah ciri teks, praktik produksi, dan praktik sosial dipetakan, masih diperlukan sintesis untuk menghubungkan representasi dengan distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, dan respons. Tahap sintesis inilah yang nantinya menjadi ruang kontribusi model yang dikembangkan dalam buku.

D. Dimensi Teks: Representasi dan Pilihan Kebahasaan

Dimensi teks merupakan dasar empiris AWK karena interpretasi kritis harus dapat ditelusuri kembali pada bukti bahasa. López-Deflory et al. (2023) mengingatkan bahwa karakteristik linguistik teks justru kerap terlewat dalam penelitian yang mengaku menggunakan AWK. Mereka menekankan pentingnya analisis linguistik yang eksplisit agar hubungan antara bahasa dan struktur sosial tidak berubah menjadi interpretasi yang terlalu umum. Kritik ini relevan bagi penelitian tanggung jawab: klaim mengenai pengaburan atau penguatan tanggung jawab harus ditunjukkan melalui bentuk bahasa yang teridentifikasi.

Pilihan leksikal menjadi salah satu titik masuk. Satu peristiwa dapat disebut sebagai "konflik", "kekerasan", "pelanggaran", "insiden", "krisis", atau "kesalahan prosedur". Setiap label mengaktifkan medan makna yang berbeda dan berpotensi mengarahkan perhatian pada aktor serta respons yang berbeda. Machin dan Mayr (2023) menekankan bahwa pilihan kata dapat membawa konotasi, klasifikasi, dan evaluasi sosial tertentu. Namun, makna ideologisnya harus dibaca dalam pola penggunaan dan konteks, bukan hanya berdasarkan satu kata yang terisolasi.

Gramatika juga menentukan cara agensi didistribusikan. Kalimat aktif dapat membuat pelaku tindakan lebih terlihat, sedangkan kalimat pasif dapat mengedepankan hasil atau pihak terdampak. Nominalisasi dapat mengubah proses menjadi benda abstrak, misalnya dari "institusi gagal mengawasi" menjadi "terjadi kegagalan pengawasan". Fairclough (2003) menunjukkan bahwa pilihan tersebut relevan karena representasi proses dan

partisipan berhubungan dengan cara tanggung jawab sosial menjadi eksplisit atau tersamar.

Modalitas dan negasi memberikan lapisan lain. Kata seperti "diduga", "mungkin", "dapat", "diperkirakan", "belum", dan "tidak" mengatur derajat komitmen penutur terhadap kebenaran atau keharusan. Dalam jurnalisme, modalitas dapat menunjukkan kehati-hatian etis dan hukum. Dalam analisis wacana, fungsi profesional tersebut tidak diabaikan, tetapi konsekuensi diskursifnya tetap dibaca: kapan status suatu tindakan dibuat pasti, kapan ditangguhkan, dan siapa yang memiliki otoritas untuk mengubah dugaan menjadi keputusan.

Representasi aktor juga dapat dianalisis melalui penamaan, kolektivisasi, anonimisasi, dan penghilangan. Van Leeuwen (2008) menunjukkan bahwa aktor sosial dapat diinklusi atau dieksklusi, dipersonalisasi atau diabstraksikan, serta ditempatkan dalam posisi aktif maupun pasif. Pada penelitian tanggung jawab, pilihan tersebut membantu menjawab apakah persoalan ditempatkan pada individu, kelompok, institusi, atau struktur yang lebih luas.

Analisis teks yang baik karena itu tidak identik dengan daftar panjang fitur linguistik. Peneliti perlu memilih fitur yang secara teoritis relevan terhadap pertanyaan penelitian. Willey-Sthapit et al. (2022) menekankan perlunya keputusan metodologis yang transparan dalam AWK. Bagi model buku ini, unsur tekstual dipilih sejauh membantu menjelaskan representasi, agensi, atribusi, legitimasi, dan respons. Prinsip ini menjaga analisis tetap mendalam tanpa berubah menjadi inventarisasi bahasa yang terputus dari masalah sosial.

E. Praktik Diskursus: Produksi, Sirkulasi, dan Otoritas Sumber

Praktik diskursus mengarahkan perhatian pada proses yang membuat teks hadir. Sebuah berita, laporan, kebijakan, atau pernyataan organisasi bukan hanya rangkaian kalimat, tetapi produk dari rutinitas, hubungan sumber, konvensi genre, prosedur verifikasi, kepentingan organisasi, dan kondisi distribusi. Fairclough (1992) menjelaskan bahwa produksi dan interpretasi teks dimediasi oleh sumber daya anggota masyarakat, termasuk pengetahuan, norma, dan konvensi yang mereka gunakan untuk menghasilkan makna.

Dalam wacana media, pilihan sumber merupakan indikator penting distribusi otoritas. Sumber resmi sering memiliki akses lebih cepat dan legitimasi institusional yang lebih kuat. Hal ini dapat dibenarkan oleh kebutuhan verifikasi, tetapi juga menghasilkan struktur representasi tertentu jika suara resmi terus menjadi titik acuan utama. Peneliti perlu melihat siapa yang dikutip langsung, siapa yang hanya diparafrasekan, siapa yang hadir melalui perantara, dan siapa yang tidak muncul sama sekali.

Intertekstualitas menjelaskan bagaimana teks meminjam otoritas dari teks lain. Laporan polisi, regulasi, keputusan organisasi, kajian ilmiah, rekaman digital, unggahan media sosial, atau berita sebelumnya dapat digunakan untuk memperkuat suatu klaim. Fairclough (1992, 2003) memandang intertekstualitas sebagai salah satu cara penting untuk membaca bagaimana berbagai suara dan tatanan wacana bertemu dalam sebuah teks. Dalam konstruksi tanggung jawab, rujukan terhadap hukum atau ahli dapat memberi legitimasi berbeda dibandingkan rujukan terhadap pengalaman pribadi.

Sirkulasi digital memperluas praktik diskursus karena teks dapat berpindah antar*platform* dan mengalami rekontekstualisasi. Morrison (2024) menunjukkan bahwa lingkungan informasi digital perlu dipahami melalui interaksi sistem, pengguna, dan struktur sosial. Dalam konteks media, berita dapat berangkat dari unggahan pengguna, menjadi pemberitaan arus utama, kemudian kembali ke *platform* sebagai potongan judul, komentar, atau bahan perdebatan. Proses tersebut dapat mengubah visibilitas serta posisi aktor dalam wacana.

Otoritas sumber tidak hanya berhubungan dengan status formal, tetapi juga dengan posisi dalam struktur teks. Kutipan yang ditempatkan pada judul atau bagian awal memperoleh saliens yang lebih besar daripada suara yang muncul di akhir. Selain itu, pemilihan verba pelapor seperti "menegaskan", "mengakui", "mengklaim", atau "membantah" dapat memberi evaluasi berbeda terhadap sumber. Machin dan Mayr (2023) mengingatkan bahwa praktik pengutipan merupakan bagian penting dari cara media mengatur suara dan kredibilitas.

Dalam pembacaan tanggung jawab, praktik diskursus menjelaskan bagaimana sebagian aktor memperoleh kapasitas untuk menuntut pihak lain bertanggung jawab. Otoritas tidak muncul hanya dari isi pernyataan, melainkan dari akses, posisi kutipan, hubungan intertekstual, dan sirkulasi. Karena itu, analisis tanggung jawab perlu menanyakan tidak hanya "apa yang dikatakan?", tetapi "siapa yang memiliki kesempatan untuk mengatakan, dengan dukungan sumber apa, dan melalui jalur distribusi seperti apa?".

F. Praktik Sosial: Ideologi, Kekuasaan, dan Struktur

Praktik sosial merupakan dimensi yang menghubungkan teks dengan tatanan sosial yang lebih luas. Pada tingkat ini, peneliti tidak lagi hanya membaca bentuk bahasa atau proses produksi, tetapi menelaah institusi, norma, ideologi, struktur ekonomi, aturan hukum, dan relasi kuasa yang membentuk wacana. Fairclough (2003) menempatkan wacana sebagai salah satu elemen praktik sosial yang berhubungan dengan elemen lain, seperti tindakan, relasi sosial, orang, dunia material, dan institusi.

Orientasi struktural penting karena persoalan sosial jarang dapat dijelaskan hanya melalui tindakan individu. Struktur organisasi menentukan pembagian kewenangan; hukum menentukan jenis pertanggungjawaban formal; norma profesional menetapkan standar perilaku; sistem teknologi mengatur akses dan visibilitas. AWK memeriksa bagaimana struktur tersebut muncul dalam teks atau justru tidak muncul dan bagaimana ketiadaan itu memengaruhi pembacaan masalah.

Slemon (2025) memberikan penguatan metodologis yang penting dengan menekankan bahwa AWK tidak cukup hanya membaca diskursus dominan yang hadir, tetapi juga perlu memperhatikan absensi dan keheningan. Apa yang tidak dikatakan dapat menjadi relevan jika secara teoritis dan kontekstual semestinya berkaitan dengan masalah. Pendekatan ini tidak berarti peneliti bebas mengisi kekosongan dengan asumsi, tetapi mendorong perbandingan antara wacana yang dominan dan wacana yang secara sistematis terpinggirkan.

Praktik sosial juga merupakan ruang untuk membaca legitimasi. Coşkun dan Arslan (2024) menunjukkan bahwa bahasa organisasi dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi sosial-politik dan kultural-kognitif. Temuan ini memperlihatkan bahwa institusi tidak hanya bertindak, tetapi juga menjelaskan tindakan melalui bahasa yang menghubungkan dirinya dengan nilai, otoritas, tujuan, atau norma yang dapat diterima. Dalam wacana tanggung jawab, respons institusional karena itu dapat berfungsi sebagai tindakan sekaligus produksi legitimasi.

Kekuasaan pada tingkat praktik sosial dapat tersebar dan tidak selalu berada pada satu aktor. Van Dijk (1993) menekankan dominasi kelompok dan institusi, sedangkan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa infrastruktur komunikasi juga memiliki peran. Morrison (2024) memperlihatkan bagaimana sistem pencarian digital dapat menjadi objek analisis kekuasaan karena memediasi informasi yang dapat terlihat. Bagi model tanggung jawab, perluasan ini memungkinkan analisis tidak hanya terhadap individu dan organisasi, tetapi juga terhadap sistem dan aturan yang mengorganisasikan tindakan.

Dengan demikian, praktik sosial berfungsi untuk menguji jangkauan atribusi. Apakah wacana berhenti pada kesalahan individual, bergerak ke tanggung jawab organisasi, atau membuka persoalan struktural? Apakah respons yang ditampilkan hanya memulihkan ketertiban, atau juga mempertanyakan kondisi yang memungkinkan masalah berulang? Pertanyaan tersebut menghubungkan AWK dengan pembacaan tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar identifikasi pelaku dan korban.

G. Dari Analisis Wacana Menuju Pembacaan Akuntabilitas

Peralihan dari AWK menuju pembacaan akuntabilitas memerlukan pembedaan konseptual. Tanggung jawab merupakan konsep luas yang dapat mencakup kewajiban moral, sosial, hukum, profesional, atau struktural. Akuntabilitas lebih spesifik karena menyangkut hubungan keterjawaban: seorang aktor diharapkan memberikan informasi atau penjelasan mengenai tindakan, menghadapi penilaian, dan dalam kondisi tertentu menerima konsekuensi. Bovens (2007) merumuskan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum tempat aktor berkewajiban menjelaskan serta membenarkan tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi.

Kajian akuntabilitas berkembang pesat di berbagai disiplin. Tinjauan sistematis Pérez-Durán (2024) terhadap 277 artikel di jurnal administrasi publik menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki bentuk, mekanisme, dan konsekuensi yang beragam. Temuan tersebut penting bagi analisis wacana karena mengingatkan bahwa akuntabilitas tidak dapat direduksi menjadi "ada atau tidak ada". Ia perlu dibaca sebagai konfigurasi hubungan: siapa memberikan pertanggungjawaban, kepada siapa, tentang apa, melalui mekanisme apa, dan dengan kriteria penilaian apa.

AWK dapat berkontribusi pada pertanyaan tersebut dengan menunjukkan bagaimana hubungan akuntabilitas dikonstruksi sebelum atau selama berlangsungnya mekanisme formal. Wacana dapat menentukan siapa yang dianggap layak dimintai penjelasan, isu apa yang menjadi objek pertanggungjawaban, dan

standar apa yang dianggap sah. Dengan kata lain, bahasa turut menata prasyarat simbolik bagi akuntabilitas: pengakuan terhadap masalah, penetapan aktor, penjelasan sebab, dan legitimasi tuntutan respons.

Hubungan itu terlihat pada bahasa organisasi. Coşkun dan Arslan (2024) menunjukkan bahwa strategi bahasa dapat berkaitan dengan pencarian legitimasi organisasi. Dalam konteks akuntabilitas, klarifikasi, laporan, permintaan maaf, atau penjelasan prosedural dapat berfungsi sebagai respons keterjawaban sekaligus usaha memulihkan legitimasi. Analisis kritis perlu membedakan antara fungsi representasional tersebut dan efektivitas nyata tindakan, karena teks hanya membuktikan bagaimana respons dikonstruksi, bukan secara otomatis apakah respons berhasil.

Pembacaan akuntabilitas melalui AWK karena itu dimulai dari representasi dan agensi, lalu bergerak ke tuntutan keterjawaban. Peneliti menanyakan siapa yang diposisikan sebagai penyebab, siapa yang memiliki kewajiban merespons, siapa yang berhak menilai, dan apa yang ditampilkan sebagai konsekuensi. Kerangka ini tidak menggantikan teori akuntabilitas, melainkan menghubungkannya dengan mekanisme diskursif yang membuat hubungan akuntabilitas terlihat dan dapat diperdebatkan.

Dalam model buku ini, istilah “tanggung jawab” tetap menjadi kategori payung karena lebih luas dan dapat diterapkan pada wacana yang belum memiliki forum akuntabilitas formal. “Akuntabilitas” digunakan ketika wacana telah membentuk relasi keterjawaban yang lebih jelas. Pembedaan tersebut membuat model dapat diterapkan lintas isu tanpa mengasumsikan bahwa

semua tanggung jawab harus berakhir pada proses hukum atau administratif.

H. Akuntabilitas sebagai Persoalan Representasi

Akuntabilitas sering dipahami sebagai mekanisme kelembagaan, tetapi sebelum mekanisme itu bekerja, representasi menentukan siapa yang tampak relevan untuk dimintai pertanggungjawaban. Wacana yang menghilangkan suatu institusi dari rantai sebab-akibat akan menghasilkan ruang akuntabilitas berbeda dari wacana yang menempatkan institusi tersebut sebagai aktor utama. Karena itu, akuntabilitas juga merupakan persoalan representasi: siapa terlihat, bagaimana ia diberi agensi, dan hubungan apa yang dibangun antara tindakan dan konsekuensi.

Bovens (2007) menekankan hubungan antara aktor dan forum sebagai inti akuntabilitas. Dari sudut pandang AWK, hubungan tersebut dapat dianalisis melalui bahasa. Aktor dapat diposisikan sebagai pihak yang menjelaskan, forum dapat diwujudkan melalui media, lembaga pengawas, publik, atau institusi lain, dan objek pertanggungjawaban dapat dibentuk melalui kategori tertentu. Ketika kategori berubah, ruang akuntabilitas juga berubah. Sebuah persoalan yang didefinisikan sebagai pelanggaran hukum akan mengaktifkan forum berbeda dari persoalan yang didefinisikan sebagai kegagalan etis atau tata kelola.

Representasi korban memengaruhi bentuk akuntabilitas yang dianggap relevan. Korban yang terutama dikonstruksi melalui penderitaan dapat mengaktifkan tuntutan pemulihan atau perlindungan. Korban yang direpresentasikan sebagai

pemegang hak dapat membuka pertanyaan lebih luas mengenai kewajiban institusi. Representasi pelaku juga berpengaruh: individualisasi menempatkan tanggung jawab pada orang tertentu, sedangkan konteks struktural dapat memperluas pertanyaan menuju sistem, norma, atau pengawasan.

Bahasa institusional dapat mengubah posisi organisasi dari objek kritik menjadi aktor penyelesai. Coşkun dan Arslan (2024) menunjukkan bahwa bahasa merupakan sumber penting bagi pembangunan legitimasi organisasi. Dalam situasi pertanggungjawaban, penjelasan tentang prosedur, komitmen, atau tindakan korektif dapat menampilkan institusi sebagai responsif. Analisis perlu melihat bagaimana perubahan posisi tersebut berlangsung dan apakah tanggung jawab atas penyebab masalah ikut dibahas atau hanya tanggung jawab untuk merespons setelah masalah terlihat.

Pérez-Durán (2024) menunjukkan bahwa penelitian akuntabilitas mencakup beragam tipe dan mekanisme, sehingga tidak ada satu pola representasi yang berlaku universal. Implikasinya, model AWK harus bersifat terbuka. Peneliti tidak boleh memaksakan bahwa aktor negara selalu merupakan forum, institusi selalu merupakan aktor yang dimintai penjelasan, atau publik selalu merupakan penerima pertanggungjawaban. Konfigurasi tersebut harus ditemukan dari data dan konteks.

Dengan demikian, akuntabilitas sebagai persoalan representasi berarti membaca proses sebelum keputusan normatif dibuat. Peneliti tidak menentukan bersalah atau tidak bersalah, melainkan menjelaskan bagaimana wacana menyediakan struktur untuk menilai: siapa harus menjawab, apa yang perlu dijelaskan, dan bentuk pembenaran apa yang dianggap

dapat diterima. Struktur itu menjadi dasar bagi pembacaan legitimasi dan respons pada tahap analisis berikutnya.

I. Keterbatasan Pembacaan Deskriptif atas Respons Institusional

Salah satu kelemahan yang dapat muncul dalam penelitian wacana ialah berhenti pada deskripsi respons institusional. Pernyataan seperti "pemerintah menindaklanjuti", "organisasi melakukan evaluasi", atau "pihak terkait memberikan klarifikasi" hanya menunjukkan bahwa respons direpresentasikan dalam teks. Deskripsi tersebut belum menjelaskan fungsi diskursifnya, dasar legitimasinya, cakupannya, atau apakah respons menyentuh sumber persoalan.

Perbedaan antara representasi tindakan dan efektivitas tindakan harus dijaga. AWK dapat menganalisis bagaimana tindakan dipresentasikan sebagai cepat, sah, profesional, atau memadai. Namun, untuk menilai apakah tindakan efektif diperlukan data yang sesuai, misalnya evaluasi program, dokumen implementasi, data hasil, atau pengalaman pihak terdampak. Prinsip ini sejalan dengan penekanan metodologis Willey-Sthapit et al. (2022) mengenai perlunya konsistensi antara pertanyaan, data, dan klaim dalam penggunaan AWK.

Bahasa respons juga dapat berfungsi untuk membangun legitimasi. Coşkun dan Arslan (2024) menunjukkan bahwa organisasi menggunakan strategi bahasa untuk memperoleh legitimasi. Karena itu, tindakan seperti klarifikasi atau permintaan maaf tidak boleh dibaca hanya sebagai fakta administratif. Peneliti dapat menanyakan bagaimana tindakan tersebut menampilkan organisasi, nilai apa yang digunakan untuk

membenarkannya, dan apakah respons mengakui tanggung jawab atau justru membatasi ruang pertanggungjawaban.

Pembacaan deskriptif juga cenderung mengabaikan apa yang tidak hadir. Slemon (2025) menekankan nilai analitis dari absensi dan keheningan dalam AWK. Sebuah teks mungkin sangat rinci menjelaskan respons pascaperistiwa, tetapi hampir tidak membahas pencegahan, pengawasan, budaya organisasi, atau mekanisme pengaduan. Ketidakhadiran tersebut tidak otomatis membuktikan adanya penutupan yang disengaja, tetapi dapat menjadi pola penting apabila muncul konsisten dalam korpus dan relevan dengan kerangka teoretis.

Literatur akuntabilitas juga memperlihatkan bahwa keterjawaban bukan sekadar produksi laporan. Bovens (2007) menempatkan penjelasan, pertanyaan, penilaian, dan konsekuensi sebagai unsur relasi akuntabilitas; Pérez-Durán (2024) menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas memiliki variasi besar dalam praktik administrasi publik. Oleh sebab itu, sebuah pernyataan institusional belum cukup untuk menyimpulkan bahwa akuntabilitas telah terpenuhi. Yang dapat dianalisis dari teks ialah bagaimana keterjawaban diklaim dan dinormalisasi.

Keterbatasan tersebut mengarahkan AWK pada pertanyaan yang lebih tajam: respons apa yang dibuat terlihat, siapa yang memperoleh agensi melalui respons itu, apa yang dianggap telah diselesaikan, dan dimensi apa yang tetap berada di luar narasi? Dengan demikian, analisis respons bergerak dari inventarisasi tindakan menuju pembacaan fungsi representasional, legitimasi, dan batas strukturalnya.

J. Kebutuhan akan Kerangka Sintesis Pascaanalisis

Analisis tiga dimensi Fairclough dapat menghasilkan temuan yang sangat kaya: pilihan kata, modalitas, pasivisasi, penamaan aktor, hierarki sumber, intertekstualitas, praktik produksi, ideologi, dan struktur sosial. Kekayaan ini sekaligus menimbulkan persoalan metodologis: bagaimana temuan yang tersebar tersebut disatukan agar menjawab pertanyaan penelitian secara konseptual? Tanpa sintesis, laporan AWK berisiko menjadi rangkaian observasi tekstual yang benar tetapi tidak membentuk penjelasan yang koheren.

Literatur metodologis mutakhir menegaskan kebutuhan tersebut. Alejandro dan Zhao (2024) menawarkan kerangka *multi-method qualitative text and discourse analysis* yang menekankan pentingnya integrasi dan hubungan eksplisit antarpendekatan ketika beberapa teknik digunakan. Meskipun buku ini tidak mengharuskan desain multimethod, prinsip integrasi mereka relevan: hasil analisis harus memiliki hubungan yang jelas dengan pertanyaan dan kerangka teoretis, bukan hanya dikumpulkan sebagai temuan paralel.

López-Deflory et al. (2023) mengingatkan bahwa sintesis tidak boleh mengorbankan detail linguistik. Sebaliknya, Slemon (2025) mengingatkan bahwa fokus pada apa yang tampak tidak boleh menghapus absensi dan suara yang terpinggirkan. Dua penekanan ini menunjukkan bahwa sintesis pascaanalisis perlu bergerak dua arah: menjaga jejak empiris pada teks sekaligus mengangkat pola ke tingkat konseptual yang mampu menjelaskan kekuasaan dan struktur.

Dalam konteks tanggung jawab, sintesis dapat dimulai dari lima hubungan. Pertama, representasi menentukan bagaimana peristiwa dan aktor digambarkan. Kedua, distribusi agensi menunjukkan siapa yang bertindak atau dikenai tindakan. Ketiga, atribusi menghubungkan aktor dengan sebab, kewajiban, atau konsekuensi. Keempat, legitimasi menjelaskan mengapa atribusi atau respons tertentu tampak sah. Kelima, respons menunjukkan bentuk tindakan yang dinormalisasi sebagai jawaban atas persoalan. Dimensi struktural kemudian digunakan untuk menguji apa yang ditonjolkan dan apa yang relatif dimarginalkan.

Kerangka sintesis tersebut harus tetap terbuka. Temuan dari satu domain tidak boleh langsung dijadikan kategori universal. Misalnya, penelitian awal dapat menemukan legitimasi formal, moral, dan administratif, tetapi penelitian lain mungkin memperlihatkan legitimasi ilmiah, religius, ekonomis, komunal, atau kombinasi lain. Prinsip replikasi yang kuat bukan menyalin kategori hasil, melainkan mempertahankan logika pertanyaan dan menguji apakah konfigurasi yang sama muncul kembali.

Dengan posisi itu, model yang dikembangkan dalam buku ini tidak dimaksudkan menggantikan Fairclough. Fairclough tetap menyediakan arsitektur utama untuk membaca teks, praktik diskursus, dan praktik sosial. Kerangka sintesis pascaanalisis berfungsi mengorganisasikan hasil AWK secara khusus untuk membaca tanggung jawab. Bab berikutnya karena itu akan memusatkan perhatian pada representasi, agensi, dan atribusi tanggung jawab sebagai hubungan konseptual yang menjadi jembatan dari analisis wacana menuju model yang dapat direplikasi.

BAB 3
REPRESENTASI, AGENSI, DAN ATRIBUSI TANGGUNG JAWAB

Bab ini menempatkan representasi, agensi, dan atribusi tanggung jawab sebagai tiga simpul yang saling berhubungan dalam pembacaan wacana. Representasi menjawab bagaimana aktor, tindakan, dan peristiwa ditampilkan; agensi menjawab siapa yang diberi kapasitas bertindak, menjelaskan, atau menentukan; sedangkan atribusi tanggung jawab menjawab kepada siapa sebab, kewajiban, dan tuntutan respons dilekatkan. Hubungan tersebut penting karena tanggung jawab jarang hadir hanya dalam pernyataan eksplisit. Ia juga dibentuk melalui pilihan gramatikal, penamaan aktor, seleksi sumber, penghilangan suara, dan pemberian legitimasi kepada pihak tertentu (Fairclough, 2003; van Leeuwen, 2008; Saurwein et al., 2025).

A. Representasi Aktor dalam Wacana

Analisis representasi aktor berangkat dari asumsi bahwa teks tidak sekadar menyebut orang atau institusi, tetapi menempatkan mereka dalam kategori sosial tertentu. Aktor dapat dihadirkan sebagai individu, kelompok, organisasi, korban, pelaku, ahli, aparat, pejabat, keluarga, atau publik. Setiap kategori menghasilkan konsekuensi berbeda karena kategori tersebut membawa asosiasi mengenai kewenangan, kerentanan, kredibilitas, dan kewajiban. Van Leeuwen (2008) menunjukkan

bahwa aktor sosial dapat dimasukkan atau dikeluarkan, diindividualisasi atau dikolektifkan, dinominasikan atau dikategorikan, serta dipersonalisasi atau diimpersonalisasi. Kerangka ini menjadikan representasi aktor sebagai pintu masuk untuk membaca struktur sosial di dalam teks.

Representasi aktor juga perlu dibaca melalui hubungan antara identitas dan tindakan. Seseorang yang disebut "korban" tidak hanya dikenali melalui identitas, tetapi juga melalui tindakan yang dikenakan kepadanya. Sebaliknya, aktor yang disebut "polisi", "pemerintah", atau "pimpinan institusi" sering memperoleh identitas yang sekaligus mengaktifkan kewenangan sosial tertentu. Dalam analisis wacana, identitas demikian tidak diperlakukan sebagai sifat alamiah teks, melainkan sebagai hasil pemilihan kategori yang mengarahkan pembaca pada relasi tertentu antara aktor dan peristiwa (Fairclough, 2003).

Representasi aktor tetap menjadi persoalan penting dalam media kontemporer. Gong et al. (2023) menemukan bahwa representasi aktor dalam pemberitaan COVID-19 *China Daily* berkaitan dengan intertekstualitas dan ideologi, termasuk penggunaan strategi impersonalitas dan generalisasi untuk membangun otoritas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siapa yang tampil dan bagaimana aktor tersebut dinamai dapat membantu memperkuat kepercayaan pada sumber tertentu sekaligus menata hierarki wacana.

Limatius (2025) memperlihatkan persoalan yang lebih tajam dalam komunikasi pemerintah tentang kelompok termarginalkan. Walaupun kelompok-kelompok tersebut diakui sebagai pihak yang terdampak, mereka sering diberi sedikit agensi dan lebih banyak direpresentasikan sebagai penerima perlindungan pemerintah. Representasi sebagai pihak "rentan"

dapat menghasilkan perhatian moral, tetapi sekaligus berisiko menempatkan kelompok tersebut secara konsisten pada posisi pasif. Karena itu, representasi yang tampak positif tidak otomatis berarti representasi yang memberdayakan.

Theodorou (2024) menunjukkan bahwa representasi anak pengungsi dapat membentuk hierarki subjek melalui bahasa, tema, dan tata visual. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa aktor tidak hanya "hadir" atau "tidak hadir", tetapi juga ditempatkan dalam derajat kemanusiaan, kedekatan, kerentanan, dan kelayakan memperoleh perhatian yang berbeda. Analisis representasi karena itu harus menilai bukan hanya frekuensi penyebutan, tetapi kualitas posisi yang diberikan kepada aktor.

Bagi model pembacaan tanggung jawab, representasi aktor menjadi titik awal karena atribusi tidak mungkin berlangsung tanpa konstruksi tentang siapa yang relevan. Aktor yang tidak pernah dihadirkan akan lebih sulit diposisikan sebagai pihak yang harus menjelaskan atau merespons. Sebaliknya, aktor yang konsisten ditempatkan sebagai sumber otoritatif dapat memperoleh posisi sebagai penentu definisi atas masalah. Oleh sebab itu, pertanyaan dasar pada tahap ini adalah: siapa yang hadir, dalam kategori apa mereka hadir, tindakan apa yang dilekatkan, dan posisi sosial apa yang dihasilkan oleh representasi tersebut.

B. Agensi dan Posisi Subjek

Agensi berkaitan dengan kapasitas yang dilekatkan kepada aktor untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, menyampaikan penilaian, atau mengubah keadaan. Dalam analisis bahasa, agensi dapat diamati melalui struktur gramatikal, terutama hubungan antara proses dan partisipan. Halliday dan Matthiessen (2014)

menunjukkan bahwa sistem transitivitas mengorganisasikan pengalaman dengan menghubungkan jenis proses dengan partisipan yang menjalankannya atau mengalaminya. Pilihan ini penting karena teks dapat menempatkan aktor tertentu sebagai pelaku tindakan dan aktor lain sebagai pihak yang dikenai tindakan.

Kalimat aktif biasanya memperlihatkan agensi lebih langsung karena pelaku tindakan dinyatakan secara eksplisit. Sebaliknya, pasivisasi dapat menggeser perhatian dari pelaku ke pihak yang terdampak atau ke tindakan itu sendiri. Namun, pasivisasi tidak boleh otomatis dibaca sebagai manipulasi. Bentuk pasif memiliki fungsi tekstual yang sah, misalnya untuk mempertahankan topik atau ketika pelaku tidak diketahui. Analisis kritis menjadi relevan ketika pola pasivisasi berulang dan secara sistematis mengurangi keterlihatan aktor tertentu (Fairclough, 2003).

Bartley dan Trevisan (2024) memperlihatkan bagaimana pola transitivitas dan evaluasi dapat berkontribusi pada konstruksi karakter kriminal dan praduga bersalah dalam representasi kelompok sosial. Temuan tersebut penting karena menghubungkan struktur linguistik dengan konsekuensi representasional: cara aktor ditempatkan sebagai pelaku, penerima, atau target proses dapat membantu membangun interpretasi tentang karakter, niat, dan tanggung jawab mereka.

Agensi juga bersifat epistemik. Seorang aktor dapat tidak melakukan tindakan material, tetapi memiliki kapasitas untuk mendefinisikan apa yang benar, apa yang belum pasti, dan apa yang harus dilakukan. Polisi, dokter, pakar, pejabat, atau pimpinan organisasi sering tampil sebagai subjek dari verba seperti “menjelaskan”, “menilai”, “memastikan”, dan

"menyatakan". Agensi epistemik semacam ini penting karena pihak yang diberi hak menjelaskan memperoleh kewenangan untuk menentukan status peristiwa.

Limatius (2025) menunjukkan bahwa kelompok termarginalkan dapat direpresentasikan sebagai pihak yang dilindungi tetapi tetap memiliki sedikit agensi. Persoalan tersebut memperlihatkan perbedaan antara visibilitas dan agensi: tampil dalam teks tidak sama dengan memiliki kapasitas untuk berbicara atau bertindak di dalam teks. Dengan demikian, penelitian perlu membedakan kuantitas kehadiran dari kualitas posisi subjek.

Dalam pembacaan tanggung jawab, agensi membantu menjawab siapa yang ditempatkan sebagai penyebab, siapa yang memiliki kapasitas menyelesaikan, dan siapa yang hanya menjadi penerima dampak. Distribusi agensi yang timpang dapat membuat tanggung jawab tampak terkonsentrasi atau justru mengabur. Karena itu, analisis agensi tidak berhenti pada tata bahasa, tetapi bergerak menuju relasi sosial yang diwujudkan oleh tata bahasa tersebut.

C. Korban sebagai Pusat Penderitaan dan Sumber Legitimasi Moral

Korban sering menempati posisi khusus dalam wacana karena penderitaan memberikan daya tarik moral yang kuat. Representasi luka, trauma, kehilangan, ketakutan, atau kerentanan dapat membuat suatu masalah memperoleh urgensi yang lebih besar. Chouliaraki (2006) menunjukkan bahwa mediasi penderitaan bukan sekadar proses menampilkan rasa sakit, tetapi juga proses yang mengorganisasikan hubungan moral antara pihak yang menderita dan pihak yang menyaksikan. Media

menentukan bentuk kedekatan, jarak, identifikasi, dan kemungkinan respons terhadap penderitaan tersebut.

Dalam konteks anak, Moeller (2002) menunjukkan adanya "hierarki kepolosan" dalam pemberitaan internasional. Anak sering diposisikan sebagai korban yang sangat layak memperoleh simpati karena mereka dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih kecil atas kondisi yang menimpa mereka. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa penderitaan anak dapat menjadi sumber legitimasi moral yang sangat kuat dalam wacana publik. Namun, penekanan pada kepolosan juga dapat membuat anak direduksi menjadi simbol penderitaan.

Representasi korban anak tetap membawa ambivalensi. Theodorou (2024) menemukan bahwa representasi visual anak pengungsi membentuk hierarki subjek dan dapat bergerak antara humanisasi dan dehumanisasi. Tenor dan Himma-Kadakas (2024) juga menunjukkan bahwa anak masih sering kurang dilibatkan sebagai sumber dalam pemberitaan karena pertimbangan perlindungan, rutinitas redaksi, dan penilaian profesional. Perlindungan yang dimaksudkan untuk menjaga anak dengan demikian dapat sekaligus mengurangi kehadiran suaranya.

Korban sebagai pusat penderitaan dapat meningkatkan legitimasi moral suatu tuntutan. Ketika kerugian ditampilkan secara konkret, tindakan institusional seperti perlindungan, investigasi, pemulihan, atau kompensasi menjadi lebih mudah dipresentasikan sebagai perlu. Akan tetapi, analisis perlu membedakan antara pengakuan penderitaan dan pemberian agensi. Korban dapat memperoleh perhatian besar melalui narasi trauma, tetapi tetap tidak memperoleh hak definisional atas peristiwa yang dialaminya.

Limatius (2025) menunjukkan pola serupa ketika kelompok termarginalkan ditampilkan sebagai pihak yang rentan dan harus dilindungi oleh pemerintah. Pola ini dapat memperkuat legitimasi tindakan negara, tetapi sekaligus menempatkan kelompok terdampak sebagai penerima pasif. Dalam konteks wacana tanggung jawab, hal tersebut berarti penderitaan korban dapat berfungsi ganda: menguatkan tuntutan moral terhadap pihak lain sekaligus mengurangi kapasitas korban sebagai aktor yang menentukan arah respons.

Karena itu, model analisis tidak memperlakukan penderitaan sebagai bukti langsung mengenai siapa yang bersalah. Penderitaan dibaca sebagai sumber legitimasi moral yang membuat suatu masalah menjadi serius dan menuntut jawaban. Pertanyaan analitis berikutnya adalah siapa yang memperoleh hak menerjemahkan penderitaan tersebut menjadi tuntutan, siapa yang menentukan respons, dan apakah korban tetap memiliki ruang untuk mendefinisikan kebutuhan serta bentuk pemulihan yang dianggap penting.

D. Pelaku, Anonimisasi, dan Penahanan Atribusi

Representasi pelaku berbeda dari representasi korban karena teks sering harus menyeimbangkan tuntutan keterbukaan dengan prinsip kehati-hatian, privasi, perlindungan anak, dan praduga tak bersalah. Karena itu, pelaku dapat disebut secara anonim, kolektif, atau melalui status sementara seperti “terduga”. Strategi ini memiliki fungsi etik dan hukum yang penting, tetapi tetap menghasilkan konsekuensi diskursif karena tingkat kepastian tanggung jawab menjadi lebih rendah.

Van Leeuwen (2008) menjelaskan bahwa aktor dapat dikeluarkan, diburamkan, digeneralisasi, atau diimpersonalisasi. Dalam konteks atribusi, penghilangan nama atau pelaku tidak selalu berarti penghilangan tanggung jawab; kadang-kadang tanggung jawab dialihkan dari individu menuju kategori, kelompok, atau institusi. Namun, jika tindakan terus direpresentasikan tanpa pelaku, hubungan antara tindakan dan tanggung jawab dapat menjadi kabur.

Bartley dan Trevisan (2024) memperlihatkan sisi sebaliknya: struktur transitivitas dan evaluasi dapat secara kuat membangun asumsi mengenai karakter kriminal dan rasa bersalah. Temuan ini mengingatkan bahwa atribusi yang terlalu kuat juga problematis. Representasi pelaku harus dianalisis dengan memperhatikan bagaimana kepastian, evaluasi, dan agensi dibentuk, bukan hanya apakah pelaku disebut atau tidak.

Modalitas berperan penting dalam penahanan atribusi. Kata seperti “diduga”, “disebut”, “diduga terlibat”, “masih diperiksa”, atau “belum dapat dipastikan” menandai bahwa status tanggung jawab belum final. Dalam jurnalisme, bentuk tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian profesional. Dalam analisis wacana, modalitas menunjukkan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengubah ketidakpastian menjadi kepastian, misalnya pengadilan, penyidik, regulator, atau mekanisme internal organisasi.

Penahanan atribusi juga dapat terjadi melalui pemisahan antara sebab dan kewajiban merespons. Seorang aktor mungkin belum ditetapkan sebagai penyebab, tetapi institusi tertentu tetap dapat diwajibkan mengambil tindakan karena memiliki kewenangan perlindungan. Fleisher et al. (2025) menegaskan pentingnya membedakan praktik tanggung jawab moral dari

kerangka akuntabilitas institusional. Pembedaan ini membantu memahami bahwa pihak yang harus menjawab secara institusional tidak selalu identik dengan pihak yang paling layak disalahkan secara moral.

Dengan demikian, analisis pelaku perlu menghindari dua ekstrem: menganggap anonimisasi sebagai pengaburan yang selalu ideologis, atau menganggap bentuk anonim sebagai unsur netral tanpa konsekuensi. Yang dibaca adalah pola hubungan antara identifikasi, modalitas, agensi, dan mekanisme penentuan tanggung jawab. Dari pola tersebut dapat dilihat bagaimana teks menahan, menunda, memperkuat, atau mengalihkan atribusi.

E. Keluarga sebagai Jembatan antara Ruang Privat dan Publik

Keluarga sering menjadi aktor yang menghubungkan pengalaman privat dengan ruang publik. Dalam banyak kasus, terutama ketika pihak terdampak adalah anak, orang sakit, atau individu dalam kondisi rentan, keluarga menjadi pihak yang pertama kali menyampaikan kronologi, melaporkan kejadian, meminta pertolongan, atau menuntut respons. Peran ini membuat keluarga memiliki posisi diskursif ganda: sebagai bagian dari pengalaman personal sekaligus sebagai aktor yang memindahkan pengalaman tersebut ke arena institusional.

Perubahan informasi privat menjadi isu publik memiliki implikasi terhadap tanggung jawab. Neu dan Saxton (2024) menunjukkan bahwa publikasi informasi finansial yang sebelumnya bersifat privat melalui Panama Papers memicu percakapan akuntabilitas sosial di Twitter. Walaupun konteksnya berbeda, prinsipnya relevan: ketika informasi privat memperoleh

visibilitas, jaringan aktor baru dapat masuk, tuntutan dapat terbentuk, dan pihak yang sebelumnya berada di luar perhatian publik dapat dipanggil untuk menjawab.

Keluarga dapat menjalankan fungsi advokasi dengan memberi bahasa pada pengalaman korban. Namun, perwakilan tersebut tidak selalu identik dengan suara korban. Tenor dan Himma-Kadakas (2024) menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam berita dipengaruhi oleh ketegangan antara hak partisipasi dan kebutuhan perlindungan. Dalam situasi tertentu, keluarga menjadi perantara yang diperlukan; dalam situasi lain, dominasi suara orang dewasa dapat mengurangi kemampuan anak untuk mengartikulasikan pengalaman dari perspektifnya sendiri.

Dalam pembacaan agensi, keluarga sering muncul sebagai subjek aktif dari verba seperti “melaporkan”, “meminta”, “menuntut”, “mengungkapkan”, atau “mendampingi”. Melalui tindakan tersebut, pengalaman privat dikonversi menjadi klaim publik. Keluarga tidak hanya menyediakan informasi, tetapi dapat mendefinisikan masalah, menentukan aktor yang dianggap bertanggung jawab, dan memengaruhi jalur respons yang kemudian diambil institusi.

Namun, legitimasi keluarga juga perlu dibaca secara kontekstual. Kedekatan dengan korban dapat memberi otoritas pengalaman, tetapi media tetap dapat menyeimbangkannya dengan sumber resmi, ahli, atau pihak lain untuk menjaga verifikasi. Dalam wacana yang diperebutkan, keluarga dan institusi dapat menawarkan definisi berbeda atas kejadian. Analisis perlu membaca bagaimana media menempatkan kedua sumber tersebut dan siapa yang memperoleh prioritas dalam struktur teks.

Bagi model tanggung jawab, keluarga merupakan contoh penting bahwa atribusi tidak selalu berasal dari aktor formal. Tuntutan dapat dimulai dari ruang interpersonal dan kemudian bergerak menuju polisi, sekolah, pemerintah, regulator, atau media. Proses ini menunjukkan bahwa tanggung jawab memiliki dimensi sirkulatif: klaim bergerak melintasi arena, berubah bentuk, dan memperoleh legitimasi tambahan ketika memasuki institusi yang berbeda.

F. Institusi sebagai Aktor Penjelas dan Pengelola Respons

Institusi memiliki posisi yang kompleks dalam wacana karena dapat sekaligus menjadi lokasi masalah, pihak yang dituduh, sumber informasi, pemberi perlindungan, pengelola krisis, dan pengambil keputusan. Ketika institusi memberikan klarifikasi, media tidak hanya memperoleh data baru, tetapi juga memberikan ruang kepada organisasi untuk membingkai hubungan antara peristiwa dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, suara institusi harus dibaca sebagai bagian dari pertarungan definisi, bukan sekadar tambahan informasi.

Fairclough (1995) menunjukkan bahwa hubungan media dengan sumber institusional merupakan unsur penting dalam produksi wacana. Institusi memiliki akses lebih mudah kepada saluran resmi, juru bicara, data, dan prosedur komunikasi. Akses tersebut memberi keuntungan dalam menentukan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa. Istilah seperti “evaluasi”, “klarifikasi”, “proses internal”, atau “tindak lanjut” dapat membangun citra bahwa organisasi sedang bekerja dalam kerangka yang tertib.

Limatius (2025) memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah dapat mengutamakan representasi positif atas tindakan institusi, sementara kelompok terdampak mendapat lebih sedikit agensi. Temuan tersebut relevan untuk melihat fungsi pengelolaan respons. Institusi dapat tampil sebagai pelindung dan pemecah masalah, tetapi representasi tersebut perlu dibaca bersama dengan posisi aktor lain: apakah mereka memperoleh suara, apakah tanggung jawab struktural diakui, dan apakah tindakan institusi dinarasikan sebagai penyelesaian final.

Baker et al. (2026) menunjukkan secara langsung bahwa akuntabilitas dapat diproduksi dan diperebutkan melalui bahasa. Dalam konteks penyelidikan publik mengenai tanggung jawab digital, mereka menemukan bahwa presupposisi dan tindak tutur tidak langsung dapat digunakan untuk menanamkan asumsi, menggeser beban pembuktian, dan mengalokasikan kembali tanggung jawab moral. Temuan ini memperlihatkan bahwa bahasa institusional bukan sekadar pelaporan posisi, melainkan perangkat untuk menegosiasikan batas kewajiban.

Respons institusional juga dapat membentuk legitimasi administratif. Klarifikasi, investigasi internal, permintaan maaf, mediasi, pemberian bantuan, atau tindakan disiplin menunjukkan bahwa organisasi mengakui adanya kebutuhan merespons. Namun, keberadaan tindakan belum membuktikan efektivitasnya. Analisis wacana hanya dapat menunjukkan bagaimana respons direpresentasikan, bagaimana ia dilegitimasi, dan apakah respons tersebut memperluas atau mempersempit tanggung jawab.

Karena itu, institusi harus dianalisis dalam dua kapasitas: sebagai subjek yang menjelaskan dan sebagai subjek yang merespons. Kedua kapasitas tersebut dapat saling memperkuat,

tetapi juga dapat bertentangan. Institusi dapat menolak definisi masalah sambil tetap menawarkan bantuan; dapat mengakui dampak tanpa mengakui penyebab; atau dapat mengambil tindakan administratif tanpa menerima kesalahan moral. Kompleksitas inilah yang membuat pembacaan institusi penting bagi model atribusi tanggung jawab.

G. Negara dan Otoritas Formal dalam Penentuan Makna

Negara memiliki posisi khusus karena kewenangannya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga legal dan administratif. Aparat penegak hukum, kementerian, regulator, pengadilan, dan pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk menetapkan status, menjalankan prosedur, menjatuhkan sanksi, atau mengeluarkan kebijakan. Ketika aktor negara muncul dalam wacana, peristiwa sering memperoleh kategori formal yang mengubah cara masalah dipahami.

Otoritas formal bekerja melalui bahasa prosedural. Verba seperti "menyelidiki", "memeriksa", "menetapkan", "menindaklanjuti", atau "memutuskan" menunjukkan tindakan yang memiliki konsekuensi institusional. Dalam struktur teks, aktor negara sering menjadi subjek aktif karena memang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses. Namun, dominasi tersebut juga dapat menggeser fokus dari pengalaman korban atau kondisi sosial menuju proses formal yang sedang berjalan.

Winkel (2025) menunjukkan bahwa media Jerman mengenai kecerdasan artifisial menghubungkan tanggung jawab, etika, dan regulasi dengan berbagai aktor, termasuk negara,

perusahaan, pengguna, dan masyarakat. Studi tersebut memperlihatkan bahwa media dapat membingkai negara sebagai salah satu pengatur hubungan tanggung jawab ketika kewajiban moral atau teknologi sulit ditegakkan tanpa kerangka formal. Negara dengan demikian berfungsi sebagai pengubah tuntutan normatif menjadi mekanisme yang dapat diberlakukan.

Fleisher et al. (2025) membantu memperjelas perbedaan antara tanggung jawab dan akuntabilitas. Menurut mereka, kerangka akuntabilitas merupakan sistem sosial institusional yang memiliki aturan untuk menuntut jawaban dan memberikan konsekuensi, sedangkan praktik tanggung jawab moral bersifat lebih informal dan interpersonal. Pembedaan ini penting ketika membaca negara karena kewenangan formal tidak selalu menentukan siapa yang paling bertanggung jawab secara moral, tetapi dapat menentukan siapa yang harus menjawab dalam prosedur tertentu.

Bovens (2007) mengonseptualisasikan akuntabilitas sebagai relasi ketika seorang aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan perilakunya kepada suatu forum yang dapat mengajukan pertanyaan, menilai, dan memberikan konsekuensi. Kerangka ini membantu membaca peran otoritas formal bukan semata sebagai "penyelesai", tetapi sebagai forum atau aktor yang membentuk proses keterjawaban. Dalam media, kehadiran negara dapat memberi legitimasi formal pada status suatu perkara.

Analisis kritis tetap perlu menguji apa yang terjadi ketika negara menjadi pusat makna. Apakah proses formal memperjelas tanggung jawab atau justru menggantikan pembacaan struktural? Apakah pihak terdampak mendapat ruang di luar status sebagai sumber bukti? Apakah institusi nonnegara yang memiliki

kewajiban pencegahan ikut dipersoalkan? Pertanyaan tersebut mencegah analisis berhenti pada asumsi bahwa hadirnya negara otomatis berarti masalah telah ditangani secara memadai.

H. Kehadiran, Ketidakhadiran, dan Marginalisasi Suara

Dalam wacana, ketidakhadiran dapat sama pentingnya dengan kehadiran. Sebuah aktor dapat tidak disebut sama sekali, hanya disebut melalui pihak lain, atau hadir tanpa memperoleh kutipan langsung. Van Leeuwen (2008) menyebut eksklusi sebagai salah satu strategi representasi aktor sosial. Eksklusi dapat terjadi karena aktor dianggap tidak relevan, tidak tersedia, dilindungi secara etik, atau karena struktur produksi media lebih memudahkan akses kepada sumber lain. Analisis harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut sebelum membuat kesimpulan ideologis.

Marginalisasi suara tidak selalu berarti aktor tidak terlihat. Limatius (2025) menemukan bahwa kelompok termarginalkan sering disebut dalam komunikasi pemerintah, tetapi diberi sedikit suara dan agensi konkret. Mereka hadir sebagai kategori yang dibicarakan, bukan sebagai pihak yang berbicara. Perbedaan antara "dibicarakan" dan "berbicara" merupakan indikator penting karena akses suara berkaitan dengan kapasitas mendefinisikan kebutuhan, pengalaman, dan tanggung jawab.

Pada anak, ketegangan ini menjadi sangat nyata. Tenor dan Himma-Kadakas (2024) menunjukkan bahwa alasan tidak melibatkan anak dalam pemberitaan berkaitan dengan pertimbangan perlindungan, rutinitas profesional, serta persepsi tentang kemampuan dan risiko. Karena itu, absennya suara anak

tidak dapat dinilai dengan ukuran partisipasi semata. Analisis harus mempertimbangkan hak perlindungan sekaligus hak partisipasi, kemudian menilai siapa yang menggantikan suara anak dan bagaimana penggantian tersebut memengaruhi makna.

Gong et al. (2023) menunjukkan bahwa intertekstualitas dan keragaman suara tidak otomatis menghapus ideologi. Banyak aktor dapat dimasukkan, tetapi hierarki di antara mereka tetap menentukan suara mana yang paling dominan. Media dapat menghadirkan keluarga, korban, pakar, dan pejabat secara bersamaan, tetapi posisi pada judul, lead, frekuensi kutipan, dan panjang penjelasan dapat membuat satu suara memiliki otoritas jauh lebih besar.

Marginalisasi juga dapat bersifat struktural. Saurwein et al. (2025) menemukan bahwa dalam wacana tanggung jawab mengenai otomasi, kelompok masyarakat sipil tidak selalu memperoleh posisi sentral sebagai pembicara, sementara kelompok tertentu seperti ahli atau media sendiri dapat sangat dominan. Studi ini menunjukkan bahwa jaringan tanggung jawab selalu merupakan jaringan visibilitas: ada pihak yang memberi tuntutan, pihak yang menerima tuntutan, dan pihak yang kurang memperoleh akses untuk membentuk tuntutan.

Dalam model analisis, kehadiran dan ketidakhadiran dibaca melalui tiga pertanyaan: siapa yang disebut, siapa yang diberi suara, dan siapa yang memperoleh otoritas definisional. Ketiga aspek tersebut tidak selalu sejalan. Seorang korban dapat sering disebut tetapi jarang dikutip; sebuah institusi dapat jarang disebut tetapi sekali berbicara langsung menentukan arah interpretasi. Pembacaan yang membedakan ketiga lapisan ini lebih presisi daripada sekadar menghitung kemunculan aktor.

I. Distribusi Agensi sebagai Distribusi Tanggung Jawab

Distribusi agensi merupakan salah satu mekanisme utama yang menghubungkan representasi dengan tanggung jawab. Ketika teks berulang kali menempatkan aktor tertentu sebagai pelaku tindakan, aktor tersebut menjadi lebih terlihat sebagai sumber kausalitas atau sebagai pihak yang mampu mengubah keadaan. Sebaliknya, pihak yang terus ditempatkan sebagai penerima tindakan lebih mudah dipahami sebagai korban, objek perlindungan, atau pihak yang menunggu respons.

Sistem transitivitas Halliday dan Matthiessen (2014) memberi dasar linguistik untuk membaca pola tersebut. Namun, dalam model tanggung jawab, analisis transitivitas tidak berhenti pada klasifikasi proses. Yang dicari adalah konsekuensi relasional: bagaimana aktor dibentuk sebagai pelaku, pengalam, penerima, pembicara, atau pemilik kewenangan. Bartley dan Trevisan (2024) menunjukkan bahwa distribusi partisipan dan evaluasi dapat menghasilkan karakterisasi tertentu dan memengaruhi atribusi kesalahan.

Saurwein et al. (2025) mengembangkan gagasan yang sejalan melalui konsep jaringan tanggung jawab dalam wacana media. Mereka menanyakan siapa yang berbicara, siapa yang memberi tanggung jawab, kepada siapa tanggung jawab diberikan, dan objek tanggung jawab apa yang dipersoalkan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak bekerja sebagai garis sederhana antara satu pelaku dan satu akibat, tetapi sebagai jaringan tuntutan yang melibatkan berbagai aktor.

Neu dan Saxton (2024) juga menunjukkan sifat performatif bahasa akuntabilitas. Penyebutan aktor, penggunaan pronomina kolektif, dan verba deontik seperti “harus” atau “perlu” dapat membangun hubungan sosial tentang siapa yang diharapkan melakukan apa. Dalam pengertian ini, distribusi tanggung jawab bukan hanya deskripsi tentang masa lalu, tetapi juga konstruksi kewajiban untuk masa depan.

Penting pula membedakan agensi kausal dari agensi responsif. Pihak yang dianggap menyebabkan persoalan belum tentu menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewajiban merespons. Sebuah institusi dapat memiliki agensi responsif karena memiliki kewenangan, sumber daya, atau mandat perlindungan, meskipun tidak diposisikan sebagai penyebab langsung. Fleisher et al. (2025) membantu memperjelas bahwa tanggung jawab moral dan mekanisme akuntabilitas institusional dapat menunjuk pada aktor yang berbeda.

Karena itu, distribusi agensi dibaca dalam model ini melalui dua sumbu: agensi terhadap terjadinya masalah dan agensi terhadap penyelesaiannya. Pemisahan tersebut membuat analisis lebih teliti. Wacana dapat, misalnya, mengindividualisasi penyebab tetapi menginstitusionalisasi respons, atau sebaliknya menempatkan sebab pada struktur tetapi solusi pada perilaku individu. Konfigurasi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi atribusi tanggung jawab yang lebih luas.

J. Dari Representasi Menuju Atribusi Akuntabilitas

Perjalanan dari representasi menuju atribusi akuntabilitas tidak berlangsung dalam satu langkah. Representasi terlebih dahulu menetapkan siapa yang relevan, agensi menunjukkan siapa yang melakukan atau mampu melakukan sesuatu, dan atribusi tanggung jawab menghubungkan aktor dengan sebab atau kewajiban. Akuntabilitas muncul ketika hubungan tersebut masuk ke dalam struktur keterjawaban: aktor dituntut memberi penjelasan, tindakannya dapat dinilai, dan ada kemungkinan konsekuensi atau tuntutan perbaikan (Bovens, 2007).

Pembedaan antara tanggung jawab dan akuntabilitas menjadi penting agar model tidak mencampurkan kesalahan moral dengan kewajiban institusional. Fleisher et al. (2025) menegaskan bahwa praktik tanggung jawab moral dan kerangka akuntabilitas merupakan dua jenis praktik sosial yang berbeda. Seseorang dapat dinilai bertanggung jawab secara moral tanpa berada dalam forum akuntabilitas formal, sementara pejabat atau institusi dapat diminta mempertanggungjawabkan suatu hasil karena jabatannya meskipun kesalahan personalnya belum terbukti.

Baker et al. (2026) memperlihatkan bahwa batas akuntabilitas dapat dinegosiasikan melalui bahasa. Aktor dapat menguatkan, mengurangi, atau mengalokasikan kembali kewajiban dengan mengatur asumsi, beban pembuktian, dan klaim tentang apa yang diketahui. Temuan ini penting bagi model karena menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya hasil akhir sebuah proses, tetapi juga objek pertarungan diskursif.

Winkel (2025) menunjukkan bahwa media dapat menjadi arena tempat tanggung jawab dan akuntabilitas didistribusikan di antara negara, perusahaan, pengguna, dan masyarakat ketika menghadapi teknologi yang kompleks. Saurwein et al. (2025) juga menunjukkan pola jaringan serupa. Kedua penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa model tanggung jawab perlu terbuka terhadap struktur "banyak tangan", yaitu kondisi ketika sebab, kewenangan, dan kewajiban tidak terpusat pada satu aktor.

Dari sudut Analisis Wacana Kritis, atribusi akuntabilitas harus tetap ditautkan dengan struktur bahasa yang mendasarinya. Peneliti perlu menunjukkan bagaimana penamaan, agensi, modalitas, sumber, dan urutan informasi menghasilkan dasar interpretasi tertentu sebelum menyimpulkan adanya distribusi tanggung jawab. Dengan cara ini, konsep akuntabilitas tidak ditempelkan dari luar teks, melainkan diturunkan melalui jejak representasional yang dapat ditelusuri.

Bab ini dengan demikian menegaskan alur konseptual: representasi membentuk posisi aktor; posisi aktor mendistribusikan agensi; distribusi agensi membuka kemungkinan atribusi tanggung jawab; dan atribusi dapat berkembang menjadi relasi akuntabilitas ketika muncul tuntutan penjelasan, penilaian, serta respons. Bab berikutnya akan memperdalam unsur yang membuat atribusi tersebut memperoleh kekuatan sosial, yaitu mekanisme legitimasi tanggung jawab.

BAB 4
TIGA MEKANISME LEGITIMASI AKUNTABILITAS

Bab ini mengembangkan hubungan antara tanggung jawab dan legitimasi dengan menempatkan tiga mekanisme sebagai perangkat sintesis: legitimasi formal, legitimasi moral, dan legitimasi administratif. Ketiganya tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi universal yang selalu muncul dalam setiap wacana. Dalam kerangka buku ini, ketiganya merupakan konfigurasi analitis yang berguna untuk membaca bagaimana suatu tuntutan tanggung jawab memperoleh pengakuan, bagaimana penderitaan atau nilai memberi bobot moral, dan bagaimana tindakan institusional membentuk kesan bahwa masalah telah memperoleh respons. Pembedaan tersebut tetap terbuka untuk diperluas apabila penelitian pada domain lain menemukan sumber legitimasi yang berbeda (Gagrčin, 2026; Steffek, 2023; Suchman, 1995).

A. Legitimasi sebagai Dasar Pengakuan Tanggung Jawab

Legitimasi menjawab pertanyaan yang berbeda dari tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban atau tuntutan mengenai siapa seharusnya bertindak, menjelaskan, mencegah, atau memperbaiki suatu keadaan. Legitimasi berkaitan dengan pengakuan bahwa aktor, alasan, prosedur, atau

tindakan tertentu layak diterima sebagai sah dan patut. Gagrčin (2026) merumuskan perbedaan ini secara tajam dengan menempatkan tanggung jawab sebagai sisi kewajiban siapa yang seharusnya bertindak dan legitimasi sebagai sisi pengakuan—siapa yang boleh atau layak bertindak dengan otoritas dan kepatutan.

Dalam kajian organisasi, Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas dipandang diinginkan, tepat, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Definisi ini penting karena legitimasi tidak melekat secara alamiah pada aktor. Ia bergantung pada pengakuan sosial. Polisi memiliki kewenangan hukum, dokter memiliki kewenangan profesional, dan organisasi memiliki kewenangan administratif, tetapi bagaimana tindakan mereka diterima tetap bergantung pada proses evaluasi dalam konteks tertentu.

Legitimasi juga merupakan persoalan diskursif. Van Leeuwen (2007) menunjukkan bahwa tindakan dan praktik sosial dapat dilegitimasi melalui otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan mitopoesis atau narasi. Otorisasi merujuk pada hukum, tradisi, institusi, atau tokoh yang diakui; evaluasi moral menghubungkan tindakan dengan nilai; rasionalisasi memberi alasan berdasarkan tujuan atau pengetahuan; sedangkan narasi dapat menunjukkan konsekuensi positif atau negatif. Kategori tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi bekerja melalui bahasa yang menyediakan alasan mengapa tindakan tertentu dianggap wajar.

Steffek (2023) mengingatkan bahwa legitimasi tidak hanya dapat diamati melalui kepercayaan publik, tetapi juga melalui diskursus dan tindakan institusi. Ketiga wilayah tersebut tidak

selalu berimpit. Suatu institusi dapat memiliki prosedur yang sah tetapi tetap diperdebatkan dalam wacana publik; sebaliknya, suatu tindakan dapat memperoleh penerimaan sosial sementara dasar formalnya lemah. Karena itu, analisis legitimasi perlu membedakan sumber dan arena pengakuan.

Pembedaan tersebut penting untuk membaca tanggung jawab. Sebuah tuntutan dapat kuat secara moral tetapi belum memiliki dasar formal. Sebuah keputusan dapat kuat secara prosedural tetapi tetap menghadapi kritik moral. Sebuah institusi dapat melakukan tindakan administratif yang terlihat responsif, tetapi belum tentu mengubah struktur yang menghasilkan masalah. Dengan demikian, legitimasi tidak diperlakukan sebagai satu variabel tunggal, melainkan sebagai kualitas yang dapat dibangun melalui dasar yang berbeda.

Kerangka bab ini menyederhanakan kompleksitas tersebut ke dalam tiga mekanisme yang sesuai dengan problem tanggung jawab dalam wacana: formal, moral, dan administratif. Legitimasi formal menekankan aturan, prosedur, serta otoritas; legitimasi moral menekankan penderitaan, hak, nilai, dan kerentanan; legitimasi administratif menekankan tindakan institusi dalam merespons, memperbaiki, atau mengelola keadaan. Ketiganya akan dibahas sebagai mekanisme yang dapat saling mendukung maupun saling bertentangan.

B. Legalisasi-Prosedural dan Legitimasi Formal

Legalisasi-prosedural merujuk pada proses diskursif ketika suatu masalah memperoleh status yang lebih tegas melalui laporan, penyelidikan, pemeriksaan, penetapan, keputusan, regulasi, atau

tindakan otoritas. Istilah "legalisasi" dalam kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai pengesahan hukum dalam arti teknis, melainkan sebagai pergeseran suatu masalah ke dalam bahasa dan mekanisme formal yang diakui. Ketika peristiwa masuk ke prosedur, tanggung jawab mulai diterjemahkan ke dalam kategori yang dapat diperiksa oleh institusi.

Legitimasi formal berakar pada hubungan antara sumber kewenangan, legalitas, dan prosedur. Perspektif keadilan prosedural menunjukkan bahwa penerimaan terhadap otoritas tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh bagaimana keputusan dibuat. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2022), dalam kajian mengenai legitimasi keputusan algoritmik pemerintah, membedakan legitimasi input, *throughput*, dan output serta menunjukkan bahwa kepatuhan pada prosedur hukum, transparansi, dan mekanisme pengawasan merupakan bagian penting dari legitimasi proses.

De Fine Licht et al. (2022) memperlihatkan bahwa legitimasi tidak berhenti setelah keputusan formal dibuat. Penjelasan dan pengaturan pascakeputusan dapat memengaruhi penerimaan warga terhadap kebijakan. Temuan ini relevan untuk pembacaan wacana karena tindakan formal yang telah dilakukan masih membutuhkan justifikasi, komunikasi, dan keterjawaban. Legitimasi formal dengan demikian bukan hanya keberadaan aturan, tetapi juga kemampuan menjelaskan bagaimana aturan diterapkan.

Dalam wacana media, legitimasi formal sering dibangun melalui verba institusional seperti "melaporkan", "menyelidiki", "memeriksa", "menetapkan", "menindaklanjuti", atau "memutuskan". Verba tersebut memberi agensi kepada aktor resmi dan menandai bahwa persoalan telah memasuki jalur yang

diakui. Status "diduga", "terlapor", "tersangka", atau istilah prosedural lain juga mengorganisasikan tingkat kepastian dan posisi aktor.

Kekuatan legitimasi formal terletak pada kemampuannya menghasilkan aturan pengujian. Klaim dapat diverifikasi, bukti dapat diminta, keputusan dapat dibandingkan dengan prosedur, dan aktor dapat ditempatkan dalam forum keterjawaban. Namun, formalitas tidak otomatis menjamin legitimasi substantif. Prosedur yang sah dapat tetap dipersoalkan jika dianggap tidak adil, tidak transparan, atau tidak cukup melibatkan pihak terdampak (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2022; Steffek, 2023).

Karena itu, dalam model analisis, legalisasi-prosedural dibaca sebagai mekanisme legitimasi formal, bukan sebagai bukti bahwa masalah telah terselesaikan. Peneliti perlu menilai apa yang dilegitimasi oleh prosedur: status kasus, kewenangan aktor, batas tanggung jawab, atau bentuk respons tertentu. Setelah itu, analisis dapat menguji apakah legitimasi formal berjalan searah dengan legitimasi moral dan administratif atau justru menutupi ketegangan di antara ketiganya.

C. Laporan, Penyelidikan, Pemeriksaan, dan Otoritas Resmi

Laporan merupakan salah satu bentuk penting translasi tanggung jawab dari pengalaman sosial menuju mekanisme formal. Melalui laporan, sebuah klaim memperoleh alamat institusional: ada pihak yang mengadukan, ada forum yang menerima, dan ada prosedur yang diharapkan berjalan. Dalam wacana, frasa seperti "telah dilaporkan" atau "laporan telah diterima" sering menjadi

penanda bahwa suatu masalah telah melewati ambang dari keluhan menuju perkara yang dapat ditindaklanjuti.

Penyelidikan dan pemeriksaan memperkuat struktur tersebut. Keduanya tidak selalu menghasilkan kesimpulan mengenai kesalahan, tetapi membentuk pengakuan bahwa klaim layak diperiksa. Karena itu, legitimasi formal dapat muncul bahkan sebelum tanggung jawab final ditetapkan. Modalitas seperti "diduga" atau "masih diperiksa" menunjukkan bahwa wacana formal bekerja melalui penundaan kepastian yang terstruktur, bukan melalui kekosongan makna.

Otoritas resmi menjadi penting karena memiliki kewenangan untuk mengubah status klaim. Polisi dapat mengubah laporan menjadi penyelidikan; regulator dapat mengubah keluhan menjadi pemeriksaan; pengadilan dapat mengubah dugaan menjadi putusan; dan institusi administratif dapat mengubah hasil evaluasi menjadi sanksi atau kebijakan. Bovens (2007) menyebut akuntabilitas sebagai relasi ketika aktor harus menjelaskan serta membenarkan perilakunya di hadapan forum yang dapat menilai dan memberikan konsekuensi. Prosedur formal menyediakan forum semacam itu.

Namun, kehadiran otoritas formal dapat menghasilkan pemusatan makna. Ketika media sangat bergantung pada pernyataan aparat, makna peristiwa dapat mengikuti ritme prosedur formal: menunggu bukti, menunggu pemeriksaan, menunggu keputusan. Pendekatan ini penting bagi kepastian hukum, tetapi secara diskursif dapat membuat dimensi lain misalnya penderitaan, kondisi struktural, atau kegagalan pencegahan menjadi sekunder.

Legitimasi prosedural tetap bergantung pada kualitas tata kelola. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2022) menekankan perlunya kejelasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Steffek (2023) juga menunjukkan bahwa kualitas prosedur merupakan salah satu sumber legitimasi yang penting meskipun bobotnya dapat berbeda menurut bidang kebijakan.

Dengan demikian, laporan, penyelidikan, dan pemeriksaan dibaca dalam model ini sebagai rangkaian produksi legitimasi formal. Rangkaian tersebut mengubah peristiwa menjadi objek institusional yang dapat ditangani. Akan tetapi, analisis perlu mempertanyakan titik akhirnya: apakah keberadaan prosedur hanya mengonstruksi kesan bahwa kasus "sedang ditangani", atau apakah prosedur juga menghasilkan perluasan tanggung jawab menuju institusi dan struktur yang relevan.

D. Medikalisasi Korban dan Legitimasi Moral

Medikalisasi merupakan proses ketika kondisi, perilaku, atau pengalaman sosial mulai dipahami dan dikelola melalui kategori medis atau psikologis. Conrad (2007) menjelaskan medikalisasi sebagai transformasi kondisi manusia menjadi persoalan yang didefinisikan dan diperlakukan sebagai masalah medis. Konsep ini tidak selalu memiliki makna negatif. Medikalisasi dapat menyediakan pengakuan, akses perawatan, dan bahasa profesional untuk menjelaskan penderitaan. Namun, ia juga dapat memindahkan perhatian dari konteks sosial menuju individu.

Dalam wacana korban, medikalisasi memperoleh fungsi legitimasi moral ketika penderitaan klinis atau psikologis digunakan untuk menegaskan keseriusan masalah. Istilah seperti "trauma", "depresi", "gangguan psikologis", "luka", "perawatan",

atau "pemulihan" tidak sekadar memberikan informasi tentang kondisi seseorang. Istilah tersebut juga dapat membuat kerugian menjadi lebih terukur, dapat dikenali oleh institusi, dan sulit diremehkan.

Ross et al. (2023) mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu medikalis dapat mengindividualisasi pengalaman kekerasan dan trauma. Mereka mendorong praktik yang memperhatikan kekuasaan, ketidakadilan, dan kondisi sosial, bukan hanya gejala individual. Kritik ini penting bagi Analisis Wacana Kritis karena bahasa medis dapat secara bersamaan mengakui penderitaan dan mengurangi visibilitas struktur yang menghasilkan penderitaan.

Furtado dan Auchter (2025) menunjukkan efek politik yang serupa pada wacana trauma. Mereka berargumen bahwa pemahaman psikiatrik tentang trauma dapat menghasilkan depolitisasi ketika trauma diposisikan sebagai krisis individual yang membutuhkan pengelolaan, sementara penyintas kehilangan posisi dalam proses politik. Dalam konteks wacana tanggung jawab, medikalisasi dengan demikian dapat memperkuat legitimasi moral tetapi menggeser pusat solusi menuju pemulihan individu.

Legitimasi moral yang dibangun melalui penderitaan memiliki kekuatan karena ia mengaktifkan nilai perlindungan, empati, dan kewajiban untuk tidak membiarkan kerugian berlanjut. Chouliaraki (2006) menunjukkan bahwa mediasi penderitaan mengatur hubungan antara pihak yang menderita dan pihak yang menyaksikan, termasuk bentuk kedekatan moral dan kemungkinan respons. Penderitaan menjadi bukan hanya fakta, tetapi juga dasar bagi tuntutan tindakan.

Model ini karena itu tidak menganggap medikalisasi korban sebagai kesalahan analitis atau jurnalistik. Yang diuji adalah fungsi diskursifnya. Apakah bahasa medis memperkuat pengakuan atas bahaya? Apakah ia membuka akses terhadap pemulihan? Ataukah ia membuat masalah terutama dibaca sebagai kerusakan individu dan mengurangi perhatian terhadap relasi kuasa serta tanggung jawab institusional? Pertanyaan tersebut menentukan bagaimana legitimasi moral berhubungan dengan mekanisme lain.

E. Penderitaan, Kerentanan, Perawatan, dan Pemulihan

Penderitaan merupakan salah satu dasar paling kuat untuk membentuk kewajiban moral. Ketika wacana menggambarkan seseorang sebagai terluka, takut, kehilangan, tertekan, atau membutuhkan perawatan, hubungan sosial antara korban dan pihak lain berubah. Ada peningkatan tuntutan agar sesuatu dilakukan. Namun, cara penderitaan direpresentasikan menentukan apakah korban dilihat sebagai subjek yang memiliki hak dan suara atau hanya sebagai objek belas kasih.

Chouliaraki (2006) menekankan bahwa media tidak hanya memperlihatkan penderitaan, tetapi membentuk tata moral untuk menilai penderitaan. Jarak, narasi, kategori korban, dan bentuk penjelasan menentukan bagaimana penyaksi dapat mengenali tanggung jawab. Penderitaan yang disertai penjelasan mengenai sebab dan struktur membuka kemungkinan respons yang berbeda dari penderitaan yang disajikan sebagai tragedi tanpa konteks.

Kerentanan juga perlu dibaca secara kritis. Label "rentan" dapat memperkuat kebutuhan perlindungan, tetapi dapat pula menghasilkan paternalistik ketika pihak terdampak terus diposisikan sebagai penerima tindakan. Dalam wacana medis, kerentanan sering dikaitkan dengan kebutuhan intervensi profesional. Ross et al. (2023) menekankan pentingnya pendekatan yang memberdayakan dan memperhatikan struktur kekuasaan agar perawatan tidak mengulang posisi subordinat.

Perawatan adalah bentuk respons yang sangat penting, tetapi dalam analisis tanggung jawab ia tidak boleh disamakan dengan penyelesaian seluruh masalah. Perawatan menjawab akibat yang telah dialami individu. Pertanyaan lain tetap terbuka: siapa yang mencegah pengulangan, siapa yang memperbaiki struktur, dan apakah institusi yang memiliki kewajiban perlindungan ikut berubah. Furtado dan Auchter (2025) menunjukkan bahwa fokus pada pengelolaan trauma dapat menutupi dimensi politik dan transformasional setelah kekerasan.

Pemulihan juga membawa makna normatif. Ketika teks menyatakan bahwa kondisi korban "membaik", alur berita dapat bergerak menuju penutupan. Secara faktual, informasi pemulihan penting. Secara diskursif, ia dapat menurunkan urgensi kasus jika tidak diikuti pembahasan mengenai tanggung jawab yang lebih luas. Karena itu, pemulihan korban dan penyelesaian sosial harus dibedakan.

Dalam model ini, penderitaan, kerentanan, perawatan, dan pemulihan membentuk satu rangkaian legitimasi moral. Rangkaian tersebut menunjukkan mengapa suatu masalah dianggap serius dan mengapa intervensi perlu dilakukan. Namun, legitimasi moral menjadi paling kuat secara kritis ketika

penderitaan tidak berhenti sebagai bukti individual, melainkan dihubungkan dengan hak, kewajiban perlindungan, dan kondisi sosial yang relevan.

F. Akuntabilitas Institusional-Protektif dan Legitimasi Administratif

Akuntabilitas institusional-protektif merujuk pada konstruksi ketika organisasi atau lembaga tampil mengambil tindakan untuk melindungi, menanggapi, menjelaskan, mengevaluasi, atau memulihkan keadaan. Respons semacam ini dapat berupa bantuan, pendampingan, klarifikasi, investigasi internal, mediasi, tindakan disiplin, atau perubahan prosedur. Dalam wacana, tindakan tersebut dapat membangun legitimasi administratif: institusi dipresentasikan sebagai aktor yang menjalankan kewenangan dan kewajibannya.

Legitimasi administratif berbeda dari legitimasi formal dalam titik tekan. Formalitas bertumpu pada sahnya aturan, prosedur, atau otoritas; legitimasi administratif bertumpu pada kapasitas institusi untuk bertindak dan mengelola masalah. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2022) menunjukkan bahwa legitimasi lembaga publik juga bergantung pada kualitas proses dan hasil, bukan hanya pada sumber kewenangan. Organisasi harus dapat menunjukkan bahwa mekanisme yang dimilikinya bekerja.

Suchman (1995) membedakan berbagai basis legitimasi organisasi, termasuk dimensi pragmatis, moral, dan kognitif. Dalam konteks respons, organisasi dapat berusaha mempertahankan legitimasi dengan menunjukkan bahwa tindakannya sesuai nilai, kepentingan pemangku kepentingan,

atau ekspektasi umum. Clarke et al. (2025) menunjukkan bahwa legitimasi dapat dibentuk melalui strategi diskursif internal bahkan pada praktik yang secara etis diperdebatkan, seperti kerahasiaan organisasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi institusional selalu perlu diuji, bukan diterima dari klaim organisasi itu sendiri.

Kajian komunikasi krisis memberi perangkat tambahan. Coombs (2007) menjelaskan bahwa atribusi tanggung jawab terhadap krisis memengaruhi strategi respons yang seharusnya digunakan organisasi. Coombs dan Tachkova (2023) memperluas kerangka tersebut dengan memasukkan kemarahan moral sebagai bagian penting dalam penilaian krisis. Organisasi bukan hanya merespons ancaman reputasi, tetapi juga ekspektasi moral yang muncul ketika publik menilai adanya pelanggaran.

Transparansi, kecepatan respons, dan strategi komunikasi bekerja dalam konfigurasi yang kompleks. He et al. (2026), misalnya, menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan faktor inti dalam beberapa konfigurasi pemulihan reputasi organisasi olahraga. Temuan tersebut tidak berarti transparansi selalu cukup, tetapi menunjukkan bahwa respons administratif perlu dipahami bersama faktor situasional dan tingkat tanggung jawab.

Dalam model analisis, legitimasi administratif tidak diukur dari keberadaan tindakan semata. Peneliti perlu membaca apakah tindakan tersebut mengakui masalah, mengalihkan tanggung jawab, memulihkan pihak terdampak, melindungi reputasi, atau mengubah struktur. Dengan cara itu, akuntabilitas institusional-protektif tidak disamakan dengan “institusi sudah bertindak”, tetapi dipahami sebagai arena tempat tanggung jawab dinegosiasikan melalui tindakan dan representasinya.

G. Pendampingan, Klarifikasi, Penyangkalan, Permintaan Maaf, dan Mediasi

Respons institusional memiliki bentuk yang beragam dan setiap bentuk membawa hubungan yang berbeda terhadap tanggung jawab. Pendampingan biasanya mengakui adanya kebutuhan perlindungan tanpa harus menetapkan kesalahan institusi. Klarifikasi menegaskan hak institusi untuk menjelaskan. Penyangkalan berusaha menolak hubungan antara organisasi dan tanggung jawab. Permintaan maaf dapat mengakui kerugian atau kesalahan, sedangkan mediasi menggeser persoalan menuju proses penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Benoit (1997) melalui teori *image repair* menunjukkan bahwa aktor yang menghadapi ancaman reputasi dapat menggunakan penyangkalan, penghindaran tanggung jawab, pengurangan tingkat ofensivitas, tindakan korektif, atau mortifikasi. Kerangka ini berguna untuk memahami bahwa klarifikasi dan permintaan maaf tidak selalu setara. Respons yang secara permukaan tampak kooperatif dapat memiliki fungsi berbeda dalam pengelolaan citra.

SCCT juga menekankan hubungan antara atribusi tanggung jawab dan strategi respons. Coombs (2007) menjelaskan bahwa semakin besar tanggung jawab yang dilekatkan pada organisasi, semakin besar kebutuhan terhadap strategi yang mengakomodasi korban dan memulihkan hubungan. Coombs dan Tachkova (2023) menambahkan bahwa kemarahan moral dapat memperkuat dinamika tersebut karena publik menilai tidak hanya kerugian, tetapi juga pelanggaran nilai.

Frederick et al. (2024), dalam kajian tentang *National Women's Soccer League*, menerapkan SCCT dan teori *image repair* untuk menganalisis respons organisasi terhadap krisis yang melibatkan isu serius. Kajian tersebut menunjukkan bahwa respons organisasi dapat dibaca sebagai rangkaian strategi yang berusaha menjawab atribusi tanggung jawab sekaligus memulihkan legitimasi. Dengan demikian, respons harus dianalisis dalam hubungan dengan tuntutan yang mendahuluinya.

Pendampingan dan mediasi juga dapat memiliki fungsi protektif yang nyata. Namun, secara diskursif, keduanya dapat menghasilkan penutupan apabila direpresentasikan sebagai bukti bahwa konflik telah selesai tanpa pembahasan mengenai sumber masalah. Permintaan maaf pun dapat memiliki beberapa tingkat: pengakuan atas dampak, pengakuan atas tindakan, pengakuan atas tanggung jawab, dan komitmen koreksi tidak selalu hadir bersamaan.

Karena itu, model ini membaca respons melalui tiga pertanyaan: apa yang diakui, apa yang ditolak, dan apa yang diubah. Pendampingan dapat mengakui kebutuhan korban; klarifikasi dapat mengakui fakta tertentu tetapi menolak label; penyangkalan dapat menahan atribusi; permintaan maaf dapat membuka legitimasi moral; dan mediasi dapat memindahkan masalah dari pertarungan definisi menuju penyelesaian. Relasi antarrespons lebih penting daripada daftar bentuknya.

H. Hubungan antara Legitimasi Formal, Moral, dan Administratif

Ketiga mekanisme legitimasi tidak bekerja sebagai jalur yang sepenuhnya terpisah. Legitimasi formal dapat memperkuat legitimasi moral ketika prosedur resmi mengakui penderitaan. Legitimasi moral dapat meningkatkan tekanan terhadap institusi agar bertindak. Respons administratif kemudian dapat memperoleh legitimasi formal melalui aturan dan legitimasi moral melalui tujuan perlindungan. Dalam praktik wacana, hubungan tersebut lebih menyerupai jaringan daripada urutan lurus.

Gagrčin (2026) menekankan bahwa tanggung jawab dan legitimasi terus dinegosiasikan menurut konteks. Kerangka ini mendukung gagasan bahwa satu sumber legitimasi tidak selalu cukup. Aktor dapat memiliki kewenangan formal tetapi tidak memperoleh pengakuan moral; sebaliknya, suatu tuntutan dapat sangat kuat secara moral tetapi belum memiliki forum formal untuk menegakkannya.

Steffek (2023) menunjukkan pentingnya melihat legitimasi melalui kepercayaan, diskursus, dan tindakan secara bersamaan. Perspektif tersebut membantu memahami mengapa legitimasi administratif tidak dapat diturunkan hanya dari prosedur. Institusi dapat mematuhi aturan tetapi tetap dianggap tidak responsif; dapat bertindak cepat tetapi dipertanyakan legalitasnya; atau dapat memperoleh simpati moral meskipun mekanisme administratifnya lemah.

De Fine Licht et al. (2022) menunjukkan bahwa justifikasi setelah keputusan juga dapat memengaruhi legitimasi empiris. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan formal dan administratif

memerlukan komunikasi untuk diterima. Dalam wacana, penjelasan menjadi jembatan yang menghubungkan prosedur, nilai, dan respons. Aktor tidak hanya perlu bertindak, tetapi sering harus menjelaskan mengapa tindakannya tepat.

Ketiga legitimasi juga dapat saling mengoreksi. Bahasa moral dapat mengungkap keterbatasan prosedur yang terlalu formalistik. Prosedur dapat mencegah tuntutan moral berubah menjadi penghukuman tanpa bukti. Respons administratif dapat menerjemahkan kedua basis tersebut ke dalam tindakan praktis. Karena itu, model tidak menganggap salah satu mekanisme secara inheren lebih tinggi daripada yang lain.

Hubungan antarmekanisme menjadi objek penting penelitian komparatif. Pada suatu isu, legitimasi formal mungkin dominan; pada isu lain, legitimasi moral lebih menentukan; pada krisis organisasi, legitimasi administratif dapat menjadi pusat. Justru variasi konfigurasi inilah yang membuat model dapat direplikasi. Penelitian selanjutnya dapat menguji apakah tiga mekanisme ini cukup atau memerlukan basis legitimasi lain seperti ilmiah, religius, politik, ekonomis, atau komunal.

I. Tumpang Tindih Mekanisme Legitimasi dalam Satu Wacana

Satu teks dapat mengandung lebih dari satu mekanisme legitimasi. Sebuah berita dapat membuka dengan laporan polisi, kemudian menggambarkan trauma korban, dan menutup dengan pernyataan institusi tentang pendampingan. Mengelompokkan teks seperti itu ke satu kategori tunggal akan menghilangkan dinamika yang justru penting. Karena itu, model ini memandang legitimasi sebagai mekanisme yang dapat tumpang tindih.

Tumpang tindih juga dapat terjadi pada satu ekspresi. Pernyataan bahwa "pemerintah memberikan pendampingan sesuai prosedur" menggabungkan tindakan administratif dengan legitimasi formal. Pernyataan bahwa "korban harus dipulihkan karena mengalami trauma berat" menggabungkan rasionalisasi tindakan dengan legitimasi moral. Analisis perlu mengenali fungsi ganda semacam ini.

Kajian komunikasi krisis mendukung pembacaan konfiguratif. Cheng et al. (2022), melalui evaluasi terhadap penelitian komunikasi krisis bermediasi sosial, menunjukkan bahwa lingkungan digital mempertemukan organisasi, media, dan publik dalam proses yang lebih kompleks daripada model komunikasi satu arah. Strategi respons berinteraksi dengan jenis krisis, *platform*, emosi, dan perilaku pemangku kepentingan.

He et al. (2026) juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi krisis dapat muncul melalui beberapa kombinasi kondisi, bukan satu faktor tunggal. Walaupun objeknya organisasi olahraga, logika konfiguratifnya relevan bagi model legitimasi: transparansi, strategi respons, kecepatan, tingkat keparahan, dan reputasi bekerja bersama. Dengan demikian, legitimasi administratif tidak dapat dianalisis secara terisolasi.

Tumpang tindih tidak berarti seluruh mekanisme selalu sama kuat. Peneliti dapat mengidentifikasi mekanisme dominan dan mekanisme pendukung, tetapi penetapannya harus berdasarkan pola teks, bukan kuota yang dipaksakan. Dominasi dapat terlihat dari judul, lead, jumlah ruang, hierarki sumber, urutan informasi, dan fungsi penutup. Mekanisme pendukung mungkin hadir untuk menguatkan dasar legitimasi utama.

Pendekatan non-eksklusif ini penting agar model tetap sensitif terhadap kompleksitas. Kategori analitis seharusnya membantu membaca hubungan, bukan memaksa wacana ke kotak yang tertutup. Karena itu, pada penelitian replikasi, peneliti dapat menggunakan tiga mekanisme sebagai pertanyaan awal: dasar formal apa yang digunakan, dasar moral apa yang ditampilkan, dan respons administratif apa yang dibangun. Hasil akhirnya boleh menunjukkan konfigurasi yang tidak seimbang atau bahkan menemukan mekanisme baru.

J. Dari Tiga Mekanisme Menuju Formasi Akuntabilitas

Ketika legitimasi formal, moral, dan administratif muncul secara berulang dan saling berhubungan, analisis dapat bergerak dari identifikasi mekanisme menuju pembacaan formasi akuntabilitas. Istilah "formasi" digunakan untuk menekankan bahwa pola tidak harus linear dan tidak harus identik pada setiap teks. Yang dicari adalah hubungan yang relatif stabil antara definisi masalah, sumber legitimasi, atribusi tanggung jawab, dan bentuk respons.

Formasi akuntabilitas terbentuk ketika wacana mengorganisasikan tiga pertanyaan secara bersamaan: mengapa masalah dianggap sah untuk ditangani, mengapa pihak tertentu dianggap layak atau wajib bertindak, dan tindakan apa yang dipresentasikan sebagai jawaban. Legitimasi formal menjawab sebagian melalui prosedur dan otoritas; legitimasi moral melalui nilai dan penderitaan; legitimasi administratif melalui kapasitas institusional.

Gagrčin (2026) menyediakan prinsip penting bahwa tanggung jawab dan legitimasi merupakan penilaian yang bersifat situasional. Konsekuensinya, formasi akuntabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai hukum universal. Ia merupakan konfigurasi yang dapat berubah menurut arena, isu, aktor, dan norma. Apa yang dianggap respons sah di satu domain belum tentu memperoleh pengakuan yang sama di domain lain.

Li et al. (2026) menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas dalam krisis dapat terbentuk melalui kombinasi kondisi dan tidak selalu mengikuti satu jalur kausal. Meskipun penelitian mereka berada dalam konteks administrasi publik di Tiongkok, temuan mengenai konfigurasi memperkuat perlunya membaca akuntabilitas sebagai hasil hubungan antarfaktor, bukan sebagai akibat satu tindakan tunggal.

Kerangka tiga mekanisme dalam buku ini karena itu berfungsi sebagai jembatan antara Analisis Wacana Kritis dan model yang lebih replikatif. Analisis bahasa menemukan representasi, agensi, sumber, dan struktur; atribusi menghubungkan aktor dengan kewajiban; mekanisme legitimasi menjelaskan mengapa hubungan tersebut diakui; dan formasi akuntabilitas menunjukkan pola yang muncul ketika berbagai mekanisme bekerja bersama.

Bab ini tidak menetapkan bahwa setiap wacana harus memiliki tiga legitimasi. Justru ruang pengembangan model terletak pada kemungkinan falsifikasi dan perluasan. Penelitian baru dapat menemukan bahwa legitimasi formal sangat lemah, legitimasi moral tidak muncul, atau legitimasi administratif digantikan oleh legitimasi komunitarian, ilmiah, religius, atau ekonomis. Dengan demikian, tiga mekanisme diposisikan sebagai

hasil konseptual awal yang terbuka terhadap pengujian, bukan sebagai batas akhir teori.

BAB 5
FORMASI DISKURSIF TANGGUNG JAWAB

Bab ini mengembangkan konsep *akuntabilitas pascainsiden* sebagai salah satu formasi khusus dalam konstruksi tanggung jawab. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai nama universal bagi keseluruhan model, melainkan sebagai konsep yang menjelaskan konfigurasi wacana ketika suatu peristiwa telah memperoleh visibilitas publik dan tanggung jawab kemudian dinegosiasikan melalui atribusi aktor, mekanisme legitimasi, serta representasi respons. Penempatan ini penting agar model *Membaca Tanggung Jawab dalam Wacana* tetap dapat diterapkan pada wacana yang tidak berangkat dari insiden, sedangkan akuntabilitas pascainsiden dipertahankan sebagai pola yang dapat diuji pada konteks yang memang memiliki peristiwa pemicu (Bovens, 2007; Gagrčin, 2026; Ji et al., 2025).

A. Pengertian Akuntabilitas Pascainsiden

Istilah *akuntabilitas pascainsiden* dalam buku ini merupakan konstruksi konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bentuk keterjawaban yang menguat setelah suatu peristiwa memperoleh status sebagai persoalan yang menuntut respons. Unsur "pasca" tidak dipahami secara mekanis sebagai sekadar waktu sesudah kejadian, melainkan sebagai perubahan kondisi diskursif: aktor mulai dituntut menjelaskan, otoritas mulai memberi status,

penderitaan memperoleh pengakuan, dan institusi mulai merepresentasikan tindakan korektif atau protektif. Dengan demikian, konsep ini mengacu pada konfigurasi tanggung jawab yang aktif ketika sebuah peristiwa telah menjadi objek penilaian sosial.

Konsep akuntabilitas menyediakan fondasi bagi pembacaan tersebut. Bovens (2007) memandang akuntabilitas sebagai relasi ketika seorang aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada suatu forum yang dapat mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian, dan menghasilkan konsekuensi. Definisi ini menunjukkan bahwa keterjawaban membutuhkan lebih dari sekadar identifikasi kesalahan. Harus ada aktor, klaim atau tindakan yang dipersoalkan, forum atau arena penilaian, serta kemungkinan respons.

Kajian mutakhir memperluas persoalan akuntabilitas dengan menekankan bahwa tanggung jawab tidak selalu terpusat pada satu aktor. Ji et al. (2025), melalui tinjauan sistematis atas 133 studi komunikasi krisis berbasis teori atribusi, mendorong pendekatan multiaktor dan pembedaan antara tanggung jawab atas penyebab dengan tanggung jawab atas penanganan. Temuan ini sangat relevan bagi konsep akuntabilitas pascainsiden karena suatu institusi dapat memiliki kewajiban merespons meskipun belum diposisikan sebagai penyebab langsung.

Gagrčin (2026) juga membedakan tanggung jawab sebagai sisi kewajiban—siapa yang seharusnya bertindak—dan legitimasi sebagai sisi pengakuan—siapa yang dianggap boleh atau layak bertindak dengan otoritas. Pembedaan ini membantu menjelaskan bahwa keterjawaban pascainsiden tidak cukup diidentifikasi melalui pertanyaan siapa yang disalahkan. Analisis

juga harus menanyakan siapa yang memperoleh legitimasi untuk menyelidiki, melindungi, menjelaskan, mengoreksi, atau menetapkan penyelesaian.

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis, konsep "formasi" digunakan untuk menunjukkan pola relasional yang terbentuk melalui hubungan antarelemen wacana. Istilah ini memiliki jejak teoretis pada gagasan Foucault (1972) mengenai formasi diskursif sebagai keteraturan dalam hubungan antara objek, pernyataan, konsep, dan posisi subjek. Buku ini tidak menggunakan pengertian Foucauldian secara penuh, tetapi mengambil prinsip bahwa pola wacana harus dibaca sebagai relasi yang berulang, bukan sebagai daftar kata yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, akuntabilitas pascainsiden dapat dirumuskan sebagai formasi diskursif ketika tanggung jawab atas suatu peristiwa menjadi lebih terlihat dan dinegosiasikan melalui hubungan antara representasi masalah, distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi tindakan, dan respons institusional setelah peristiwa memperoleh visibilitas publik. Definisi ini bersifat analitis dan terbuka terhadap pengujian pada berbagai konteks.

B. Syarat Diskursif Munculnya Akuntabilitas Pascainsiden

Akuntabilitas pascainsiden tidak muncul hanya karena suatu kejadian telah berlangsung. Sebuah peristiwa dapat selesai secara lokal tanpa berkembang menjadi arena keterjawaban publik. Karena itu, konsep ini membutuhkan sejumlah syarat diskursif. Syarat pertama adalah adanya peristiwa atau kondisi yang dapat

diproblematisasi. Artinya, wacana harus membentuk sesuatu sebagai masalah yang layak dinilai, bukan hanya sebagai kejadian netral.

Syarat kedua adalah keterlihatan aktor dan relasi tanggung jawab. Setidaknya harus terdapat aktor yang diposisikan sebagai terdampak, penyebab, pemegang kewenangan, pemberi penjelasan, atau pelaksana respons. Ji et al. (2025) menunjukkan bahwa atribusi tanggung jawab dalam komunikasi krisis sebaiknya dipahami secara multiaktor karena aktor penyebab dan aktor penanganan dapat berbeda. Tanpa pemetaan ini, tanggung jawab akan sulit dibaca sebagai relasi.

Syarat ketiga adalah visibilitas atau aksesibilitas publik. Friemel dan Neuberger (2023) mendefinisikan komunikasi sebagai publik ketika suatu konten secara potensial dapat menjadi objek tindakan komunikatif aktor lain di luar pihak yang sejak awal ditentukan. Perspektif jaringan ini membantu menjelaskan bahwa "menjadi publik" tidak harus berarti seluruh masyarakat mengetahui sebuah kasus; yang penting adalah terbukanya konten terhadap produksi, penerimaan, kurasi, dan respons dari aktor yang lebih luas.

Syarat keempat adalah munculnya tuntutan normatif. Gagrčin (2026) menunjukkan bahwa penilaian tanggung jawab dibentuk oleh pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertindak dan siapa yang dianggap memiliki legitimasi untuk melakukannya. Dalam wacana pascainsiden, tuntutan semacam ini dapat muncul melalui pertanyaan publik, laporan, desakan, kritik, penjelasan media, atau respons institusi itu sendiri.

Syarat kelima adalah adanya respons atau sekurang-kurangnya ekspektasi terhadap respons. Akuntabilitas tidak harus selalu berujung pada tindakan yang efektif, tetapi formasi tersebut mengandaikan adanya sesuatu yang dianggap perlu dilakukan: investigasi, klarifikasi, perlindungan, permintaan maaf, evaluasi, pemulihan, atau perubahan. Yan dan Ramesh (2026) mengingatkan bahwa akuntabilitas kebijakan yang substantif membutuhkan bukan hanya kepatuhan prosedural, tetapi juga justifikasi pilihan dan penerimaan tanggung jawab atas hasil.

Kelima syarat tersebut tidak bekerja secara linear dan tidak semuanya harus memiliki kekuatan yang sama. Peristiwa dapat menjadi sangat terlihat tetapi tanpa mekanisme formal; institusi dapat merespons sebelum visibilitas meluas; atau tuntutan moral dapat muncul lebih dahulu daripada atribusi hukum. Karena itu, syarat diskursif diperlakukan sebagai komponen yang memungkinkan terbentuknya formasi, bukan sebagai langkah prosedural yang harus terjadi dalam urutan tetap.

C. Visibilitas Publik sebagai Titik Aktivasi

Visibilitas publik merupakan salah satu unsur paling penting dalam akuntabilitas pascainsiden karena keterlihatan mengubah medan tindakan. Fu dan Cooper (2022) mendefinisikan visibilitas komunikasi sebagai kondisi ketika komunikasi dibuat tersedia dan menonjol bagi pihak lain. Mereka menunjukkan bahwa visibilitas dapat menjadi sumber daya untuk memperoleh perhatian dan pengaruh, tetapi juga menghasilkan pengawasan, kritik, serta tekanan. Dengan demikian, visibilitas membuka peluang sekaligus risiko.

Dalam konsep akuntabilitas pascainsiden, visibilitas dipahami sebagai "titik aktivasi" bukan karena ia selalu menyebabkan respons, tetapi karena keterlihatan membuat tuntutan terhadap aktor lebih mungkin disirkulasikan dan diuji oleh pihak lain. Ketika sebuah kasus menjadi dapat diamati, definisi atas peristiwa tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh aktor lokal. Media, publik digital, organisasi masyarakat sipil, pakar, atau lembaga pemerintah dapat masuk ke dalam jaringan interpretasi.

Jungherr (2023) menjelaskan bahwa arena publik bergantung pada struktur media yang memungkinkan masyarakat melihat dirinya sendiri, memperdebatkan persoalan bersama, dan mengawasi elite serta pemerintah. Pandangan ini membantu memahami mengapa visibilitas dapat berhubungan dengan akuntabilitas: keterlihatan memungkinkan tindakan atau kegagalan menjadi objek penilaian. Akan tetapi, keterlihatan bukan bukti bahwa penilaian tersebut seragam atau adil.

Friemel dan Neuberger (2023) menambahkan dimensi dinamika jaringan. Konten dapat berpindah melalui produksi, penerimaan, dan kurasi, serta mengalami penerjemahan dan transformasi selama sirkulasi. Sebuah insiden dapat pertama kali muncul dalam unggahan lokal, kemudian diberitakan media, dikomentari pejabat, dan kembali beredar sebagai konten baru. Setiap perpindahan mengubah posisi aktor dan makna yang tersedia.

Baden et al. (2025) menunjukkan bahwa opini publik dalam ekosistem media digital dapat dipahami sebagai proses negosiasi diskursif mengenai rentang posisi yang dianggap dapat diterima. Perspektif ini penting karena memungkinkan penggunaan istilah "orientasi makna publik" tanpa mengklaim bahwa seluruh

khalayak benar-benar memiliki sikap yang sama. Visibilitas membuka arena negosiasi, bukan menghasilkan konsensus otomatis.

Oleh sebab itu, titik aktivasi harus dipahami secara relasional. Yang dianalisis bukan sekadar jumlah tayangan, viralitas, atau banyaknya berita, tetapi perubahan struktur keterjawaban: siapa mulai berbicara, siapa mulai dituntut menjelaskan, sumber legitimasi apa yang muncul, dan tindakan apa yang mulai dinormalisasi. Visibilitas bermakna bagi model ketika ia mengubah relasi tanggung jawab.

D. Konvergensi Legitimasi Formal, Moral, dan Administratif

Akuntabilitas pascainsiden menjadi lebih kuat ketika berbagai mekanisme legitimasi bertemu. Legitimasi formal memberikan dasar melalui hukum, prosedur, dan otoritas; legitimasi moral memberikan dasar melalui penderitaan, hak, nilai, serta penilaian mengenai benar dan salah; sedangkan legitimasi administratif menunjukkan kapasitas institusi untuk merespons, melindungi, mengevaluasi, atau memperbaiki. Ketiganya dapat memperkuat satu sama lain, tetapi tidak harus selalu hadir bersamaan.

Van Leeuwen (2007) menunjukkan bahwa legitimasi dapat dibangun melalui otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan narasi. Kerangka tersebut menjelaskan mengapa satu tindakan dapat memiliki beberapa dasar pembenaran. Investigasi, misalnya, dapat dilegitimasi karena diwajibkan aturan, karena diperlukan untuk melindungi korban, dan karena dianggap sebagai langkah rasional untuk menemukan fakta. Satu respons

dengan demikian dapat mengandung legitimasi formal, moral, dan administratif sekaligus.

Suchman (1995) menempatkan legitimasi sebagai persepsi bahwa tindakan suatu entitas sesuai dengan sistem norma, nilai, dan keyakinan yang dibangun secara sosial. Dalam situasi pascainsiden, legitimasi institusi dapat terganggu ketika tindakan atau kegagalannya menjadi sorotan. Respons institusional kemudian tidak hanya berfungsi mengatasi masalah, tetapi juga mengembalikan kesesuaian antara organisasi dan ekspektasi sosial.

Steffek (2023) mengingatkan bahwa legitimasi dapat ditelusuri melalui kepercayaan, diskursus, dan tindakan institusi, dan ketiganya tidak selalu bergerak searah. Sebuah institusi dapat memiliki dasar legal tetapi tetap kehilangan kepercayaan; dapat melakukan tindakan korektif tetapi gagal menjelaskannya; atau dapat memperoleh dukungan moral tanpa prosedur yang kuat. Konvergensi karena itu perlu dibaca sebagai hubungan empiris, bukan sebagai asumsi.

Coombs dan Tachkova (2023) menambahkan bahwa kemarahan moral merupakan komponen penting dalam komunikasi krisis. Penilaian terhadap krisis tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menyebabkan kerugian, tetapi juga dengan pelanggaran nilai yang dipersepsikan. Hal tersebut menjelaskan mengapa respons administratif tertentu dapat dianggap tidak memadai walaupun secara prosedural sudah dilakukan: publik dapat menuntut pengakuan moral, bukan sekadar prosedur.

Konvergensi tiga legitimasi dalam model ini karena itu merupakan konfigurasi, bukan rumus. Analisis perlu menilai mekanisme mana yang dominan, mana yang mendukung, mana

yang berkonflik, serta apa yang tidak hadir. Justru ketidakseimbangan di antara sumber legitimasi dapat menjadi temuan penting dalam membaca formasi tanggung jawab.

E. Perubahan Posisi Aktor setelah Insiden Menjadi Publik

Ketika sebuah insiden memasuki arena publik, posisi aktor dapat berubah. Korban yang sebelumnya hanya merupakan pihak terdampak dapat menjadi pusat legitimasi moral; keluarga dapat menjadi pengadvokasi; media dapat menjadi penghubung dan penuntut penjelasan; institusi dapat berubah dari lokasi atau latar peristiwa menjadi aktor yang harus memberikan respons; sedangkan negara dapat masuk sebagai otoritas formal. Perubahan ini memperlihatkan bahwa posisi aktor bersifat dinamis.

Friemel dan Neuberger (2023) menunjukkan bahwa aktor dalam ruang publik dapat berganti peran sebagai produsen, penerima, kurator, atau pihak yang relatif terisolasi. Setiap tindakan komunikatif mengubah kondisi bagi tindakan berikutnya. Dalam konteks pascainsiden, unggahan korban dapat menjadi bahan berita, berita dapat mendorong pernyataan pejabat, dan pernyataan pejabat dapat memunculkan kritik baru. Struktur aktor berkembang seiring sirkulasi wacana.

Gagrčin (2026) menambahkan bahwa penilaian tanggung jawab dan legitimasi bersifat kontekstual. Aktor yang dianggap tepat untuk bertindak pada satu tahap belum tentu menjadi aktor utama pada tahap lain. Pada awal kasus, keluarga mungkin menjadi sumber tuntutan; setelah proses formal dimulai, aparat memperoleh legitimasi lebih besar; ketika kebutuhan pemulihan

menguat, profesional atau lembaga perlindungan dapat menjadi aktor penting.

Saurwein et al. (2025), melalui analisis jaringan tanggung jawab dalam wacana otomasi, menunjukkan bahwa tanggung jawab dapat dipetakan dengan melihat siapa yang berbicara, siapa yang menuntut siapa, dan objek tanggung jawab apa yang dipersoalkan. Perspektif ini relevan untuk membaca perubahan posisi aktor karena visibilitas baru dapat mengubah siapa yang menjadi penuntut dan siapa yang menjadi subjek pertanggungjawaban.

Perubahan posisi juga dapat bersifat strategis. Institusi yang semula direpresentasikan sebagai pihak yang dipersoalkan dapat berusaha berpindah menjadi aktor penyelesai melalui tindakan bantuan, klarifikasi, atau evaluasi. Pergeseran tersebut tidak otomatis menghapus atribusi sebelumnya. Justru Analisis Wacana Kritis perlu melihat bagaimana perpindahan posisi itu dibangun dan apakah ia mengubah distribusi tanggung jawab.

Dengan demikian, "setelah menjadi publik" tidak hanya berarti bertambahnya perhatian. Yang lebih penting adalah restrukturisasi relasi. Aktor memperoleh atau kehilangan suara, otoritas, agensi, dan kewajiban. Formasi akuntabilitas pascainsiden dapat dikenali ketika perubahan posisi tersebut membentuk jaringan keterjawaban yang lebih jelas daripada sebelum peristiwa memperoleh visibilitas.

F. Representasi Kasus sebagai 'Sedang Ditangani'

Frasa seperti “sedang ditangani”, “masih diproses”, “telah ditindaklanjuti”, atau “dalam evaluasi” memiliki fungsi penting dalam wacana pascainsiden. Secara informasional, frasa tersebut memberi perkembangan mengenai respons. Secara diskursif, ia dapat menempatkan institusi sebagai aktor aktif dan menghasilkan orientasi bahwa mekanisme yang semestinya sedang bekerja. Representasi ini dapat memberikan kepastian sementara kepada publik sekaligus membatasi tuntutan yang dianggap masih relevan.

Kajian komunikasi krisis menunjukkan bahwa organisasi berusaha mengelola bukan hanya fakta, tetapi juga persepsi mengenai kemampuannya merespons. Gyamfi dan Tella (2024), dalam kajian komunikasi krisis finansial, menemukan penggunaan strategi seperti justifikasi, diferensiasi, pengalihan kesalahan, tindakan korektif, dan penonjolan niat baik. Strategi tersebut menunjukkan bahwa “penanganan” selalu memiliki dimensi representasional: institusi menjelaskan apa yang dilakukan sekaligus membingkai makna tindakan tersebut.

Fu dan Yang (2025) menunjukkan bahwa komunikasi dialogis pada masa krisis secara umum dapat membantu pemulihan reputasi, meskipun efektivitasnya bergantung pada jenis krisis. Temuan ini mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap dialog dapat menjadi bagian dari representasi institusi sebagai aktor yang responsif. Namun, komunikasi dialogis tidak identik dengan penyelesaian substantif; ia tetap merupakan satu dimensi dari respons.

He et al. (2026) menemukan bahwa pemulihan reputasi dan penahanan perhatian publik dapat dicapai melalui beberapa konfigurasi kondisi, dengan transparansi informasi sering menjadi unsur inti. Temuan ini berguna untuk memahami bahwa narasi "sedang ditangani" akan memperoleh bobot berbeda bergantung pada transparansi, kecepatan, strategi respons, tingkat keparahan kasus, dan riwayat institusi.

Zhang et al. (2026) juga menunjukkan bahwa tindakan korektif merupakan unsur penting dalam berbagai jenis krisis pada industri yang mereka teliti dan bahwa strategi linguistik berkontribusi terhadap perbaikan kepercayaan serta mitigasi atribusi tanggung jawab. Ini memperlihatkan bahwa representasi respons dapat sekaligus mengelola masalah dan mengelola posisi moral institusi.

Karena itu, model tidak menganggap frasa "sedang ditangani" sebagai bukti bahwa tanggung jawab telah dipenuhi. Analisis perlu menanyakan apa yang sebenarnya sedang ditangani, siapa yang menangani, standar apa yang digunakan, apakah pihak terdampak memperoleh pemulihan, dan apakah penyebab struktural ikut diperiksa. Perbedaan antara representasi penanganan dan penyelesaian substantif merupakan batas penting dalam pembacaan wacana.

G. Orientasi Makna Publik dan Normalisasi Respons

Wacana pascainsiden tidak hanya mengatur posisi aktor, tetapi juga menyediakan orientasi tentang apa yang dianggap sebagai respons yang wajar. Ketika suatu bentuk respons terus diulang—misalnya investigasi, klarifikasi, pendampingan, sanksi, atau

permintaan maaf respons tersebut dapat memperoleh normalitas diskursif. Normalisasi di sini tidak berarti seluruh publik setuju, melainkan bahwa suatu tindakan menjadi semakin tersedia sebagai cara umum untuk membayangkan penyelesaian.

Baden et al. (2025) menawarkan kerangka yang relevan dengan melihat opini publik sebagai proses negosiasi diskursif mengenai rentang posisi yang secara normatif dapat diterima dalam arena digital. Perspektif ini membantu membatasi klaim Analisis Wacana Kritis: teks dapat menunjukkan posisi dan respons yang dibuat tersedia atau dominan dalam diskursus, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh khalayak telah menerima posisi tersebut.

Ji et al. (2025) menekankan pentingnya atribusi "treatment responsibility", yakni siapa yang dipandang bertanggung jawab untuk menangani akibat atau penyelesaian krisis. Konsep ini menjembatani atribusi sebab dengan normalisasi respons. Wacana dapat menyalahkan individu tertentu sebagai penyebab tetapi tetap menuntut institusi atau negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penanganan.

Corral de Zubielqui dan Harris (2024) memberikan contoh empiris mengenai ketegangan antara legalitas dan evaluasi moral. Dalam kasus program JobKeeper di Australia, perilaku organisasi yang secara legal dapat dibenarkan tetap memperoleh tekanan publik dan media karena dipersepsikan secara etis bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa respons yang "sah" secara formal belum tentu menjadi respons yang dianggap "patut" secara moral.

Coombs dan Tachkova (2023) menempatkan kemarahan moral sebagai unsur dalam penilaian krisis. Hal ini menjelaskan mengapa normalisasi respons tidak dapat hanya bergantung pada efektivitas administratif. Ketika publik menilai adanya pelanggaran nilai, tindakan yang tidak mengakui dimensi moral dapat tetap dianggap kurang memadai meskipun prosedur telah dijalankan.

Dalam model ini, orientasi makna publik dibaca melalui keteraturan diskursif: respons apa yang terus diposisikan sebagai logis, aktor mana yang dianggap wajib melaksanakannya, serta solusi apa yang jarang dibicarakan. Dengan cara ini, konsep normalisasi digunakan untuk membaca horizon penyelesaian yang dibangun wacana, bukan untuk mengklaim keseragaman opini masyarakat.

H. Akuntabilitas Pascainsiden dan Pemulihan Legitimasi Institusi

Salah satu dinamika yang sering menyertai akuntabilitas pascainsiden adalah upaya institusi memulihkan legitimasi. Insiden yang memperoleh visibilitas dapat menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi sosial dan citra institusi sebagai organisasi yang kompeten, aman, etis, atau bertanggung jawab. Respons kemudian memiliki dua fungsi yang dapat berimpit: menangani dampak dan memperbaiki hubungan legitimasi dengan pemangku kepentingan.

Suchman (1995) menjelaskan bahwa legitimasi organisasi bergantung pada kesesuaian yang dipersepsikan antara tindakan organisasi dan norma sosial. Ketika kesesuaian tersebut terganggu, organisasi dapat berusaha memperbaikinya melalui

perubahan substantif, penjelasan, atau pengelolaan persepsi. Dalam wacana pascainsiden, strategi semacam ini dapat terlihat pada permintaan maaf, tindakan korektif, evaluasi internal, atau pemberian informasi.

Fu dan Yang (2025) menunjukkan bahwa strategi komunikasi dialogis dapat memperkuat reputasi organisasi dalam krisis melalui mekanisme yang antara lain berkaitan dengan empati pemangku kepentingan, walaupun pengaruhnya bergantung pada tipe krisis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan legitimasi bukan hanya persoalan isi pesan, tetapi juga bentuk hubungan komunikasi yang dibangun institusi.

He et al. (2026) menunjukkan bahwa pemulihan reputasi memiliki banyak jalur konfiguratif dan bahwa transparansi informasi merupakan faktor penting. Sementara itu, Zhang et al. (2026) menemukan bahwa tindakan korektif dan realisasi linguistik tertentu berkontribusi pada perbaikan kepercayaan. Kedua kajian tersebut menegaskan bahwa legitimasi pascakrisis dibentuk melalui kombinasi tindakan, transparansi, dan bahasa.

Namun, pemulihan legitimasi institusi tidak boleh disamakan dengan pemulihan korban atau penyelesaian masalah. Institusi dapat berhasil memperbaiki reputasi tanpa sepenuhnya memperbaiki kondisi struktural. Sebaliknya, institusi dapat melakukan pembenahan substantif tetapi tetap menghadapi keraguan publik. Karena itu, Analisis Wacana Kritis perlu memisahkan "legitimasi institusi" dari "keadilan hasil" dan "efektivitas perbaikan".

Akuntabilitas pascainsiden menjadi analitis ketika peneliti dapat menunjukkan bagaimana respons institusional bernegosiasi dengan atribusi tanggung jawab. Apakah institusi

menerima, menahan, atau mengalihkan tanggung jawab? Apakah tindakan korektif menyentuh penyebab atau hanya akibat? Apakah pemulihan legitimasi dicapai melalui perubahan atau terutama melalui komunikasi? Pertanyaan tersebut menjaga pembacaan tidak berhenti pada reputasi.

I. Akuntabilitas Pascainsiden sebagai Formasi, Bukan Tahapan Linear

Akuntabilitas pascainsiden tidak dirancang sebagai model tahapan yang selalu bergerak dari insiden menuju visibilitas, lalu atribusi, legitimasi, respons, dan penutupan. Urutan semacam itu mungkin muncul pada beberapa kasus, tetapi akan terlalu kaku sebagai kerangka analisis umum. Realitas diskursif dapat bergerak maju-mundur: respons institusi dapat muncul sebelum kasus viral, atribusi dapat berubah setelah bukti baru, dan legitimasi formal dapat datang lebih lambat daripada legitimasi moral.

Konsep formasi menekankan relasi dan keteraturan. Foucault (1972) menggunakan gagasan formasi diskursif untuk membaca aturan hubungan yang memungkinkan objek, konsep, posisi, dan pernyataan tertentu terbentuk. Dalam kerangka buku ini, prinsip tersebut diterjemahkan secara lebih operasional: yang dicari adalah konfigurasi berulang antara aktor, atribusi, legitimasi, dan respons, bukan urutan kronologis yang wajib.

Fairclough (1992, 2003) juga menempatkan wacana dalam hubungan dialektis dengan praktik sosial. Teks tidak hanya merekam tindakan institusional setelah insiden, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan makna mengenai apa yang dianggap bertanggung jawab. Karena itu, satu peristiwa dapat

menghasilkan beberapa konfigurasi wacana yang bersaing pada waktu yang sama.

Friemel dan Neuberger (2023) menunjukkan bahwa ruang publik digital bersifat dinamis karena setiap tindakan komunikasi mengubah kondisi bagi tindakan berikutnya. Perspektif jaringan ini membuat model linear semakin kurang memadai. Konten dapat didaur ulang, ditafsirkan kembali, dan dipindahkan ke arena lain. Aktor yang sebelumnya pasif dapat menjadi produsen wacana, dan klaim lama dapat memperoleh makna baru.

Kajian empiris kontemporer juga mendukung pembacaan konfiguratif. He et al. (2026) menemukan beberapa jalur berbeda menuju efektivitas respons krisis, sedangkan Ji et al. (2025) menunjukkan keragaman teori, level analisis, dan bentuk atribusi dalam komunikasi krisis. Akuntabilitas dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai kombinasi hubungan daripada sebagai proses satu jalur.

Konsekuensi metodologisnya adalah peneliti tidak perlu memaksakan setiap data ke fase tertentu. Peneliti dapat memetakan hubungan: bentuk visibilitas, posisi aktor, atribusi sebab dan penanganan, sumber legitimasi, jenis respons, serta struktur yang dihadirkan atau diabaikan. Formasi muncul dari pola hubungan tersebut, bukan dari kepatuhan data terhadap urutan teoretis.

J. Batas Konseptual Akuntabilitas Pascainsiden

Konsep akuntabilitas pascainsiden memiliki batas yang perlu dinyatakan secara eksplisit. Pertama, konsep ini hanya relevan ketika terdapat peristiwa, kegagalan, krisis, kontroversi, atau

kondisi pemicu yang dapat dibaca sebagai "insiden" secara analitis. Ia tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluruh konstruksi tanggung jawab. Wacana preventif, debat kebijakan sebelum masalah terjadi, atau diskursus tentang risiko masa depan dapat dianalisis dengan model tanggung jawab yang lebih luas tanpa menggunakan kategori pascainsiden.

Kedua, visibilitas publik tidak boleh diperlakukan sebagai sebab tunggal munculnya respons. Fu dan Cooper (2022) menunjukkan bahwa visibilitas memiliki konsekuensi yang paradoksal, sedangkan Friemel dan Neuberger (2023) memperlihatkan bahwa sirkulasi publik dibentuk oleh jaringan tindakan komunikasi. Karena itu, hubungan antara keterlihatan dan tindakan institusional harus ditafsirkan sebagai hubungan diskursif atau temporal kecuali penelitian memiliki desain yang memang dapat membuktikan kausalitas.

Ketiga, analisis teks tidak membuktikan keadaan psikologis opini publik. Baden et al. (2025) menyediakan dasar untuk membaca opini publik sebagai negosiasi diskursif, tetapi persepsi khalayak tetap membutuhkan data khalayak apabila penelitian ingin mengukur penerimaan, perubahan sikap, atau efek. Dalam buku ini, istilah "orientasi makna publik" digunakan untuk menunjuk struktur interpretasi yang tersedia dalam wacana, bukan sikap faktual seluruh masyarakat.

Keempat, "kasus sedang ditangani" tidak sama dengan akuntabilitas yang efektif. Yan dan Ramesh (2026) menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas dapat terlalu terfokus pada kepatuhan prosedural dan gagal menilai kualitas pilihan serta hasil kebijakan. Dengan demikian, representasi respons harus dipisahkan dari evaluasi atas efektivitas, keadilan, atau keberlanjutan respons tersebut.

Kelima, tiga mekanisme legitimasi formal, moral, dan administratif bukan daftar universal. Gagrčin (2026) menegaskan bahwa tanggung jawab dan legitimasi bersifat situasional. Penelitian lain dapat menemukan legitimasi ilmiah, ekonomi, religius, politik, profesional, atau komunal. Tiga mekanisme yang dibahas pada bab sebelumnya harus diperlakukan sebagai konfigurasi awal yang dapat diuji dan dikembangkan.

Batas-batas tersebut justru memperjelas status konseptual akuntabilitas pascainsiden. Ia adalah salah satu kemungkinan formasi dalam model *Membaca Tanggung Jawab dalam Wacana*, bukan keseluruhan model itu sendiri. Posisi ini memungkinkan konsep dipertahankan sebagai temuan teoretis yang spesifik sekaligus mencegah model buku terkunci pada konteks yang selalu membutuhkan insiden. Bab selanjutnya dapat bergerak ke dimensi struktural dengan menanyakan apa yang tidak terselesaikan ketika wacana terlalu terpusat pada penanganan setelah peristiwa.

BAB 6
DIMENSI STRUKTURAL DALAM WACANA

Dimensi struktural diperlukan agar pembacaan tanggung jawab tidak berhenti pada aktor yang paling dekat dengan kejadian dan tindakan yang paling mudah terlihat. Dalam banyak wacana, penyebab serta solusi dapat dibingkai secara individual, padahal risiko terbentuk melalui hubungan antara individu, kelompok sebaya, budaya institusi, kebijakan, struktur pengawasan, dan lingkungan digital. Perspektif sosial-ekologis menunjukkan bahwa masalah seperti perundungan tidak dapat dijelaskan hanya melalui karakter korban atau pelaku karena perilaku terbentuk di dalam sistem yang saling berhubungan (Bronfenbrenner, 1979; Patel & Quan-Haase, 2024; Swearer & Hymel, 2015). Atas dasar itu, bab ini menempatkan pencegahan dan kondisi struktural sebagai dimensi evaluatif: bukan untuk menyalahkan sistem secara otomatis, melainkan untuk menilai apakah wacana menyediakan ruang bagi pembacaan terhadap sebab, perlindungan, deteksi, pelaporan, inklusivitas, dan perubahan kelembagaan.

A. Mengapa Pencegahan Struktural Perlu Dibaca

Pembacaan struktural diperlukan karena tanggung jawab dapat dengan mudah dipersempit menjadi urusan individu. Ketika wacana hanya menanyakan siapa pelaku, siapa korban, dan sanksi apa yang diberikan, analisis memperoleh informasi penting mengenai kejadian tetapi belum tentu menjelaskan kondisi yang memungkinkan kejadian berulang. Perspektif ekologis Bronfenbrenner (1979) menolak pemisahan individu dari lingkungan dengan menempatkan perkembangan manusia dalam sistem yang saling berhubungan. Prinsip ini kemudian digunakan dalam studi perundungan untuk menunjukkan bahwa perilaku muncul melalui interaksi individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, komunitas, dan struktur sosial yang lebih luas (Swearer & Hymel, 2015).

Patel dan Quan-Haase (2024) memperbarui logika tersebut untuk konteks *cyberbullying*. Mereka menunjukkan bahwa lingkungan digital tidak dapat diperlakukan sebagai ruang yang terpisah dari keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan masyarakat. Konteks digital berinteraksi dengan seluruh sistem ekologis dan mengubah peluang terjadinya, tersebarnya, serta ditanganinya perundungan. Implikasinya bagi pembacaan tanggung jawab adalah bahwa penyebab dan pencegahan tidak dapat diturunkan hanya dari perilaku pengguna individual.

Bukti intervensi juga mendukung perlunya pembacaan multilevel. Gaffney et al. (2021a), melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis, menunjukkan bahwa program berbasis sekolah secara keseluruhan dapat mengurangi perundungan dan viktimisasi. Analisis komponen oleh Gaffney et al. (2021b)

menunjukkan bahwa unsur seperti pendekatan seluruh sekolah, kebijakan antiperundungan, aturan kelas, keterlibatan orang tua, dan dukungan terhadap korban berkaitan dengan efektivitas yang lebih besar. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan yang hanya berorientasi pada "memperbaiki individu" kehilangan sebagian konteks yang memproduksi risiko.

Namun, dimensi struktural tidak boleh dipahami sebagai kewajiban bagi setiap teks berita untuk memuat seluruh teori pencegahan. Berita memiliki batas ruang, waktu, genre, dan nilai berita. Yang penting bagi Analisis Wacana Kritis adalah pola pada tingkat korpus. Jika dalam banyak teks penanganan setelah kejadian selalu mendapat ruang luas sedangkan kondisi kelembagaan hampir tidak muncul, ketimpangan tersebut dapat diperlakukan sebagai temuan mengenai orientasi wacana.

Fairclough (2003) menempatkan teks dalam hubungan dengan praktik diskursus dan praktik sosial. Artinya, analisis struktural tidak dilakukan dengan melompat langsung dari satu kata menuju klaim tentang sistem. Peneliti perlu menunjukkan hubungan antara pola bahasa, struktur sumber, posisi aktor, dan konteks sosial. Dimensi pencegahan kemudian berfungsi untuk menilai sejauh mana wacana bergerak dari konsekuensi menuju kondisi yang memungkinkan konsekuensi tersebut.

Dalam model *Membaca Tanggung Jawab dalam Wacana*, pencegahan struktural karena itu bukan kategori tematik tambahan yang berdiri sejajar dengan legitimasi formal, moral, atau administratif. Ia merupakan lensa evaluatif terhadap jangkauan tanggung jawab. Pertanyaan dasarnya ialah apakah wacana hanya mengatribusikan kewajiban untuk menangani akibat atau juga mengonstruksi kewajiban untuk mengurangi risiko, memperbaiki tata kelola, dan mencegah pengulangan.

B. Pencegahan Struktural sebagai Dimensi Evaluatif

Istilah "dimensi evaluatif" digunakan untuk membedakan pencegahan struktural dari kategori isi yang harus selalu hadir. Sebuah teks dapat tidak menyebut pencegahan tanpa menjadi teks yang salah. Analisis baru memperoleh makna kritis ketika ketidakhadiran tersebut dibandingkan dengan pertanyaan penelitian, konteks kebijakan, pola korpus, dan dominasi bentuk respons lain. Dengan demikian, dimensi evaluatif tidak menilai berita berdasarkan standar ideal yang dipaksakan, tetapi menilai ruang diskursif yang tersedia untuk memahami tanggung jawab.

Pendekatan ini konsisten dengan gagasan Fairclough (2003) bahwa analisis kritis perlu bergerak antara apa yang dinyatakan dan relasi sosial yang lebih luas. Tanggung jawab dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan korektif sesudah masalah, tetapi dapat pula diperluas menjadi kewajiban institusional untuk menciptakan kondisi yang aman. Keduanya memiliki status berbeda dan perlu dipisahkan agar peneliti tidak menyamakan respons dengan pencegahan.

Gaffney et al. (2021b) memperlihatkan bahwa unsur program yang bersifat structural seperti kebijakan sekolah, aturan, keterlibatan orang tua, dan pendekatan seluruh sekolah dapat berhubungan dengan hasil pencegahan yang lebih baik. Temuan ini memberi dasar empiris bahwa pencegahan memang memiliki dimensi kelembagaan. Akan tetapi, model wacana tidak mengubah bukti intervensi menjadi ukuran efektivitas berita. Bukti tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa elemen struktural layak diperlakukan sebagai objek analitis.

Sainio et al. (2026) menunjukkan bahwa kerja antiperundungan yang sistematis membutuhkan praktik bersama dan komitmen staf. Persepsi terhadap nilai kesejahteraan sekolah, kepemimpinan, serta penggunaan program terstruktur berkaitan dengan persepsi mengenai adanya praktik antiperundungan yang dibagikan dan diterapkan bersama. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan bukan sekadar kumpulan tindakan individual guru, tetapi dapat menjadi kualitas organisasi.

Saleh et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya pendekatan seluruh sekolah dalam konteks sekolah menengah Indonesia. Perspektif pemangku kepentingan dalam studi tersebut menempatkan budaya sekolah inklusif, praktik restoratif, keterlibatan berbagai pihak, dan strategi tingkat sekolah sebagai bagian dari pencegahan perundungan serta perundungan siber. Relevansinya bagi analisis wacana terletak pada kemungkinan membandingkan apakah unsur-unsur seperti itu tersedia dalam konstruksi media mengenai tanggung jawab.

Dengan demikian, dimensi evaluatif bekerja melalui perbandingan antara yang ditonjolkan dan yang kurang diberi ruang. Peneliti dapat memetakan apakah tanggung jawab diarahkan pada sanksi, pemulihan, prosedur, perubahan kebijakan, budaya institusi, atau kombinasi di antaranya. Hasilnya bukan penilaian “baik-buruk” terhadap media, melainkan deskripsi kritis mengenai horizon solusi yang dibangun wacana.

C. Budaya Institusi dan Kondisi yang Memungkinkan Insiden

Budaya institusi mengacu pada nilai, kebiasaan, norma, praktik, dan ekspektasi yang memberi arah pada perilaku anggota organisasi. Dalam konteks sekolah, budaya tidak hanya terdapat pada dokumen visi dan tata tertib, tetapi juga pada cara staf berinteraksi, cara laporan diterima, cara konflik diselesaikan, dan tindakan apa yang dianggap "biasa". Karena itu, insiden tidak selalu dapat dipahami sebagai penyimpangan yang sepenuhnya terpisah dari lingkungan sosial tempat ia terjadi.

Swearer dan Hymel (2015) menempatkan perundungan dalam model sosial-ekologis yang menekankan interaksi dinamis antara karakteristik individu dan lingkungan. Pendekatan tersebut membantu menggeser fokus dari pertanyaan "anak seperti apa yang melakukan perundungan?" menuju pertanyaan tentang iklim teman sebaya, relasi dengan guru, norma sekolah, dan faktor keluarga serta komunitas yang berinteraksi dengan individu.

Welsh et al. (2024) menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap iklim sekolah berkaitan dengan pengalaman terhadap personel sekolah dan disiplin. Studi tersebut juga memperlihatkan bahwa pengalaman iklim sekolah tidak seragam bagi semua siswa. Perbedaan menurut ras, gender, dan status disabilitas mengingatkan bahwa budaya sekolah yang dinilai positif pada tingkat umum belum tentu dirasakan sama oleh kelompok yang lebih rentan.

Sainio et al. (2026) menegaskan pentingnya praktik bersama antiperundungan. Sekolah yang memiliki model kerja yang terstruktur cenderung memiliki persepsi lebih kuat

mengenai adanya praktik bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan lebih mungkin menjadi bagian dari budaya ketika tindakan tidak bergantung pada inisiatif satu guru, melainkan didukung oleh kepemimpinan, nilai kesejahteraan, dan mekanisme yang dikenali bersama.

Saleh et al. (2025) memperlihatkan bahwa pendekatan seluruh sekolah membutuhkan keterhubungan antara siswa, guru, pimpinan, keluarga, serta kebijakan sekolah. Budaya institusi dengan demikian dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial bagi pencegahan. Ia menentukan apakah siswa merasa aman melapor, apakah staf memiliki bahasa bersama untuk mengenali perundungan, dan apakah respons konsisten di berbagai bagian organisasi.

Dalam Analisis Wacana Kritis, budaya institusi dapat muncul secara eksplisit melalui istilah seperti "budaya sekolah", "lingkungan aman", atau "kebiasaan". Namun, ia juga dapat ditelusuri melalui pengulangan pola: siapa yang selalu diberi otoritas, bagaimana sekolah menjelaskan tanggung jawab, apakah masalah diposisikan sebagai kasus individual, dan apakah kegagalan organisasi pernah dibicarakan. Dengan cara ini, kondisi yang memungkinkan insiden dapat dianalisis tanpa mengasumsikan bahwa budaya institusi merupakan penyebab tunggal.

D. Relasi Kuasa dan Kerentanan Struktural

Perundungan sendiri mengandung dimensi ketimpangan kuasa. Namun, relasi kuasa tidak hanya berada di antara pelaku dan korban. Ia juga dapat berada dalam perbedaan status siswa-guru, siswa-institusi, mayoritas-minoritas, atau kelompok yang memiliki akses berbeda terhadap sumber daya dan kredibilitas.

Pembacaan struktural diperlukan agar kerentanan tidak diperlakukan semata sebagai sifat personal korban.

Van Leeuwen (2008) menunjukkan bahwa representasi aktor sosial dapat memberikan atau mengurangi agensi melalui inklusi, eksklusi, kategorisasi, dan berbagai bentuk pengaburan. Dalam konteks kelompok rentan, mekanisme ini penting karena mereka dapat sering disebut tetapi tetap memiliki sedikit suara. Wacana dapat menampilkan seseorang sebagai pihak yang "harus dilindungi" tanpa memberinya posisi sebagai subjek yang mampu menjelaskan kebutuhan atau menilai respons.

Welsh et al. (2024) menemukan bahwa siswa dengan disabilitas melaporkan persepsi yang lebih buruk pada beberapa dimensi iklim sekolah dibandingkan rekan mereka. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan dapat diproduksi melalui pertemuan antara karakteristik individu dan kualitas lingkungan. Karena itu, inklusi formal di dalam sekolah belum tentu menghapus ketimpangan pengalaman.

Patel dan Quan-Haase (2024) juga menekankan bahwa faktor individual termasuk gender, ras atau etnis, orientasi seksual, agama, dan disabilitas berinteraksi dengan sistem ekologis dan konteks digital. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa risiko bukan hasil satu identitas secara otomatis, melainkan hubungan antara identitas, lingkungan sosial, fitur teknologi, dan praktik kelembagaan.

Dalam wacana, kerentanan struktural dapat dikenali ketika kelompok tertentu terus ditempatkan pada posisi penerima tindakan, tidak memiliki akses pada otoritas, atau hanya muncul ketika telah mengalami kerugian. Peneliti perlu berhati-hati agar tidak mengubah kategori "rentan" menjadi identitas yang

esensial. Yang dianalisis adalah kondisi yang meningkatkan risiko, membatasi suara, atau mengurangi akses terhadap perlindungan.

Dimensi kuasa dengan demikian memperluas atribusi tanggung jawab. Pertanyaan tidak hanya diarahkan kepada siapa yang melakukan tindakan langsung, tetapi juga kepada siapa yang menguasai aturan, akses, ruang, informasi, dan mekanisme perlindungan. Perspektif ini memungkinkan tanggung jawab preventif dibaca sebagai kewajiban untuk mengurangi ketimpangan kondisi, bukan hanya menghukum pelanggaran setelah terjadi.

E. Deteksi Dini dan Mekanisme Pengaduan

Deteksi dini merupakan jembatan antara pencegahan dan respons. Sistem tidak dapat menindak risiko yang tidak dikenali, tetapi pengenalan saja tidak cukup apabila tidak ada jalur pengaduan yang dipercaya. Dalam konteks sekolah, deteksi dapat berasal dari pengamatan staf, perubahan perilaku siswa, informasi teman sebaya, komunikasi keluarga, data kejadian, atau laporan langsung dari pihak terdampak.

Gizzarelli et al. (2025) menunjukkan bahwa respons staf terhadap laporan siswa dipengaruhi oleh faktor individual dan sekolah. Studi mereka menekankan pentingnya kebijakan dan prosedur yang jelas, waktu yang disediakan untuk menangani laporan, basis data untuk merekam insiden, serta pengembangan profesional bagi staf. Temuan tersebut menunjukkan bahwa deteksi dan respons bukan hanya kompetensi pribadi guru, tetapi membutuhkan dukungan organisasi.

Abdulrahman et al. (2026) memperlihatkan bahwa guru dapat menghadapi hambatan nyata dalam melaporkan kekerasan atau penelantaran anak, termasuk ketidakjelasan prosedur, kekhawatiran terhadap reaksi keluarga, kurangnya dukungan institusional, dan rendahnya kepercayaan diri. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa mekanisme pengaduan yang "tersedia" secara formal belum tentu dapat digunakan secara efektif.

Brunborg et al. (2024) juga menemukan berbagai hambatan personal pada profesional pendidikan anak usia dini dalam melaporkan dugaan maltreatment. Kekhawatiran terhadap konsekuensi bagi anak, hubungan dengan keluarga, kompetensi, serta reaksi rekan kerja dapat menghambat pelaporan. Karena itu, sistem pengaduan perlu dibaca sebagai ekosistem kepercayaan, bukan hanya saluran administratif.

Tak et al. (2024), dalam konteks *safe sport*, menunjukkan tiga kemungkinan penggunaan sistem pelaporan: penggunaan yang sesuai, tidak digunakan, dan disalahgunakan. "Tidak digunakan" dapat muncul karena rasa takut terhadap pembalasan atau konsekuensi relasional. Temuan tersebut sangat relevan bagi sekolah karena menyediakan peringatan bahwa keberadaan mekanisme tidak sama dengan aksesibilitas, keamanan, atau kepercayaan terhadap mekanisme tersebut.

Dalam wacana, deteksi dini dan pengaduan dapat dianalisis melalui kehadiran atau ketidakhadiran pertanyaan tentang bagaimana persoalan pertama kali diketahui, siapa yang dapat melapor, kepada siapa laporan ditujukan, dan apa yang terjadi setelah laporan diterima. Jika berita hanya dimulai ketika kasus telah viral, mekanisme deteksi sebelum viralitas dapat menjadi wilayah yang tidak terlihat. Ketidakhadiran ini penting sebagai

bahan evaluasi struktural, bukan sebagai bukti otomatis bahwa mekanisme tidak ada.

F. *Safeguarding* dan Sistem Perlindungan

Istilah *safeguarding* merujuk pada kerangka perlindungan yang lebih luas daripada respons terhadap satu insiden. Ia mencakup upaya mengurangi risiko, mengenali bahaya, menyediakan jalur pelaporan, menetapkan peran, melindungi pihak terdampak, serta memastikan adanya mekanisme tindak lanjut dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan, *safeguarding* menempatkan keselamatan sebagai tanggung jawab sistem, bukan hanya pilihan individu.

Dwarika et al. (2026), melalui tinjauan cakupan mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan dalam dunia tari, menunjukkan bahwa faktor risiko serta faktor protektif tersebar di berbagai tingkat sistem. Mereka menekankan nilai pedoman perlindungan yang jelas, sertifikasi atau kompetensi tenaga pengajar, badan pengawas, mekanisme pelaporan, dan kolaborasi ahli. Walaupun domainnya bukan sekolah, prinsip sistemiknya relevan untuk memahami *safeguarding* sebagai tata kelola perlindungan.

Tak et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem pelaporan merupakan bagian penting dari infrastruktur *safe sport*, tetapi efektivitas penggunaannya bergantung pada budaya, relasi, dan konsekuensi yang dipersepsikan. Temuan tersebut menegaskan bahwa *safeguarding* tidak dapat direduksi menjadi prosedur tertulis. Sistem harus memberikan rasa aman bagi pelapor dan kejelasan mengenai apa yang dilakukan setelah laporan diterima.

Gizzarelli et al. (2025) memberikan contoh dari lingkungan sekolah bahwa kebijakan jelas, dokumentasi insiden, kesiapan staf, serta keterlibatan komunitas sekolah memperkuat respons terhadap laporan perundungan. Sainio et al. (2026) menambahkan bahwa praktik bersama dan komitmen staf penting agar kerja antiperundungan tidak terfragmentasi. Dua studi tersebut memperlihatkan unsur kunci *safeguarding*: konsistensi, kejelasan, dan keterhubungan antaraktor.

Pembacaan wacana dapat menguji apakah perlindungan ditampilkan sebagai respons individual atau sebagai sistem. Pernyataan bahwa "korban didampingi" menunjukkan tindakan protektif, tetapi belum menjelaskan apakah organisasi memiliki jalur pengaduan, pembagian tanggung jawab, standar tindak lanjut, dan mekanisme untuk mencegah kejadian serupa. Pembedaan ini membantu memisahkan perlindungan sesaat dari infrastruktur perlindungan.

Dengan demikian, *safeguarding* berfungsi sebagai konsep pembanding untuk menilai keluasan wacana tanggung jawab. Semakin banyak perhatian diberikan pada desain sistem, semakin luas kemungkinan tanggung jawab preventif dibicarakan. Sebaliknya, ketika perlindungan hanya muncul setelah kerugian terjadi, wacana cenderung berorientasi pada pemulihan pascakejadian.

G. Inklusivitas dan Perlindungan Kelompok Rentan

Pencegahan struktural harus mempertimbangkan bahwa risiko tidak terdistribusi secara merata. Siswa dengan disabilitas, siswa yang berbeda secara etnis, agama, gender, kondisi kesehatan, atau

posisi sosial dapat mengalami lingkungan sekolah dengan cara yang berbeda. Karena itu, sistem yang aman tidak cukup hanya memberikan aturan yang sama bagi semua orang; ia juga perlu mengenali hambatan yang membuat kelompok tertentu lebih sulit mengakses perlindungan.

Welsh et al. (2024) menunjukkan bahwa persepsi terhadap iklim sekolah bervariasi menurut karakteristik siswa dan bahwa siswa dengan disabilitas melaporkan pengalaman yang lebih buruk pada sejumlah dimensi. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa indikator agregat dapat menutupi perbedaan. Sebuah sekolah dapat dinilai relatif aman pada tingkat umum tetapi tetap menghasilkan pengalaman yang kurang aman bagi kelompok tertentu.

Saleh et al. (2025) menempatkan budaya sekolah inklusif sebagai salah satu unsur penting pendekatan seluruh sekolah terhadap perundungan dan perundungan siber. Inklusivitas dalam konteks ini bukan tambahan dekoratif, melainkan cara mengurangi kondisi yang membuat perbedaan menjadi dasar eksklusi, stigma, atau kekerasan. Pencegahan karena itu perlu berkaitan dengan norma relasi, praktik restoratif, dan keterlibatan komunitas sekolah.

Patel dan Quan-Haase (2024) memperlihatkan bahwa lingkungan digital memperluas konteks kerentanan. Identitas sosial berinteraksi dengan fitur teknologi, akses digital, norma kelompok, dan relasi offline. Hal ini membuat perlindungan tidak dapat hanya berfokus pada ruang fisik sekolah. Kebijakan yang inklusif perlu mempertimbangkan kesinambungan antara interaksi tatap muka dan komunikasi digital.

Dalam wacana media, inklusivitas dapat tampak melalui cara kelompok rentan diberi suara, bukan hanya melalui penyebutan identitasnya. Van Leeuwen (2008) mengingatkan bahwa aktor dapat hadir tetapi tetap mengalami pengurangan agensi melalui kategorisasi atau eksklusi suara. Karena itu, perlindungan simbolik misalnya menyebut korban sebagai pihak yang "rentan" perlu dibedakan dari representasi yang memberi ruang bagi pengalaman, hak, dan kebutuhan kelompok tersebut.

Pada tingkat evaluatif, pertanyaan strukturalnya ialah apakah wacana melihat kerentanan sebagai sifat individu atau sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan. Pembacaan kedua membuka ruang bagi tanggung jawab yang lebih luas: menyesuaikan sistem, memperbaiki akses, mengurangi stigma, dan memastikan mekanisme perlindungan dapat digunakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

H. *Foregrounding* Penanganan dan *Backgrounding* Pencegahan

Dalam wacana, sebagian unsur ditempatkan di latar depan dan sebagian lain berada di latar belakang. *Foregrounding* dapat terjadi melalui judul, lead, pengulangan, kutipan, posisi sumber, atau rincian yang lebih banyak. *Backgrounding* terjadi ketika aktor, sebab, atau konteks tetap hadir tetapi kurang menonjol, sementara eksklusi terjadi ketika unsur tertentu tidak dihadirkan sama sekali. Van Leeuwen (2008) menunjukkan bahwa penghilangan dan pelatarbelakangan aktor merupakan bagian penting dari representasi sosial.

Fairclough (2003) juga menekankan bahwa makna dibentuk melalui pilihan mengenai apa yang dimasukkan, bagaimana unsur dihubungkan, dan apa yang tidak dijelaskan. Dalam konteks tanggung jawab, penanganan setelah insiden memiliki nilai berita yang tinggi karena menyediakan tindakan konkret: polisi menyelidiki, sekolah mengklarifikasi, pemerintah mendampingi, atau pimpinan menjatuhkan sanksi. Pencegahan struktural sering kurang memiliki bentuk peristiwa yang sama dramatisnya.

Ketimpangan ini tidak otomatis merupakan bias yang disengaja. Ia dapat muncul dari logika genre berita, kebutuhan aktualitas, ketersediaan sumber, serta fakta bahwa respons pascainsiden menghasilkan pernyataan resmi. Namun, ketika pola tersebut berulang, konsekuensi diskursifnya tetap dapat dianalisis. Publik lebih sering berhadapan dengan gambaran tanggung jawab sebagai "bertindak setelah masalah" daripada "membangun kondisi agar masalah tidak terjadi".

Bukti pencegahan menunjukkan bahwa pendekatan struktural memiliki relevansi substantif. Gaffney et al. (2021a, 2021b) menunjukkan efektivitas program berbasis sekolah dan pentingnya komponen multilevel. Sainio et al. (2026) memperlihatkan peran praktik bersama dan kepemimpinan. Ketika unsur-unsur tersebut jarang hadir dalam wacana, ketidakseimbangan antara penanganan dan pencegahan menjadi temuan yang layak dibahas.

Analisis *foregrounding* dan *backgrounding* sebaiknya dilakukan pada tingkat pola, bukan satu teks. Peneliti dapat membandingkan proporsi ruang, kedudukan dalam struktur berita, jenis sumber yang dikutip, serta kekuatan modalitas. Pencegahan yang hanya muncul sebagai satu kalimat penutup

tidak memiliki status yang sama dengan prosedur hukum yang menjadi judul, lead, dan isi utama berita.

Dimensi ini membantu menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana. Penelitian tidak perlu mengatakan bahwa media "mengabaikan pencegahan" jika pencegahan tetap muncul. Formulasi yang lebih presisi adalah bahwa penanganan diprioritaskan secara diskursif sementara pencegahan ditempatkan di latar belakang. Perbedaan terminologis tersebut penting untuk menjaga kesesuaian antara bukti tekstual dan interpretasi.

I. Ketidakhadiran Wacana Pencegahan sebagai Temuan Analitis

Ketidakhadiran merupakan persoalan metodologis yang lebih sulit daripada kehadiran karena peneliti harus membuktikan bahwa sesuatu yang tidak disebut memang relevan untuk ditanyakan. Karena itu, absensi tidak boleh ditafsirkan hanya berdasarkan harapan peneliti. Ia perlu dibaca dalam hubungan dengan konteks genre, tujuan teks, korpus, kebijakan, dan pola respons yang dominan.

Van Leeuwen (2008) membedakan berbagai bentuk eksklusi aktor dan tindakan. Prinsip ini dapat diperluas secara hati-hati untuk membaca absensi tematik. Apabila seluruh korpus secara konsisten membicarakan sanksi, pemeriksaan, trauma, dan pendampingan tetapi hampir tidak pernah menyinggung pencegahan, sistem pengaduan, budaya organisasi, atau pengawasan, absensi menjadi bagian dari struktur representasi yang dapat dianalisis.

Fairclough (2003) memberi dasar bahwa analisis kritis perlu menanyakan asumsi dan pilihan yang membentuk teks. Apa yang tidak dijelaskan dapat sama pentingnya dengan apa yang dijelaskan ketika absensi tersebut berulang dan berkaitan dengan struktur sosial yang relevan. Namun, peneliti harus menghindari argumen kontrafaktual yang tidak terbatas. Tidak semua topik yang tidak hadir harus dianggap dimarginalkan.

Bukti eksternal dapat digunakan sebagai konteks pembanding, bukan sebagai pengganti data wacana. Misalnya, Gaffney et al. (2021b), Sainio et al. (2026), dan Saleh et al. (2025) menunjukkan bahwa pencegahan antiperundungan yang efektif melibatkan kebijakan, praktik bersama, budaya sekolah, dan berbagai aktor. Literatur tersebut tidak membuktikan bahwa media wajib membahas semuanya, tetapi menunjukkan bahwa terdapat dimensi pencegahan yang secara substantif relevan untuk diuji kehadirannya.

Demikian pula, studi pelaporan menunjukkan bahwa kejelasan prosedur dan kepercayaan terhadap sistem berpengaruh terhadap keterbukaan laporan (Abdulrahman et al., 2026; Brunborg et al., 2024; Tak et al., 2024). Jika wacana baru dimulai saat kasus menjadi viral dan tidak pernah membicarakan mekanisme pelaporan sebelumnya, absensi tersebut dapat mengarahkan pertanyaan kritis tentang bagaimana pencegahan direpresentasikan.

Dengan demikian, ketidakhadiran menjadi temuan analitis ketika memenuhi tiga syarat: relevan secara konseptual, konsisten pada pola data, dan dapat dihubungkan dengan konteks sosial atau institusional yang terdokumentasi. Prinsip ini mencegah Analisis Wacana Kritis mengubah setiap “yang tidak

disebut" menjadi bukti ideologi, sekaligus mempertahankan kemampuan kritis untuk membaca batas wacana.

J. Dari Akuntabilitas Reaktif menuju Tanggung Jawab Preventif

Akuntabilitas reaktif berpusat pada pertanyaan tentang apa yang dilakukan setelah masalah terjadi. Ia penting karena korban memerlukan perlindungan, fakta perlu diperiksa, dan pihak yang bertanggung jawab perlu memberikan jawaban. Namun, jika akuntabilitas berhenti pada respons pascakejadian, struktur yang memungkinkan masalah dapat tetap tidak berubah. Tanggung jawab preventif memperluas orientasi tersebut menuju kewajiban untuk mengurangi risiko sebelum kerugian terjadi.

Peralihan ini sejalan dengan perspektif sosial-ekologis. Bronfenbrenner (1979) serta Swearer dan Hymel (2015) menunjukkan bahwa perilaku berada dalam jaringan konteks. Patel dan Quan-Haase (2024) memperlihatkan bahwa konteks digital menambah lapisan baru yang terhubung dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Karena itu, pencegahan yang memadai memerlukan tindakan pada lebih dari satu tingkat.

Bukti intervensi memperkuat argumen tersebut. Gaffney et al. (2021a) menemukan bahwa program berbasis sekolah dapat mengurangi perundungan, sedangkan Gaffney et al. (2021b) menunjukkan relevansi pendekatan seluruh sekolah, kebijakan, aturan kelas, keterlibatan orang tua, dan kerja dengan korban. Hensums et al. (2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas intervensi dapat berbeda menurut karakteristik siswa, sehingga

tanggung jawab preventif perlu sensitif terhadap variasi konteks dan penerima.

Tanggung jawab preventif juga memerlukan organisasi yang mampu mengenali serta merespons sinyal sebelum masalah membesar. Gizzarelli et al. (2025) menunjukkan pentingnya prosedur, dokumentasi, waktu, dan kompetensi staf; Abdulrahman et al. (2026) serta Brunborg et al. (2024) memperlihatkan hambatan yang dapat menghalangi pelaporan; sementara Dwarika et al. (2026) menekankan pentingnya pedoman, pengawasan, dan mekanisme perlindungan. Keseluruhan bukti ini menunjukkan bahwa pencegahan merupakan kualitas sistem, bukan satu tindakan.

Dalam model *Membaca Tanggung Jawab dalam Wacana*, transisi dari reaktif ke preventif tidak diperlakukan sebagai urutan moral yang selalu membuat pencegahan "lebih baik" daripada respons. Keduanya dibutuhkan. Analisis justru menilai keseimbangan: apakah wacana mengakui kebutuhan korban dan penindakan sekaligus membuka ruang bagi perubahan sistem, atau apakah tanggung jawab berhenti ketika tindakan pascainsiden telah diumumkan.

Dengan demikian, dimensi struktural menutup rangkaian konseptual dari representasi menuju tanggung jawab yang lebih luas. Representasi menunjukkan siapa dan apa yang dibuat terlihat; atribusi menentukan siapa yang harus menjawab; legitimasi memberi dasar pada tuntutan serta respons; dan dimensi struktural menguji apakah horizon tanggung jawab mencapai kondisi pencegahan. Pada titik ini, model bergerak dari pembacaan peristiwa menuju pembacaan sistem tanpa kehilangan pijakan pada bukti tekstual.

BAB 7
MODEL AWK KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB

Bab ini menyatukan pembahasan sebelumnya ke dalam *Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab*. Model tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Analisis Wacana Kritis Fairclough, melainkan untuk menyediakan kerangka sintesis yang memusatkan perhatian pada satu pertanyaan: bagaimana wacana membentuk siapa yang dianggap bertanggung jawab, atas dasar apa tanggung jawab tersebut memperoleh legitimasi, respons apa yang dinormalisasi, dan dimensi struktural apa yang ditonjolkan atau dimarginalkan. Dengan posisi ini, model mempertahankan tiga dimensi Fairclough sebagai fondasi analisis, tetapi menambahkan arsitektur konseptual yang memungkinkan temuan tentang representasi, agensi, atribusi, legitimasi, respons, dan struktur dibaca secara relasional dan dapat direplikasi pada konteks yang berbeda (Fairclough, 1992, 2003; Machin & Mayr, 2023; Metze et al., 2024).

A. Posisi Model terhadap Analisis Wacana Kritis Fairclough

Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab berdiri di atas asumsi dasar Analisis Wacana Kritis bahwa bahasa merupakan praktik sosial dan bahwa teks harus dibaca dalam hubungan dengan proses produksi serta struktur sosial yang lebih luas. Fairclough

(1992) merumuskan hubungan tersebut melalui model tiga dimensi: teks, praktik diskursus, dan praktik sosial. Ketiga dimensi ini tetap menjadi fondasi model buku karena menyediakan jembatan antara material bahasa dan konteks sosial.

Pada tingkat teks, peneliti mengamati pilihan leksikal, struktur gramatikal, modalitas, pasivisasi, nominalisasi, penamaan aktor, dan pola kutipan. Pada tingkat praktik diskursus, perhatian berpindah pada produksi, sirkulasi, sumber, intertekstualitas, dan hierarki suara. Pada tingkat praktik sosial, analisis menilai relasi kuasa, ideologi, institusi, dan struktur yang memungkinkan pola wacana tertentu menjadi dominan (Fairclough, 1995, 2003). Model Konstruksi Tanggung Jawab tidak mengubah tiga tingkat tersebut, tetapi menggunakan hasilnya untuk membangun sintesis yang lebih terarah.

Perbedaan antara fondasi dan sintesis penting agar model tidak diposisikan sebagai "Fairclough baru". Machin dan Mayr (2023) menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis menyediakan seperangkat alat untuk membaca pilihan semiotik, representasi orang, tindakan, modalitas, presupposisi, dan bentuk pengaburan. Alat-alat itu bersifat generatif karena dapat digunakan pada berbagai jenis data. Model yang dikembangkan di sini mengambil hasil analisis semacam itu dan menata relasinya melalui konsep tanggung jawab.

Analisis Wacana Kritis berkembang melalui penerapan lintas domain tanpa kehilangan orientasi pada bahasa, kuasa, dan struktur. Machin dan Cheng (2023) memperlihatkan produktivitas studi wacana kritis dalam ranah hukum, sedangkan Metze et al. (2024) menempatkan analisis wacana sebagai salah satu pendekatan interpretif yang secara khusus menelaah

struktur diskursif hegemonik, dominan, dan resesif serta hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Hal ini mendukung posisi model sebagai spesialisasi fokus, bukan penggantian paradigma.

Karena itu, relasi model dengan Fairclough dapat dirumuskan sebagai relasi fondasi dan ekstensi analitis. Fairclough menyediakan arsitektur untuk menjelaskan bagaimana wacana bekerja; Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab menyediakan pertanyaan sintesis mengenai bagaimana kerja wacana tersebut mengorganisasikan tanggung jawab. Validitas model bergantung pada ketepatan analisis tiga dimensi, bukan pada pemisahan dari Analisis Wacana Kritis.

B. Asumsi Dasar Model

Asumsi pertama model adalah bahwa tanggung jawab merupakan konstruksi relasional. Tanggung jawab tidak hanya melekat pada individu yang melakukan tindakan, tetapi dapat tersebar di antara aktor yang menyebabkan, mengawasi, mencegah, menjelaskan, memperbaiki, atau memiliki kewenangan institusional. Saurwein et al. (2025) menunjukkan bahwa wacana media dapat membentuk jaringan tanggung jawab yang menghubungkan pembicara, subjek tanggung jawab, dan objek tanggung jawab. Karena itu, model tidak mencari satu aktor secara apriori, tetapi memetakan relasi.

Asumsi kedua adalah bahwa tanggung jawab harus dibedakan dari akuntabilitas. Fleisher et al. (2025) menekankan bahwa praktik tanggung jawab moral dan kerangka akuntabilitas institusional merupakan hal yang berbeda. Seseorang dapat dinilai bersalah atau terpuji tanpa berada dalam forum formal, sedangkan organisasi dapat wajib memberi penjelasan karena

aturan atau mandat meskipun kesalahan moral individual belum ditetapkan. Pembedaan ini mencegah reduksi analisis ke bahasa menyalahkan.

Asumsi ketiga adalah bahwa atribusi tanggung jawab selalu memerlukan konteks legitimasi. Gagrčin (2026) membedakan tanggung jawab sebagai sisi kewajiban, yakni siapa yang seharusnya bertindak, dari legitimasi sebagai sisi pengakuan, yakni siapa yang dianggap layak bertindak dengan otoritas dan kepatutan. Artinya, analisis tidak cukup mengidentifikasi siapa yang diminta bertindak; peneliti juga perlu membaca mengapa tuntutan atau respons tertentu memperoleh pengakuan.

Asumsi keempat adalah bahwa orientasi makna publik dapat dianalisis melalui struktur wacana, tetapi tidak boleh disamakan dengan efek psikologis pada khalayak. Baden et al. (2025) mengonseptualisasikan opini publik digital sebagai negosiasi diskursif mengenai posisi yang dianggap dapat diterima. Kerangka ini memungkinkan analisis terhadap ruang makna yang tersedia tanpa mengklaim representativitas pendapat populasi.

Asumsi kelima adalah bahwa wacana harus dibaca sekaligus melalui apa yang hadir dan apa yang tidak hadir. Pilihan untuk menonjolkan penanganan, misalnya, dapat berjalan bersama dengan peminggiran pencegahan atau kondisi struktural. Metze et al. (2024) menekankan bahwa analisis interpretif memperhatikan bagaimana unsur realitas dapat di-*foreground* atau di-*background* serta bagaimana suara, kepentingan, dan gagasan dapat dimasukkan atau dikeluarkan. Karena itu, ketidakhadiran dapat menjadi data analitis ketika dapat ditunjukkan secara sistematis.

C. Representasi Bahasa sebagai Titik Masuk Analisis

Representasi bahasa merupakan titik masuk model karena tanggung jawab hanya dapat dibaca setelah peneliti memahami bagaimana peristiwa, aktor, tindakan, dan kondisi dibentuk dalam teks. Fairclough (2003) menempatkan representasi sebagai salah satu fungsi penting teks: bahasa memilih aspek realitas, menghubungkan peristiwa, memberi kategori, dan menyusun hubungan antara aktor. Pilihan tersebut menyediakan bahan awal bagi atribusi tanggung jawab.

Model tidak mensyaratkan daftar fitur linguistik yang sama pada setiap penelitian. Machin dan Mayr (2023) menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis dapat menggunakan beragam sumber daya, seperti pilihan kata, transitivitas, nominalisasi, presupposisi, modalitas, metafora, kutipan, dan representasi aktor. Peneliti memilih fitur yang paling relevan dengan masalah. Prinsipnya adalah keterlacakan: interpretasi tentang tanggung jawab harus dapat ditelusuri kembali ke pola kebahasaan atau semiotik yang nyata.

Pada level leksikal, kategori seperti “korban”, “pelaku”, “terduga”, “krisis”, “kegagalan”, “kelalaian”, “evaluasi”, atau “pemulihan” membentuk medan makna yang berbeda. Pada level gramatikal, struktur aktif dan pasif dapat mengubah keterlihatan agensi. Pada level modalitas, kata seperti “diduga”, “harus”, “dapat”, “belum”, atau “dipastikan” mengatur tingkat kepastian dan kewajiban. Bentuk-bentuk ini tidak dibaca secara terpisah, melainkan sebagai pola yang berkontribusi pada konstruksi posisi aktor.

Van Leeuwen (2008) menunjukkan bahwa representasi aktor sosial dapat dilakukan melalui inklusi, eksklusi, individualisasi, kolektivisasi, kategorisasi, dan berbagai strategi lain. Kerangka ini relevan karena atribusi tanggung jawab sangat bergantung pada siapa yang dibuat terlihat dan dalam kategori apa. Aktor yang tidak pernah disebut sulit ditempatkan sebagai pihak yang harus menjawab; aktor yang terus diberi otoritas dapat menjadi penentu definisi masalah.

Dengan demikian, tahap representasi menghasilkan keluaran analitis pertama model: peta mengenai bagaimana masalah didefinisikan, siapa yang dihadirkan, tindakan apa yang dilekatkan, dan bagaimana kepastian serta kewajiban dinyatakan. Peta ini belum merupakan kesimpulan tentang tanggung jawab. Ia menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu membaca distribusi agensi dan atribusi.

D. Distribusi Agensi dan Atribusi Tanggung Jawab

Agensi menjawab pertanyaan siapa yang ditempatkan sebagai pihak yang bertindak, menyebabkan, mengalami, menjelaskan, atau mengubah keadaan. Distribusi agensi merupakan jembatan antara representasi dan atribusi tanggung jawab. Ketika satu aktor terus muncul sebagai pelaku tindakan material, ia dapat menjadi kandidat utama atribusi sebab; ketika aktor lain terus muncul sebagai pemberi keputusan atau respons, ia memperoleh agensi institusional yang berbeda.

Model membedakan sekurang-kurangnya dua bentuk agensi: agensi kausal dan agensi responsif. Agensi kausal berkaitan dengan siapa atau apa yang direpresentasikan sebagai

penyebab masalah. Agensi responsif berkaitan dengan siapa yang diberi kapasitas atau kewajiban menangani akibat dan mencegah pengulangan. Pembedaan ini sejalan dengan tinjauan Ji et al. (2025), yang menekankan kebutuhan membedakan atribusi atas penyebab dari tanggung jawab atas penanganan dalam studi komunikasi krisis.

Saurwein et al. (2025) memberikan cara yang sangat kompatibel dengan model ini melalui analisis jaringan tanggung jawab. Pertanyaan "siapa mengatakan siapa bertanggung jawab atas apa" menunjukkan bahwa tanggung jawab bersifat relasional dan dapat didistribusikan di antara media, pemerintah, industri, pakar, serta masyarakat. Model Konstruksi Tanggung Jawab mengadopsi prinsip relasional tersebut tanpa membatasi penerapan pada satu domain isu.

Bovens (2007) menambahkan dimensi keterjawaban. Ketika atribusi bergerak dari penilaian mengenai sebab menuju tuntutan agar aktor menjelaskan dan membenarkan tindakannya di hadapan forum tertentu, hubungan tersebut memasuki ranah akuntabilitas. Fleisher et al. (2025) mengingatkan bahwa tidak semua atribusi moral memiliki kerangka akuntabilitas formal. Karena itu, model menjaga pembedaan antara siapa yang dinilai bertanggung jawab dan siapa yang secara institusional dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hasil tahap ini adalah konfigurasi distribusi tanggung jawab. Peneliti dapat menemukan pola individualisasi, institusionalisasi, difusi, atau pembagian tanggung jawab. Yang penting, kategori tersebut harus lahir dari data. Model tidak mengasumsikan bahwa tanggung jawab struktural selalu lebih benar daripada tanggung jawab individual, melainkan menguji

bagaimana setiap tingkat dihadirkan, dilegitimasi, dan dihubungkan dengan respons.

E. Mekanisme Legitimasi dalam Wacana Pascainsiden

Dalam wacana pascainsiden, atribusi tanggung jawab biasanya membutuhkan dasar yang membuat tuntutan atau respons tertentu tampak sah. Bab sebelumnya mengidentifikasi tiga mekanisme yang sering berguna untuk membaca konfigurasi tersebut: legitimasi formal, moral, dan administratif. Ketiganya tidak diperlakukan sebagai kategori universal, tetapi sebagai hipotesis analitis yang dapat diuji dan diperluas.

Legitimasi formal berhubungan dengan hukum, prosedur, otoritas, laporan, pemeriksaan, dan keputusan. Legitimasi moral berhubungan dengan penderitaan, hak, kerentanan, nilai, atau penilaian mengenai kepatutan. Legitimasi administratif berhubungan dengan kapasitas institusi untuk bertindak, mengklarifikasi, melindungi, mengevaluasi, atau melakukan koreksi. Van Leeuwen (2007) memberikan dasar umum bahwa legitimasi dapat dibangun melalui otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan narasi. Perspektif ini sejalan dengan Suchman (1995), yang memandang legitimasi sebagai pengakuan sosial bahwa tindakan suatu entitas sesuai dengan norma, nilai, dan keyakinan yang berlaku.

Gagrčin (2026) menunjukkan bahwa legitimasi merupakan penilaian kontekstual mengenai siapa yang boleh bertindak dengan otoritas dan kepatutan. Artinya, mekanisme legitimasi tidak hanya menjelaskan mengapa tindakan dianggap benar, tetapi juga mengapa aktor tertentu memperoleh hak untuk

bertindak. Dalam kasus pascainsiden, misalnya, aparat dapat memperoleh legitimasi formal, korban atau keluarga dapat memperoleh legitimasi moral, dan institusi dapat mengklaim legitimasi administratif melalui tindakan korektif.

Steffek (2023) mengingatkan bahwa legitimasi dapat dibaca melalui kepercayaan, diskursus, dan tindakan, yang tidak selalu berjalan searah. Oleh karena itu, model tidak menganggap bahwa legitimasi formal otomatis menghasilkan penerimaan sosial. Sebuah tindakan dapat sah secara prosedural tetapi dipersoalkan secara moral; sebaliknya, tuntutan moral dapat kuat tetapi belum memiliki mekanisme institusional untuk diberlakukan.

Pada penelitian replikasi, tiga mekanisme tersebut berfungsi sebagai titik awal, bukan daftar tertutup. Peneliti dapat menemukan legitimasi ilmiah, religius, ekonomis, profesional, politik, atau komunal. Prinsip invariant model bukan jumlah jenis legitimasi, melainkan kebutuhan untuk menjelaskan dasar apa yang membuat atribusi dan respons memperoleh atau kehilangan pengakuan.

F. Orientasi Makna Publik

Orientasi makna publik merupakan komponen yang menjelaskan bagaimana wacana menyediakan arah interpretasi terhadap tanggung jawab. Komponen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penelitian opini publik. Ia bekerja pada level diskursif: posisi apa yang dibuat tersedia, bentuk respons apa yang dinormalisasi, serta batas-batas argumentasi apa yang tampak semakin diterima atau ditolak dalam arena publik.

Baden et al. (2025) menempatkan opini publik digital sebagai proses negosiasi diskursif yang membatasi rentang pendapat yang secara normatif dianggap dapat diterima. Kerangka ini penting bagi model karena memperbolehkan peneliti membaca struktur opini yang diekspresikan tanpa menganggap bahwa konten digital mewakili distribusi pendapat populasi. Analisis teks dapat menunjukkan negosiasi makna, bukan prevalensi sikap individual.

Orientasi makna juga dibentuk oleh posisi pembicara. Baden et al. (2025) menekankan bahwa kontribusi publik berasal dari pembicara yang terposisikan dan tidak seluruh kontribusi memiliki bobot yang sama. Dalam wacana media, sumber resmi, pakar, korban, aktivis, atau media sendiri membawa modal simbolik berbeda. Karena itu, model membaca tidak hanya "apa yang dikatakan", tetapi "siapa yang membuat klaim dan dengan otoritas apa".

Fu dan Cooper (2022) menunjukkan bahwa visibilitas komunikasi merupakan sumber daya yang sekaligus dapat meningkatkan pengaruh dan pengawasan. Dalam konteks tanggung jawab, visibilitas membuat tuntutan dan respons lebih mudah diamati, tetapi tidak menjamin kesepakatan. Model karena itu menggunakan istilah orientasi, bukan efek, untuk menjaga batas inferensi.

Hasil analisis pada komponen ini berupa peta horizon interpretasi: apakah masalah cenderung dibaca sebagai kesalahan individual, kegagalan institusional, persoalan hukum, penderitaan moral, atau masalah struktural; serta jenis respons apa yang menjadi lebih masuk akal dalam wacana. Peta tersebut selanjutnya dibandingkan dengan respons institusional yang direpresentasikan.

G. Respons Institusional

Respons institusional merupakan komponen yang menghubungkan atribusi tanggung jawab dengan tindakan. Institusi dapat merespons melalui klarifikasi, bantuan, investigasi, permintaan maaf, mediasi, sanksi, evaluasi, atau perubahan kebijakan. Dalam model, yang dianalisis bukan hanya keberadaan tindakan, tetapi fungsi diskursifnya: apa yang diakui, apa yang ditolak, siapa yang dilindungi, dan batas tanggung jawab apa yang dibangun.

Komunikasi krisis menyediakan literatur yang berguna untuk memahami hubungan antara atribusi dan respons. Coombs dan Tachkova (2023) menunjukkan bahwa penilaian krisis melibatkan tidak hanya tanggung jawab kausal, tetapi juga kemarahan moral. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa respons administratif dapat dianggap tidak memadai apabila tidak mengakui dimensi moral dari kerugian yang terjadi.

Fu dan Yang (2025) menemukan bahwa strategi komunikasi dialogis secara umum lebih efektif daripada strategi monologis dalam meningkatkan reputasi selama krisis, meskipun efeknya bergantung pada jenis krisis dan dimediasi oleh empati pemangku kepentingan. Temuan ini penting bukan untuk mengubah model menjadi teori reputasi, melainkan untuk menunjukkan bahwa bentuk komunikasi responsif memengaruhi bagaimana institusi memperoleh kembali pengakuan.

De Fine Licht et al. (2022) juga menunjukkan bahwa legitimasi tidak berhenti pada saat keputusan dibuat. Pengaturan dan penjelasan pascakeputusan dapat memengaruhi penerimaan publik. Dalam model, hal ini menguatkan posisi respons sebagai

proses diskursif yang dapat memperbaiki atau memperburuk legitimasi, bukan sekadar catatan kronologis setelah keputusan.

Namun, model secara tegas membedakan representasi respons dari efektivitas respons. Teks yang menyebut "telah ditindaklanjuti" hanya membuktikan bahwa tindak lanjut direpresentasikan. Untuk menilai efektivitas diperlukan data implementasi, evaluasi, atau pengalaman pihak terdampak. Batas ini penting agar Analisis Wacana Kritis tidak membuat klaim empiris yang melampaui korpus.

H. Akuntabilitas Pascainsiden sebagai Titik Sintesis

Akuntabilitas pascainsiden ditempatkan sebagai titik sintesis khusus ketika model digunakan pada data yang memiliki peristiwa pemicu. Konsep ini menghubungkan representasi, distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, orientasi makna publik, dan respons institusional. Ia bukan tahap yang wajib muncul pada semua penelitian, melainkan konfigurasi yang dapat ditemukan ketika tanggung jawab menguat setelah suatu kasus memperoleh visibilitas.

Bovens (2007) menyediakan kriteria minimal untuk membaca akuntabilitas sebagai relasi keterjawaban: aktor harus memberi penjelasan atau pembenaran kepada forum yang dapat menilai dan menghasilkan konsekuensi. Kerangka ini membantu membedakan wacana yang hanya memuat kritik dari wacana yang mengonstruksi mekanisme keterjawaban secara lebih jelas.

Ji et al. (2025) menunjukkan bahwa atribusi dalam krisis perlu diperluas dari pertanyaan penyebab menuju struktur multiaktor dan tanggung jawab penanganan. Titik sintesis model

karena itu tidak berhenti pada "siapa salah", tetapi juga mencakup "siapa wajib menjawab", "siapa memiliki legitimasi untuk bertindak", dan "respons apa yang dibentuk sebagai memadai".

Yan dan Ramesh (2026) memperingatkan adanya kesenjangan antara mekanisme akuntabilitas yang berfokus pada kepatuhan prosedural dan kebutuhan mempertanggungjawabkan kualitas pilihan serta hasil kebijakan. Peringatan ini penting bagi konsep pascainsiden karena formasi "kasus sedang ditangani" dapat terlihat kuat secara administratif tetapi tetap lemah dalam menjawab kualitas keputusan atau dampak jangka panjang.

Dengan demikian, akuntabilitas pascainsiden berfungsi sebagai hasil sintesis, bukan nama universal model. Pada wacana yang tidak memiliki insiden, model tetap dapat bekerja melalui representasi, agensi, atribusi, legitimasi, respons, dan dimensi struktural tanpa menggunakan kategori pascainsiden. Fleksibilitas ini menjaga model tetap luas sekaligus mempertahankan konsep yang lahir dari konteks empiris awal.

I. Pencegahan Struktural sebagai Dimensi Evaluasi

Pencegahan struktural berfungsi sebagai dimensi evaluatif yang menanyakan sejauh mana wacana bergerak melampaui penanganan akibat. Ia tidak diposisikan sebagai "frame" keempat yang setara dengan legitimasi formal, moral, atau administratif. Fungsi utamanya bersifat diagnostik: apakah teks menghubungkan masalah dengan budaya institusi, sistem pengawasan, tata kelola, relasi kuasa, perlindungan, inklusivitas, atau kondisi lain yang memungkinkan masalah berulang.

Fairclough (2003) menekankan bahwa analisis praktik sosial perlu menghubungkan pola teks dengan struktur dan relasi kekuasaan. Karena itu, pembacaan tanggung jawab yang hanya berhenti pada aktor terdekat dengan insiden dapat menghasilkan gambaran yang terlalu sempit. Dimensi struktural menanyakan apakah tanggung jawab diperluas kepada institusi atau sistem yang memiliki kapasitas mencegah pengulangan.

Metze et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan interpretif seperti analisis wacana dan framing memperhatikan proses *foregrounding* dan *backgrounding* yang memasukkan atau mengeluarkan suara, kepentingan, dan gagasan tertentu. Prinsip ini menjadi dasar untuk membaca pencegahan struktural: tidak hadirnya mekanisme pencegahan dapat menjadi signifikan apabila penanganan reaktif secara konsisten jauh lebih ditonjolkan.

Dimensi struktural tetap kontekstual. Pada pendidikan, ia dapat berupa budaya sekolah, mekanisme pengaduan, *safeguarding*, dan inklusivitas. Pada layanan publik, bentuknya dapat berupa desain prosedur, pengawasan, kapasitas organisasi, atau distribusi sumber daya. Pada teknologi, ia dapat berupa desain sistem, regulasi, audit, dan tata kelola. Karena itu, "pencegahan struktural" pada model harus diterjemahkan sesuai objek penelitian.

Hasil evaluasi struktural tidak dimaksudkan untuk menghakimi bahwa setiap teks harus menyediakan solusi sistemik lengkap. Media memiliki keterbatasan genre dan ruang. Yang dinilai adalah pola pada korpus: apakah tanggung jawab cenderung berhenti pada respons reaktif, atau terdapat ruang yang konsisten untuk membahas kondisi yang harus diubah agar masalah tidak berulang.

J. Relasi Antarkomponen dalam Model

Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab bekerja sebagai jaringan relasional. Alurnya dapat diringkas sebagai berikut: representasi membentuk posisi aktor; posisi tersebut mendistribusikan agensi; distribusi agensi membuka atribusi tanggung jawab; atribusi memperoleh atau kehilangan kekuatan melalui mekanisme legitimasi; legitimasi berhubungan dengan orientasi makna publik dan bentuk respons; kemudian seluruh konfigurasi dievaluasi terhadap dimensi struktural. Pada konteks yang memiliki peristiwa pemicu, hubungan ini dapat menghasilkan formasi akuntabilitas pascainsiden.

Penting untuk menegaskan bahwa panah antarkomponen bersifat analitis, bukan kausal mekanis. Representasi tidak selalu "menyebabkan" atribusi dengan cara linear; legitimasi dapat muncul sebelum atribusi stabil; respons dapat mengubah representasi kasus; dan visibilitas dapat memperluas atau menggeser aktor yang terlibat. Gagrčin (2026) menunjukkan bahwa tanggung jawab dan legitimasi terus dinegosiasikan secara situasional, sehingga hubungan antarkomponen perlu dipahami sebagai rekursif.

Saurwein et al. (2025) juga menunjukkan bahwa jaringan tanggung jawab memiliki konfigurasi pembicara dan subjek yang berbeda menurut domain. Hal ini berarti model tidak menentukan siapa aktor yang harus dominan. Peneliti memetakan relasi dari data, kemudian membandingkan bagaimana konfigurasi tanggung jawab terbentuk. Invariant model terletak pada pertanyaan relasional, bukan pada aktor tertentu.

Dari sisi metodologis, hubungan antarkomponen memungkinkan triangulasi internal. Interpretasi tentang tanggung jawab seharusnya tidak hanya ditopang oleh satu kata, tetapi oleh beberapa jenis bukti: pilihan leksikal, agensi gramatikal, sumber, kutipan, urutan informasi, intertekstualitas, dan konteks sosial. Semakin banyak bukti yang saling menguatkan, semakin kokoh sintesis konseptual.

Dengan demikian, model lebih tepat dibayangkan sebagai arsitektur pembacaan daripada bagan tahap. Peneliti dapat memasuki data melalui representasi, tetapi dapat kembali ke teks setelah menemukan pola legitimasi atau respons. Sifat iteratif ini sejalan dengan tradisi Analisis Wacana Kritis yang menuntut pergerakan terus-menerus antara teks dan konteks (Fairclough, 2003; Machin & Mayr, 2023).

K. Batas Inferensi dan Ruang Interpretasi

Model Analisis Wacana Kritis harus memiliki batas inferensi yang jelas karena kekuatan interpretasi kritis dapat berubah menjadi kelemahan apabila klaim melampaui data. Batas pertama adalah perbedaan antara representasi dan realitas tindakan. Teks dapat menunjukkan bahwa institusi direpresentasikan telah bertindak, tetapi tidak membuktikan bahwa tindakan tersebut efektif. Klaim efektivitas memerlukan data lain.

Batas kedua adalah perbedaan antara orientasi makna publik dan keadaan opini publik. Baden et al. (2025) secara eksplisit menunjukkan masalah epistemologis ketika konten digital diperlakukan sebagai representasi distribusi opini populasi. Model karena itu menggunakan teks untuk membaca negosiasi dan horizon interpretasi, bukan untuk mengukur prevalensi sikap tanpa desain survei atau data khalayak.

Batas ketiga adalah perbedaan antara hubungan diskursif dan kausalitas kebijakan. Teks dapat menunjukkan adanya tuntutan perubahan, keterkaitan dengan regulasi, atau korespondensi antara wacana dan kebijakan. Namun, untuk menyatakan bahwa pemberitaan menyebabkan perubahan kebijakan diperlukan penelusuran proses, dokumen keputusan, wawancara aktor, atau desain kausal lain. Analisis wacana sendiri tidak cukup.

Batas keempat berkaitan dengan intensionalitas. Struktur pasif, penghilangan aktor, atau dominasi sumber resmi dapat memiliki konsekuensi ideologis tanpa harus dibaca sebagai strategi sadar. Fairclough (2003) dan Machin dan Mayr (2023) memungkinkan pembacaan terhadap efek representasional, tetapi peneliti sebaiknya tidak mengatribusikan niat manipulatif kecuali terdapat bukti yang mendukungnya.

Ruang interpretasi tetap penting karena wacana bersifat polisemi dan kontekstual. Model tidak menghapus interpretasi; ia mendisiplinkannya. Interpretasi dianggap kuat ketika didukung bukti tekstual yang berulang, hubungan antardimensi yang koheren, konteks yang dapat diverifikasi, dan batas klaim yang dinyatakan secara eksplisit. Dengan prinsip ini, keterbukaan Analisis Wacana Kritis dapat dipertahankan tanpa mengorbankan ketelitian.

L. Model sebagai Kerangka Analitis yang Terbuka dan Adaptif

Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab dirancang sebagai kerangka terbuka. Keterbukaan berarti komponen inti dipertahankan, tetapi realisasi empirisnya dapat berubah.

Komponen inti tersebut adalah representasi, distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, respons, dan evaluasi struktural. Pada konteks tertentu, akuntabilitas pascainsiden dapat muncul sebagai sintesis; pada konteks lain, sintesisnya dapat berbeda.

Adaptivitas model terletak pada tiga lapisan. Lapisan pertama bersifat invariant: pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab dibentuk. Lapisan kedua bersifat konfigurasional: jenis legitimasi, bentuk respons, dan hubungan aktor dapat berbeda. Lapisan ketiga bersifat kontekstual: penanda linguistik, kebijakan relevan, struktur institusi, dan norma sosial harus disesuaikan dengan domain penelitian. Dengan pembedaan ini, replikasi tidak berarti menyalin kode secara mekanis.

Fleisher et al. (2025) menunjukkan pentingnya membedakan praktik tanggung jawab dari kerangka akuntabilitas karena setiap institusi memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda. Gagrčin (2026) juga menunjukkan bahwa tanggung jawab dan legitimasi bergantung pada konteks tindakan. Kedua kajian tersebut mendukung prinsip bahwa model yang berguna harus memiliki inti yang stabil sekaligus cukup fleksibel untuk menangkap variasi institusional.

Model juga terbuka terhadap falsifikasi dan perluasan. Penelitian baru dapat menunjukkan bahwa hubungan antara representasi dan atribusi tidak berjalan seperti yang diasumsikan, bahwa mekanisme legitimasi lain lebih dominan, atau bahwa dimensi struktural memiliki bentuk yang berbeda. Temuan semacam itu bukan kegagalan penerapan, melainkan mekanisme pengembangan teori. Kerangka yang tidak memungkinkan koreksi akan berubah menjadi skema klasifikasi tertutup.

Karena itu, Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab sebaiknya diposisikan sebagai perangkat analitis untuk membangun pertanyaan yang dapat diuji lintas konteks. Ia mempertahankan kedalaman kritis Fairclough, tetapi menambahkan fokus pada relasi tanggung jawab yang dapat dibandingkan antarwacana. Bab berikutnya akan menjelaskan prinsip replikasi model, termasuk perbedaan antara penerapan, replikasi konseptual, dan pengembangan model agar kerangka ini dapat digunakan secara konsisten tanpa kehilangan sensitivitas terhadap konteks.

BAB 8
PRINSIP REPLIKASI MODEL DALAM PENELITIAN

Bab ini menempatkan replikasi sebagai proses pengujian ulang terhadap klaim konseptual model, bukan sebagai penyalinan mekanis terhadap seluruh prosedur penelitian yang melahirkannya. Pembedaan ini penting bagi model *Membaca Tanggung Jawab dalam Wacana* karena objek yang dianalisis bersifat sosial, historis, dan kontekstual. Replikasi yang bermakna bukanlah usaha memperoleh data yang identik, melainkan menguji apakah hubungan antara representasi, distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, respons, dan dimensi struktural tetap memiliki daya jelaskan ketika dibawa ke konteks lain (Freiling et al., 2021; Nosek & Errington, 2020; Tuval-Mashiach, 2021).

A. Replikasi Konseptual, Bukan Penyalinan Teknis

Replikasi sering disalahpahami sebagai tuntutan untuk mengulang penelitian dengan prosedur yang sama sedekat mungkin. Pemahaman tersebut lebih dekat dengan replikasi langsung. Nosek dan Errington (2020) menawarkan definisi yang lebih luas: sebuah penelitian dapat disebut replikasi apabila hasil apa pun dari penelitian tersebut menjadi bukti diagnostik bagi klaim yang telah dibuat sebelumnya. Dengan orientasi ini, pusat

replikasi terletak pada klaim yang diuji, bukan pada kemiripan prosedur semata.

Freiling et al. (2021) membedakan replikasi langsung yang mempertahankan konsep dan prosedur operasional dengan replikasi konseptual yang mempertahankan pertanyaan konseptual tetapi dapat menggunakan prosedur, pengukuran, atau kondisi yang berbeda. Bagi penelitian wacana, bentuk kedua lebih relevan karena teks, institusi, media, dan konteks sosial tidak pernah benar-benar identik. Perubahan konteks bahkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang batas suatu konsep.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perdebatan dalam penelitian kualitatif. Pratt et al. (2020) mengingatkan bahwa mengikat keterpercayaan penelitian kualitatif secara terlalu ketat pada replikasi dapat mengabaikan kekuatan metodologis penelitian yang memang bertujuan memahami konteks secara mendalam. Tuval-Mashiach (2021) juga mempertanyakan penggunaan replikasi dalam pengertian positivistik untuk penelitian kualitatif dan mendorong pemahaman yang lebih sesuai dengan sifat interpretatif dan kontekstual data.

Karena itu, replikasi model dalam buku ini didefinisikan sebagai pengujian ulang atas relasi konseptual inti dengan data baru. Peneliti tidak wajib memakai jumlah teks, jenis media, kode leksikal, atau susunan sumber yang sama. Yang harus dipertahankan adalah pertanyaan konseptual mengenai bagaimana realitas direpresentasikan, bagaimana agensi dan tanggung jawab didistribusikan, bagaimana tanggung jawab dilegitimasi, respons apa yang dinormalisasi, dan dimensi struktural apa yang tampak atau terpinggirkan.

Replikasi konseptual juga berarti bahwa hasil yang berbeda tetap bernilai. Jika penelitian baru tidak menemukan legitimasi formal, moral, dan administratif dalam konfigurasi yang sama, hasil tersebut bukan kegagalan. Ia dapat menunjukkan bahwa konfigurasi awal bersifat kontekstual atau bahwa terdapat mekanisme legitimasi lain. Dalam pengertian Nosek et al. (2022), replikasi menjadi sarana memperbaiki teori karena konsistensi maupun ketidakkonsistenan sama-sama dapat menghasilkan pengetahuan.

Dengan demikian, replikasi model tidak bertujuan menghasilkan salinan dari penelitian pertama. Tujuannya adalah menguji daya tahan, batas, dan elastisitas konseptual model. Prinsip ini menjadikan penelitian lanjutan sebagai kesempatan untuk mendukung, menyanggah, memperhalus, atau memperluas hubungan yang telah dirumuskan.

B. Prinsip Kesepadanan Masalah dan Konteks

Replikasi konseptual hanya bermakna apabila terdapat kesepadanan masalah antara penelitian asal dan penelitian baru. Kesepadanan tidak berarti kesamaan objek. Penelitian perundungan, kegagalan layanan publik, konflik lingkungan, krisis korporasi, kontroversi teknologi, atau kekerasan institusional dapat menggunakan model yang sama apabila semuanya mengandung persoalan mengenai aktor, kewajiban, legitimasi, respons, dan struktur.

Drisko (2025) menjelaskan transferabilitas sebagai proses abstraksi yang memungkinkan informasi dari orang, tempat, atau masa tertentu digunakan untuk memahami konteks lain. Gagasan ini penting karena pemindahan model tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kemiripan permukaan. Peneliti harus menilai

unsur apa yang cukup serupa untuk memungkinkan transfer dan unsur apa yang berbeda sehingga membutuhkan penyesuaian.

Kesepadanan masalah dapat diperiksa melalui fungsi konseptual. Misalnya, pada penelitian perundungan, korban merupakan aktor terdampak, sekolah merupakan institusi yang memiliki kewajiban perlindungan, dan negara dapat tampil sebagai otoritas formal. Pada kasus pencemaran lingkungan, aktor terdampak dapat berupa komunitas, institusi dapat berupa perusahaan, dan otoritas formal dapat berupa regulator. Identitas aktornya berbeda, tetapi fungsi relasionalnya dapat sepadan.

Konteks tetap harus diperlakukan sebagai komponen analitis, bukan gangguan yang harus dihilangkan. Freiling et al. (2021) menekankan bahwa variabilitas pada kajian komunikasi dapat mencerminkan perubahan budaya, media, dan kondisi sosial yang memang membentuk objek penelitian. Oleh karena itu, perbedaan hasil antarpenelitian tidak dapat langsung dipahami sebagai ketidakandalan model.

Kesepadanan juga memiliki batas. Model tidak tepat digunakan apabila penelitian tidak mengandung persoalan tanggung jawab atau legitimasi. Memaksakan model pada data yang hanya mendeskripsikan gaya bahasa tanpa relasi aktor dan kewajiban akan membuat model kehilangan fungsi teoretisnya. Replikasi yang baik dimulai dari kecocokan pertanyaan, bukan dari keinginan menggunakan model.

Prinsip ini menghasilkan aturan sederhana: konteks boleh berbeda sejauh masalah konseptual tetap dapat dibandingkan. Peneliti perlu menjelaskan alasan kesepadanan tersebut sebelum analisis dilakukan sehingga penggunaan model dapat dinilai secara transparan oleh pembaca.

C. Prinsip Identifikasi Aktor dan Distribusi Tanggung Jawab

Komponen yang paling stabil dalam model adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi aktor dan relasi tanggung jawab. Model tidak mensyaratkan daftar aktor yang sama, tetapi mensyaratkan adanya pembacaan tentang siapa yang dihadirkan, siapa yang memperoleh agensi, siapa yang menjadi objek tindakan, siapa yang memberi penilaian, dan siapa yang dituntut merespons.

Saurwein et al. (2025) menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam wacana media dapat dipetakan sebagai jaringan: siapa berbicara, siapa menuntut siapa, dan objek tanggung jawab apa yang dipersoalkan. Pendekatan jaringan semacam ini mendukung model karena tanggung jawab jarang bergerak melalui satu garis kausal sederhana. Beberapa aktor dapat memiliki fungsi yang berbeda dalam penyebab, penilaian, penanganan, dan pencegahan.

Ji et al. (2025) juga mendorong pendekatan multiaktor dalam penelitian atribusi krisis dan menekankan pentingnya membedakan tanggung jawab atas penyebab dengan tanggung jawab atas penanganan. Pembedaan ini harus dipertahankan dalam replikasi model. Pihak yang dianggap menyebabkan masalah tidak selalu sama dengan pihak yang memiliki kewajiban memperbaikinya.

Kategori aktor harus muncul dari konteks. Model dapat menyediakan fungsi awal seperti aktor terdampak, aktor penyebab, aktor penjelas, aktor resmi, dan aktor responsif, tetapi kategori tersebut bukan label yang harus dipaksakan. Jika data menunjukkan konfigurasi lain, kategori perlu disesuaikan.

Analisis juga harus mempertimbangkan ketidakhadiran. Aktor yang memiliki kewenangan struktural tetapi hampir tidak hadir dapat menjadi temuan penting. Sebaliknya, aktor yang sangat sering tampil belum tentu memiliki agensi tinggi apabila hanya dibicarakan oleh pihak lain.

Karena itu, prinsip replikasinya bukan "temukan aktor yang sama", melainkan "temukan struktur aktornya". Yang diuji adalah apakah distribusi representasional dan agensi membantu menjelaskan bagaimana tanggung jawab dibentuk dalam konteks baru.

D. Prinsip Pembacaan Mekanisme Legitimasi

Legitimasi merupakan komponen inti karena atribusi tanggung jawab membutuhkan dasar pengakuan. Namun, replikasi model tidak mensyaratkan bahwa legitimasi selalu hadir dalam tiga bentuk yang sama. Legitimasi formal, moral, dan administratif merupakan konfigurasi awal yang ditemukan dan dikembangkan dalam penelitian yang melatarbelakangi model.

Gagrčin (2026) membedakan tanggung jawab sebagai sisi kewajiban dan legitimasi sebagai sisi pengakuan mengenai siapa yang layak atau berwenang bertindak. Pembedaan tersebut dapat digunakan lintas konteks. Setiap penelitian replikasi perlu menanyakan bukan hanya siapa yang diwajibkan bertindak, tetapi juga dasar apa yang membuat tindakan atau kewenangan tersebut dianggap sah.

Kerangka van Leeuwen (2007) tetap relevan sebagai sumber konseptual karena menunjukkan bahwa legitimasi dapat dibangun melalui otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan narasi. Kategori tersebut tidak identik dengan tiga mekanisme

dalam model, tetapi membantu peneliti mengenali sumber pembenaran yang mungkin muncul dalam data.

Fife dan Gossner (2024) menunjukkan bahwa analisis kualitatif deduktif dapat menggunakan teori awal sebagai konstruk peka, kemudian menilai bukti yang mendukung, menyanggah, memperhalus, atau memperluas teori. Prinsip ini tepat untuk mekanisme legitimasi. Formal, moral, dan administratif dapat dipakai sebagai titik awal, tetapi peneliti harus membuka ruang bagi bukti negatif atau kategori baru.

Pembacaan legitimasi juga harus membedakan antara keberadaan dan dominasi. Sebuah teks dapat mengandung dasar hukum, penderitaan korban, dan tindakan institusi sekaligus. Pertanyaan berikutnya adalah mekanisme mana yang memiliki fungsi terbesar dalam mengarahkan atribusi dan respons.

Dengan demikian, replikasi yang baik tidak dinilai dari keberhasilan menemukan tiga mekanisme yang sama. Ia dinilai dari ketepatan peneliti menguji apakah ketiga mekanisme tersebut berlaku, berubah, bertumpang tindih, atau perlu diperluas dalam konteks baru.

E. Prinsip Pembacaan Respons Pascainsiden

Respons pascainsiden merupakan komponen kontekstual, bukan syarat universal model. Ia hanya relevan apabila data memang berangkat dari peristiwa, krisis, kegagalan, konflik, atau kejadian yang memicu tuntutan penanganan. Pada wacana yang bersifat preventif atau prospektif, peneliti tidak perlu memaksakan kategori pascainsiden.

Jika konteks memiliki insiden, analisis respons perlu membedakan antara representasi tindakan dan efektivitas tindakan. Teks dapat menyatakan bahwa institusi melakukan investigasi, pendampingan, klarifikasi, atau evaluasi, tetapi pernyataan tersebut hanya membuktikan bagaimana tindakan direpresentasikan. Efektivitas memerlukan data tambahan.

Ji et al. (2025) menekankan pentingnya *treatment responsibility*, yakni tanggung jawab untuk menangani akibat atau penyelesaian. Konsep ini membantu penelitian replikasi membedakan atribusi penyebab dari atribusi penanganan. Institusi yang tidak diposisikan sebagai penyebab tetap dapat memiliki kewajiban responsif.

Respons juga perlu dibaca sebagai praktik legitimasi. Institusi dapat menggunakan respons untuk menunjukkan kepatuhan, empati, kapasitas, atau niat korektif. Oleh karena itu, tindakan pascainsiden harus dihubungkan dengan pertanyaan mengenai apa yang diakui, apa yang ditolak, dan tanggung jawab apa yang dipenuhi atau masih dibiarkan terbuka.

Replikasi tidak mensyaratkan jenis respons yang sama. Pada pendidikan dapat muncul pendampingan dan sanksi; pada kesehatan dapat muncul audit dan pemulihan klinis; pada korporasi dapat muncul kompensasi dan perubahan prosedur; pada teknologi dapat muncul penarikan sistem dan pembaruan tata kelola.

Prinsip utamanya adalah fungsi respons, bukan bentuk permukaannya. Peneliti perlu mengidentifikasi bagaimana respons memindahkan posisi aktor, membentuk legitimasi, dan menentukan apakah masalah direpresentasikan sebagai telah, sedang, atau belum ditangani.

F. Prinsip Evaluasi Pencegahan Struktural

Dimensi struktural digunakan untuk menguji sejauh mana wacana bergerak melampaui penanganan akibat. Dalam penelitian awal, dimensi ini tampak sebagai pencegahan struktural. Pada penelitian replikasi, bentuknya dapat berbeda menurut domain, tetapi fungsi analitisnya tetap sama: menanyakan kondisi sistemik apa yang memungkinkan masalah dan apakah kondisi tersebut memperoleh perhatian.

Evaluasi struktural tidak mengharuskan setiap teks membahas pencegahan. Berita singkat mungkin memang berfokus pada perkembangan kasus. Namun, ketika sejumlah teks dibaca sebagai korpus, pola ketidakhadiran dapat menjadi signifikan apabila respons pascaperistiwa sangat dominan sementara tata kelola, budaya, mekanisme deteksi, distribusi sumber daya, atau struktur kuasa hampir tidak muncul.

Model harus menjaga dimensi struktural sebagai pertanyaan diagnostik, bukan sebagai kategori yang harus selalu memperoleh nilai positif atau negatif. Tujuannya bukan menghakimi setiap teks, tetapi mengidentifikasi batas tanggung jawab yang dibangun oleh wacana.

Damschroder et al. (2022), meskipun bergerak dalam ilmu implementasi, menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual secara sistematis ketika sebuah kerangka digunakan pada lingkungan yang berbeda. Prinsip tersebut sejalan dengan model ini: struktur organisasi, lingkungan eksternal, aktor, dan proses harus dipertimbangkan agar model tidak mereduksi permasalahan pada perilaku individual.

Dimensi struktural harus diterjemahkan ke bahasa domain. Pencegahan pada isu lingkungan dapat berarti regulasi dan pengawasan; pada kesehatan berarti keselamatan sistem; pada teknologi berarti audit, desain, dan tata kelola; pada layanan publik berarti mekanisme pengaduan dan akuntabilitas birokrasi. Karena itu, yang direplikasi adalah fungsi evaluatifnya: apakah wacana memperluas tanggung jawab ke kondisi yang memungkinkan masalah atau berhenti pada respons terhadap akibat yang terlihat.

G. Fleksibilitas Konfigurasi Formal, Moral, dan Administratif

Model mengakui bahwa legitimasi formal, moral, dan administratif tidak harus memiliki bobot yang sama. Fleksibilitas konfigurasi merupakan bagian dari desain model, bukan kelemahan. Dominasi yang berbeda justru dapat membantu menjelaskan karakter suatu domain.

Dalam isu kriminalitas, legitimasi formal dapat lebih menonjol melalui penyelidikan dan prosedur hukum. Dalam isu kesehatan, penderitaan dan kewenangan medis dapat memperkuat legitimasi moral dan profesional. Dalam krisis organisasi, respons administratif dapat menjadi pusat karena organisasi perlu menunjukkan kemampuan mengelola masalah.

Variasi ini sejalan dengan pandangan Freiling et al. (2021) bahwa variabilitas tidak selalu merupakan musuh kualitas ilmiah. Pada fenomena komunikasi yang dipengaruhi budaya, teknologi, dan institusi, variasi antarpenelitian dapat menjadi informasi mengenai kondisi batas sebuah teori.

Fife dan Gossner (2024) menempatkan bukti yang menyimpang atau kasus negatif sebagai sumber penting dalam penyempurnaan teori. Karena itu, ketika replikasi menemukan bahwa salah satu mekanisme hampir tidak berfungsi, temuan tersebut harus dianalisis, bukan dikoreksi agar sesuai dengan model awal.

Fleksibilitas tidak berarti kategori bebas digunakan tanpa definisi. Peneliti tetap harus menjelaskan indikator konseptual yang membuat suatu praktik dibaca sebagai formal, moral, atau administratif. Fleksibilitas berada pada konfigurasi, bukan pada ketidakjelasan konsep.

Dengan prinsip ini, model mempertahankan keseimbangan antara stabilitas dan keterbukaan. Tiga mekanisme menyediakan komparabilitas lintas penelitian, tetapi proporsi, interaksi, serta kekuatan masing-masing harus ditentukan oleh data.

H. Kemungkinan Munculnya Mekanisme Legitimasi Tambahan

Replikasi konseptual harus memungkinkan munculnya mekanisme legitimasi yang tidak tersedia dalam formulasi awal. Menutup kategori terlalu cepat akan mengubah model menjadi skema verifikasi, bukan perangkat analitis. Keterbukaan terhadap kategori baru merupakan syarat agar model dapat berkembang.

Fife dan Gossner (2024) menekankan bahwa teori awal dalam analisis kualitatif dapat diperlakukan sebagai konstruk peka yang kemudian diperluas atau direvisi berdasarkan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memulai dengan formal, moral, dan administratif tanpa menjadikan ketiganya sebagai satu-satunya kemungkinan.

Pada konteks tertentu dapat muncul legitimasi ilmiah, yaitu ketika kewenangan pengetahuan dan bukti ilmiah menjadi dasar utama. Pada konteks religius dapat muncul legitimasi berbasis nilai dan otoritas keagamaan. Pada konteks komunitas dapat muncul legitimasi komunal melalui tradisi, adat, atau konsensus lokal. Pada ekonomi dapat muncul legitimasi pragmatis melalui efisiensi dan manfaat.

Gagrčin (2026) menunjukkan bahwa penilaian legitimasi sangat bergantung pada konteks, norma, posisi aktor, ruang, dan waktu. Artinya, apa yang dianggap sah pada satu arena tidak otomatis memiliki kekuatan yang sama di arena lain.

Mekanisme baru harus ditambahkan dengan disiplin konseptual. Peneliti perlu menunjukkan bahwa kategori tersebut memiliki sumber pengakuan yang berbeda, berfungsi secara konsisten dalam data, dan tidak sekadar merupakan variasi istilah dari kategori yang sudah ada.

Jika mekanisme tambahan berulang pada beberapa penelitian, model dapat mengalami perluasan teoretis. Dengan demikian, replikasi berfungsi bukan hanya menguji daya tahan model, tetapi juga menyediakan jalur pengembangan konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan.

I. Adaptasi pada Korpus, Media, dan Konteks yang Berbeda

Model tidak dibatasi pada berita daring. Ia dapat diterapkan pada media cetak, televisi, media sosial, dokumen kebijakan, pidato, laporan organisasi, pernyataan pers, forum digital, atau korpus multimodal selama data memuat proses representasi dan atribusi tanggung jawab.

Machin dan Mayr (2023) menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis kontemporer dapat bekerja dengan teks, gambar, media sosial, dokumen institusional, infografik, dan materi multimodal. Adaptasi media karena itu membutuhkan penyesuaian unit analisis tanpa mengubah pertanyaan konseptual inti.

Pada korpus multimodal, representasi tidak hanya dibaca melalui leksikon dan gramatika, tetapi juga komposisi visual, ukuran, posisi, tatapan, warna, atau hubungan teks-gambar. Pada media sosial, komentar, kurasi, *thread*, *reshare*, dan affordance *platform* dapat menjadi bagian dari praktik diskursus.

Damschroder et al. (2022) memberi contoh tentang bagaimana sebuah kerangka dapat diperbarui berdasarkan umpan balik pengguna dan konteks implementasi. Walaupun berasal dari bidang berbeda, prinsip ini menunjukkan bahwa adaptasi kerangka sebaiknya terdokumentasi: komponen apa yang dipertahankan, diubah, ditambahkan, atau dihilangkan harus dijelaskan.

Schöch (2023) juga menekankan perlunya terminologi transparan untuk membedakan berbagai bentuk penelitian berulang berdasarkan pertanyaan, data, metode, tim, dan hasil. Prinsip tersebut relevan untuk adaptasi model ini karena peneliti harus menjelaskan sejauh mana penelitian baru merupakan aplikasi, replikasi konseptual, reanalisis, atau ekstensi.

Adaptasi yang baik menjaga identitas konseptual model sambil menyesuaikan material empiris. Model tetap dikenali melalui alur representasi, agensi, tanggung jawab, legitimasi, respons, dan struktur, sedangkan teknik pengumpulan dan pembacaan data mengikuti karakter media.

J. Batas Replikasi dan Keharusan Uji Empiris

Tidak semua keberhasilan penerapan model dapat disebut replikasi. Jika peneliti hanya menggunakan istilah model untuk mengorganisasikan pembahasan tanpa menguji relasi antarkomponennya, penelitian tersebut lebih tepat disebut aplikasi. Replikasi membutuhkan peluang bagi data untuk mendukung maupun menantang klaim yang berasal dari model.

Nosek dan Errington (2020) menegaskan bahwa hasil replikasi harus bersifat diagnostik terhadap klaim sebelumnya. Prinsip ini berarti penelitian lanjutan harus memungkinkan kemungkinan bahwa model tidak bekerja secara memadai pada konteks tertentu. Jika hasil apa pun selalu dianggap mendukung model, model menjadi tidak dapat diuji.

Nosek et al. (2022) juga membedakan replikabilitas, ketahanan, dan reproduksibilitas. Dalam penelitian wacana, ketahanan konseptual dapat diuji melalui perubahan korpus, konteks, atau teknik analisis, sedangkan reproduksibilitas dapat ditingkatkan melalui transparansi dokumentasi analisis. Kedua tujuan tersebut tidak identik.

Pratt et al. (2020) mengingatkan bahwa standar replikasi tidak boleh mengorbankan kekuatan interpretatif penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, keharusan uji empiris dalam model ini bukan tuntutan memperoleh interpretasi identik, melainkan kewajiban menunjukkan jejak analisis yang membuat pembaca dapat memahami bagaimana suatu kesimpulan dibentuk.

Replikasi juga memiliki batas temporal. Perubahan teknologi, regulasi, budaya media, dan norma sosial dapat mengubah hubungan antaraktor. Freiling et al. (2021) menunjukkan bahwa perubahan lingkungan komunikasi

membuat ekspektasi terhadap replikabilitas sempurna menjadi tidak realistis dan bahkan berpotensi menutup pengetahuan mengenai perubahan sosial.

Karena itu, hasil yang tidak konsisten harus dibaca sebagai kesempatan untuk menentukan kondisi batas. Pertanyaan yang relevan bukan hanya "apakah model terulang?", tetapi "dalam kondisi apa hubungan konseptual tertentu muncul, melemah, berubah, atau tidak berlaku?"

K. Kriteria Koherensi dalam Penggunaan Model

Fleksibilitas model membutuhkan kriteria koherensi agar adaptasi tidak membuat model kehilangan identitas. Kriteria pertama adalah koherensi pertanyaan: penelitian harus benar-benar menyelidiki konstruksi tanggung jawab, bukan sekadar meminjam istilah.

Kriteria kedua adalah koherensi konsep. Representasi, agensi, atribusi, legitimasi, respons, dan struktur harus didefinisikan secara konsisten. Istilah dapat disesuaikan dengan domain, tetapi fungsi analitisnya tidak boleh berubah tanpa penjelasan.

Kriteria ketiga adalah koherensi data. Klaim pada tingkat teks harus memiliki bukti tekstual; klaim mengenai produksi wacana membutuhkan data atau konteks produksi; klaim mengenai respons khalayak membutuhkan data khalayak. Model tidak menghapus batas inferensi yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kriteria keempat adalah koherensi interpretasi. Naeem et al. (2023) menekankan bahwa pengembangan model konseptual dari data membutuhkan hubungan yang dapat ditelusuri dari temuan, tema, interpretasi, hingga konseptualisasi. Prinsip keterlacakan ini relevan bagi AWK meskipun teknik analisisnya berbeda.

Kriteria kelima adalah koherensi refleksif. Fife dan Gossner (2024) mengingatkan bahwa peneliti harus mempertimbangkan asumsi epistemologis dan ontologis ketika menggunakan teori untuk membaca data. Dalam AWK, posisi kritis peneliti perlu dinyatakan agar interpretasi tidak dipresentasikan sebagai pembacaan yang sepenuhnya netral.

Koherensi tidak berarti keseragaman prosedur. Ia berarti adanya hubungan yang masuk akal antara pertanyaan, konsep, data, metode, dan kesimpulan. Dengan kriteria ini, dua penelitian dapat menggunakan teknik berbeda tetapi tetap dapat dibandingkan sebagai replikasi konseptual dari model yang sama.

L. Posisi Model sebagai Kerangka untuk Penelitian Lanjutan

Posisi akhir model bukan sebagai teori yang telah selesai, melainkan sebagai kerangka analitis yang menyediakan seperangkat relasi untuk diuji. Status ini penting karena model lahir dari konteks empiris tertentu dan perlu memperoleh legitimasi teoretis melalui penggunaan lintas kasus, lintas media, dan lintas domain.

Köhler et al. (2025) menunjukkan nilai *qualitative restudies* untuk meninjau kembali dan merumuskan ulang teori yang telah dibangun dari konteks sebelumnya. Mereka menempatkan studi

ulang bukan sekadar verifikasi, tetapi sebagai sarana *retheorizing*. Prinsip ini sangat sesuai dengan arah pengembangan model: penelitian lanjutan harus diberi ruang untuk mengubah teori, bukan hanya mengonfirmasinya.

Drisko (2025) menekankan bahwa transferabilitas bergantung pada proses abstraksi dan penilaian kesesuaian antara konteks asal dan konteks baru. Karena itu, perluasan model sebaiknya dibangun melalui akumulasi studi yang transparan mengenai konteks, bukan melalui klaim universal yang dibuat sejak awal.

Schöch (2023) memperlihatkan bahwa penelitian berulang dapat mencakup replikasi, revisi, reanalisis, reinvestigasi, dan penggunaan ulang. Dalam program penelitian terhadap model ini, kelima bentuk tersebut dapat memiliki fungsi berbeda: replikasi menguji klaim; revisi memperbaiki konsep; reanalisis membaca data lama dengan pertanyaan baru; reinvestigasi kembali ke fenomena; dan penggunaan ulang membawa konsep ke objek yang berbeda.

Secara programatik, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada tiga jalur. Jalur pertama adalah replikasi konseptual pada kasus berbeda dalam domain yang sama. Jalur kedua adalah transfer lintas domain untuk menguji apakah struktur tanggung jawab tetap bekerja. Jalur ketiga adalah ekstensi teoretis yang menambahkan mekanisme, hubungan, atau kondisi batas berdasarkan bukti baru.

Dengan posisi ini, nilai model tidak ditentukan oleh seberapa sering penelitian berikutnya menghasilkan konfigurasi identik. Nilainya ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan pertanyaan yang dapat diuji, perbandingan yang bermakna, dan

penyempurnaan teori. Model yang terbuka terhadap koreksi memiliki peluang lebih besar menjadi program penelitian daripada model yang hanya mencari konfirmasi.

BAB 9
RUANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MODEL

Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab dirancang sebagai kerangka analitis yang dapat dipindahkan ke berbagai domain selama data memperlihatkan relasi antara representasi, agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, respons, dan struktur. Karena itu, keluasan penerapan model tidak ditentukan oleh kesamaan objek dengan penelitian awal, tetapi oleh kesepadanan masalah konseptual. Bab ini membahas kemungkinan penerapan tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap pemindahan model harus mempertahankan disiplin konteks, batas inferensi, dan keterbukaan terhadap konfigurasi baru (Fairclough, 2003; Gagrčin, 2026; Machin & Mayr, 2023).

A. Penerapan pada Wacana Pendidikan

Wacana pendidikan merupakan ruang penerapan yang dekat dengan konteks awal pengembangan model karena institusi pendidikan selalu melibatkan distribusi peran, kewenangan, perlindungan, evaluasi, serta tanggung jawab. Sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dinas pendidikan, dan negara dapat muncul sebagai aktor yang memiliki jenis agensi berbeda. Model dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana kebijakan, berita, pernyataan institusi, atau percakapan digital membentuk posisi setiap aktor tersebut.

Pada isu perundungan, misalnya, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa masalah tidak cukup dipahami sebagai perilaku individual. McCoy et al. (2026) menempatkan perundungan sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, keluarga, kebijakan, dan karakteristik peserta didik. Temuan ini memperkuat pentingnya dimensi struktural dalam model, khususnya ketika wacana media cenderung memusatkan perhatian pada pelaku, korban, atau respons setelah kejadian.

Model juga dapat digunakan untuk topik lain seperti kekerasan guru, kecelakaan sekolah, pelanggaran akademik, ketimpangan akses, penggunaan kecerdasan artifisial dalam pendidikan, atau konflik kurikulum. Pada setiap topik, peneliti dapat mengidentifikasi siapa yang memperoleh hak menjelaskan, siapa yang diposisikan sebagai pihak terdampak, serta dasar legitimasi apa yang digunakan untuk membenarkan kebijakan atau tindakan.

Penerapan pada pendidikan sebaiknya tidak membatasi data pada berita. Dokumen kebijakan, surat edaran, pernyataan sekolah, unggahan media sosial, materi kampanye, dan komunikasi organisasi dapat ditempatkan sebagai korpus yang saling melengkapi. Analisis lintas jenis teks memungkinkan peneliti membandingkan apakah atribusi tanggung jawab berubah ketika isu bergerak dari ruang media ke ruang institusional.

Nilai utama penerapan model pada pendidikan terletak pada kemampuannya membedakan tanggung jawab individual, institusional, dan struktural. Pembedaan tersebut membantu mencegah analisis berhenti pada pertanyaan siapa yang melakukan kesalahan dan mengarahkannya pada pertanyaan

siapa yang memiliki kewajiban mencegah, melindungi, memperbaiki, serta menjelaskan.

B. Penerapan pada Wacana Kekerasan dan Perlindungan Anak

Wacana kekerasan dan perlindungan anak memiliki sensitivitas tinggi karena anak dapat sekaligus diposisikan sebagai korban, subjek hak, pihak yang dianggap rentan, dan aktor yang suaranya dibatasi oleh pertimbangan perlindungan. Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab dapat membantu membaca ketegangan antara perlindungan dan agensi tersebut tanpa menganggap bahwa visibilitas anak selalu identik dengan pemberdayaan.

Lögdberg et al. (2026) menunjukkan bahwa dokumen kebijakan kesehatan publik di Swedia dan Norwegia masih dapat merepresentasikan anak terutama sebagai pasif, bergantung, dan rentan meskipun terdapat komitmen terhadap kesetaraan dan partisipasi. Temuan ini relevan bagi model karena representasi kerentanan dapat memperkuat legitimasi moral untuk melindungi anak, tetapi pada saat yang sama dapat mempersempit ruang anak sebagai aktor yang memiliki suara.

Dalam ekosistem digital, tanggung jawab perlindungan anak juga tersebar di antara keluarga, *platform*, negara, industri, sekolah, dan masyarakat. Baker et al. (2026) menunjukkan bahwa tanggung jawab digital terhadap kesejahteraan remaja diperdebatkan secara terbuka dalam forum kebijakan dan dapat dinegosiasikan melalui bahasa yang menguatkan, mengurangi, atau mengalokasikan kembali kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan arena tanggung jawab multiaktor.

Penerapan model pada kasus kekerasan seksual, eksploitasi digital, perundungan siber, pekerja anak, atau *kidfluencer* harus mempertimbangkan batas etik representasi. Analisis dapat menguji siapa yang berbicara untuk anak, apakah suara anak hadir langsung, dan bagaimana anonimisasi, diagnosis, atau kategori kerentanan memengaruhi atribusi tanggung jawab.

Dimensi struktural menjadi penting karena perlindungan tidak cukup diukur dari respons setelah kerugian terjadi. Model dapat menguji apakah wacana mengarah pada desain keselamatan, mekanisme pengaduan, regulasi *platform*, pendidikan literasi, perlindungan data, atau perubahan kebijakan. Dengan cara ini, anak tidak hanya hadir sebagai pusat penderitaan, tetapi juga sebagai subjek hak dalam sistem perlindungan.

C. Penerapan pada Wacana Kesehatan dan Layanan Publik

Wacana kesehatan dan layanan publik sangat sesuai untuk menguji model karena tanggung jawab dapat tersebar antara individu, tenaga profesional, organisasi layanan, pemerintah, dan struktur sosial. Bahasa kesehatan sering membawa kewenangan epistemik yang kuat, sementara wacana layanan publik membawa kewenangan administratif. Kombinasi ini memungkinkan penelitian mengenai bagaimana legitimasi ilmiah, moral, formal, dan administratif saling berhubungan.

Okuhara et al. (2026) mengembangkan konsep *health literacy reductionism* untuk menjelaskan kecenderungan menerjemahkan masalah komunikasi, partisipasi, dan keterlibatan menjadi kekurangan literasi kesehatan individu,

sementara faktor relasional, organisasi, dan struktural menjadi kurang terlihat. Gagasan tersebut sangat dekat dengan dimensi struktural model karena memperlihatkan bagaimana tanggung jawab dapat bergeser secara tidak proporsional kepada pasien atau publik.

Lögdberg et al. (2026) memperlihatkan bahwa bahasa kebijakan kesehatan tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga membentuk subjek. Anak dapat dibingkai sebagai pihak yang harus dilindungi, sebagai investasi masa depan, atau sebagai pemegang hak yang berpartisipasi. Karena itu, model dapat digunakan untuk membaca bagaimana kebijakan layanan publik mendistribusikan agensi sekaligus legitimasi.

Penerapan lain dapat mencakup wacana malapraktik, keselamatan pasien, antrean layanan, vaksinasi, kegagalan sistem kesehatan, atau komunikasi risiko. Peneliti dapat membedakan tanggung jawab kausal dari tanggung jawab penanganan: kegagalan mungkin terjadi pada satu titik layanan, tetapi kewajiban perbaikan dapat melekat pada organisasi atau pembuat kebijakan.

Pada domain kesehatan, model harus menghindari reduksi yang sama seperti yang dikritik oleh Okuhara et al. (2026). Diagnosis, perilaku pasien, dan kepatuhan tidak boleh menjadi satu-satunya titik analisis. Pertanyaan mengenai desain layanan, akses, kepercayaan, prosedur, distribusi sumber daya, serta kualitas komunikasi harus ditempatkan sebagai bagian dari struktur tanggung jawab.

D. Penerapan pada Wacana Krisis Institusional

Krisis institusional terjadi ketika organisasi menghadapi peristiwa atau tuduhan yang mengganggu legitimasi, kepercayaan, atau kapasitasnya untuk menjalankan fungsi. Dalam situasi semacam ini, model dapat digunakan untuk membaca pergeseran posisi institusi dari aktor yang dipersoalkan menjadi aktor yang menjelaskan, merespons, atau berusaha memulihkan legitimasi.

Coombs dan Tachkova (2023) menunjukkan bahwa atribusi tanggung jawab dalam komunikasi krisis perlu dibaca bersama penilaian moral, termasuk kemarahan moral. Artinya, sebuah respons yang memadai secara prosedural dapat tetap dianggap tidak cukup ketika publik melihat adanya pelanggaran nilai. Relasi formal-moral-administratif dalam model menjadi sangat relevan pada titik ini.

Ji et al. (2025), melalui tinjauan sistematis atas penelitian atribusi dalam komunikasi krisis, mendorong pembedaan antara tanggung jawab terhadap penyebab dan tanggung jawab terhadap penanganan. Model dapat mengoperasionalkan pembedaan tersebut secara diskursif dengan melihat siapa yang diposisikan sebagai penyebab, siapa yang harus menjelaskan, dan siapa yang dianggap wajib memperbaiki.

Krisis institusional dapat dianalisis pada sekolah, universitas, rumah sakit, lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, federasi olahraga, atau lembaga non-profit. Jenis institusi akan mengubah sumber legitimasi dan bentuk respons, tetapi relasi dasar antara representasi masalah, distribusi agensi, atribusi, legitimasi, dan respons tetap dapat diuji.

Pada domain ini, dimensi struktural berguna untuk membedakan pengelolaan krisis dari perubahan institusional. Klarifikasi, permintaan maaf, dan evaluasi dapat memperbaiki komunikasi, tetapi penelitian perlu menilai apakah wacana juga menghadirkan reformasi prosedur, perubahan tata kelola, perlindungan pelapor, atau pembenahan budaya organisasi.

E. Penerapan pada Wacana Korporasi dan Reputasi Organisasi

Dalam wacana korporasi, tanggung jawab sering berkaitan dengan reputasi, hubungan pemangku kepentingan, legitimasi organisasi, dan kemampuan perusahaan menjelaskan dampak tindakannya. Model memungkinkan peneliti membedakan respons yang terutama berfungsi memulihkan reputasi dari respons yang secara diskursif mengakui kewajiban moral, formal, atau struktural.

Nuortimo et al. (2026) menunjukkan bahwa reputasi korporasi dan komunikasi krisis semakin terkait dengan pemantauan kanal daring, taktik respons, dan pengelolaan respons. Lingkungan digital membuat reputasi lebih dinamis karena pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam percakapan secara langsung. Dalam model, kondisi ini memperluas arena legitimasi dari komunikasi satu arah menuju negosiasi multiaktor.

Vaara et al. (2024) menawarkan sintesis tentang legitimasi diskursif sebagai fenomena yang melibatkan strategi, posisi, fondasi, temporalitas, dan arena. Kerangka tersebut mendukung penerapan model pada korporasi karena legitimasi tidak hanya dibangun melalui apa yang dikatakan perusahaan, tetapi juga

melalui siapa yang mengatakan, kapan, di arena mana, dan dengan dasar apa tindakan dibenarkan.

Baker et al. (2026) memberikan contoh kontemporer tentang akuntabilitas perusahaan *platform* digital. Mereka menunjukkan bahwa kewajiban etis dapat diproduksi, ditolak, atau dialokasikan ulang melalui interaksi dalam forum publik. Hal ini membuka ruang penerapan model pada isu tanggung jawab sosial perusahaan, lingkungan, keselamatan konsumen, ketenagakerjaan, penggunaan AI, dan tata kelola *platform*.

Penerapan model pada korporasi sebaiknya tidak menggunakan reputasi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Pemulihan citra dapat terjadi tanpa perubahan struktur. Karena itu, dimensi evaluasi struktural perlu menanyakan apakah respons hanya mengelola persepsi atau juga mengubah praktik, insentif, pengawasan, dan distribusi tanggung jawab di dalam organisasi.

F. Penerapan pada Wacana Pemerintahan dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan medan yang secara langsung menghubungkan definisi masalah dengan pilihan tindakan. Bahasa kebijakan menentukan kategori masalah, kelompok sasaran, sumber kewenangan, serta bentuk intervensi yang dianggap sah. Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana tanggung jawab publik didistribusikan antara negara, warga, organisasi, pasar, dan komunitas.

Van Hulst et al. (2025) menunjukkan bahwa analisis wacana, pembingkaian, dan narasi merupakan tiga pendekatan interpretatif yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana masalah kebijakan dibentuk. Bagi model ini, perspektif tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab dalam kebijakan tidak muncul setelah solusi dipilih; ia telah dibentuk sejak proses pendefinisian masalah.

Gagrčin (2026) menekankan pentingnya pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertindak dan siapa yang memiliki legitimasi untuk bertindak dalam ruang digital. Prinsip tersebut dapat diperluas ke kebijakan publik secara umum. Negara mungkin memiliki otoritas formal, tetapi legitimasi tindakan tetap dipengaruhi oleh kesesuaian dengan norma, posisi aktor terdampak, ruang, dan waktu.

Penerapan model dapat dilakukan pada kebijakan pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, lingkungan, transportasi, bantuan sosial, AI, atau keamanan digital. Penelitian dapat membandingkan dokumen kebijakan dengan pemberitaan atau perdebatan publik untuk melihat apakah struktur tanggung jawab konsisten atau berubah antar-arena.

Pada wacana pemerintahan, batas inferensi harus dijaga. Teks kebijakan dapat menunjukkan bagaimana pemerintah mendefinisikan kewajiban, tetapi tidak membuktikan implementasi. Sebaliknya, kritik media dapat menunjukkan orientasi evaluatif, tetapi tidak otomatis membuktikan perubahan kebijakan. Model berfungsi untuk memetakan hubungan diskursif sebelum penelitian lanjutan menilai efek atau pelaksanaan.

G. Penerapan pada Wacana Digital dan Viralitas

Wacana digital memperluas model karena distribusi tanggung jawab tidak lagi hanya dibentuk oleh produsen media profesional. Pengguna, *platform*, algoritma, *influencer*, moderator, organisasi, dan negara dapat berpartisipasi dalam produksi serta sirkulasi makna. Karena itu, agensi dan legitimasi harus dibaca bersama affordance dan logika *platform*.

Bruns (2023) menolak gambaran ruang publik sebagai satu arena tunggal dan menawarkan pemahaman jaringan publik yang saling beririsan. Friemel dan Neuberger (2023) juga memandang ruang publik sebagai jaringan dinamis aktor dan konten yang dihubungkan oleh tindakan komunikatif. Kedua pendekatan ini memberi dasar untuk membaca viralitas sebagai perubahan struktur visibilitas, bukan sekadar peningkatan jumlah tayangan.

Baden et al. (2025) mengonseptualisasikan opini publik digital sebagai negosiasi diskursif atas rentang posisi yang dianggap dapat diterima. Perspektif ini penting bagi model karena viralitas tidak boleh langsung disamakan dengan konsensus. Yang dapat dianalisis dari teks dan interaksi adalah orientasi makna, perebutan legitimasi, dan perubahan posisi aktor.

Kopf (2025) menunjukkan bahwa studi wacana kritis media sosial membutuhkan perhatian terhadap beberapa lapisan analisis, termasuk fitur digital dan konteks *platform*. Artinya, model harus menyesuaikan unit analisis ketika diterapkan pada *thread*, komentar, meme, video pendek, atau unggahan yang disirkulasikan ulang.

Dalam ruang digital, model juga dapat menempatkan *platform* sebagai aktor struktural. Pertanyaan tanggung jawab tidak hanya diarahkan pada pengguna yang membuat konten, tetapi juga pada aturan moderasi, desain rekomendasi, transparansi, monetisasi, dan mekanisme penanganan. Dengan demikian, viralitas dapat dibaca sebagai kondisi yang mengaktifkan sekaligus mengubah jaringan tanggung jawab.

H. Penerapan pada Wacana Bencana dan Kegagalan Sistem

Bencana dan kegagalan sistem merupakan domain penting karena relasi tanggung jawab sering berkembang di bawah kondisi ketidakpastian, urgensi, dan kerugian besar. Model dapat digunakan untuk membedakan tanggung jawab terhadap penyebab, kesiapsiagaan, peringatan, respons, pemulihan, dan reformasi sistem.

Castro-Martínez et al. (2025) menunjukkan bahwa ketika respons otoritas dinilai tidak memadai dalam bencana DANA di Spanyol, media sosial menjadi ruang bagi tindakan kolektif warga yang bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kegagalan institusional dapat menggeser agensi kepada warga dan mengubah struktur siapa yang dianggap bertanggung jawab untuk bertindak.

Hutton et al. (2026), melalui tinjauan pelingkupan, menunjukkan pentingnya media sosial dalam komunikasi komunitas selama bahaya alam. Temuan ini memperluas fokus dari komunikasi resmi menuju interaksi komunitas, sehingga model dapat menilai bagaimana otoritas, warga, media, dan

infrastruktur digital berbagi atau memperebutkan tanggung jawab.

Pada bencana, legitimasi formal dapat berasal dari otoritas kebencanaan, legitimasi moral dari penderitaan dan kebutuhan korban, sedangkan legitimasi administratif dari kapasitas respons. Namun, konfigurasi ini tidak boleh menutupi dimensi struktural seperti desain infrastruktur, sistem peringatan, tata ruang, koordinasi lembaga, dan ketimpangan kerentanan.

Model juga dapat diterapkan pada kecelakaan industri, kegagalan transportasi, pemadaman besar, kebocoran data, atau kegagalan sistem digital. Pada semua konteks tersebut, pertanyaan pentingnya sama: siapa yang dianggap menyebabkan, siapa yang memiliki kewajiban menanggulangi, bagaimana tindakan dilegitimasi, dan apakah wacana bergerak menuju pencegahan sistemik.

I. Kemungkinan Perbandingan Lintas Media dan Lintas Kasus

Perbandingan lintas media memungkinkan peneliti menguji apakah konfigurasi tanggung jawab berubah ketika isu yang sama dibentuk oleh organisasi media, *platform*, atau genre yang berbeda. Namun, perbandingan harus menjaga kesepadanan kasus. Perbedaan antara dua media tidak dapat langsung dianggap sebagai karakter editorial apabila keduanya membahas peristiwa, periode, atau sumber yang berbeda.

Saurwein et al. (2025) memberikan contoh perbandingan yang menelaah jaringan tanggung jawab pada dua bidang otomasi, yakni algoritma media sosial dan *social companions*. Temuan mereka menunjukkan bahwa kelompok pembicara dan

pola atribusi dapat berbeda menurut bidang aplikasi. Prinsip ini relevan untuk desain lintas kasus: variasi dapat berasal dari karakter objek, bukan hanya karakter media.

Jordá Vallés (2026) membandingkan pembingkaian media terhadap bencana bendungan Tous pada enam media. Studi semacam ini menunjukkan nilai perbandingan lintas outlet ketika objek, periode, dan peristiwa dibuat setara. Model dapat menambahkan lapisan dengan membandingkan distribusi agensi, legitimasi, dan tanggung jawab pada masing-masing outlet.

Perbandingan lintas kasus juga berguna untuk menguji kestabilan konsep. Dua kasus dalam media yang sama dapat menghasilkan konfigurasi legitimasi berbeda karena aktor, tingkat kerugian, respons institusi, atau struktur kebijakannya berbeda. Dengan demikian, penelitian tidak perlu mengharapkan pola identik.

Prinsip utamanya adalah memisahkan efek konteks dari interpretasi mengenai media. Peneliti harus menjelaskan unit perbandingan, alasan kesepadanan, dan faktor yang mungkin mengganggu pembacaan. Dengan disiplin ini, model dapat digunakan untuk menghasilkan komparasi yang lebih tajam daripada sekadar mencatat perbedaan leksikal antarberita.

J. Kemungkinan Perbandingan Lintas Budaya dan Lintas Negara

Perbandingan lintas budaya dan lintas negara merupakan uji penting bagi daya transfer model karena sumber legitimasi, sistem media, tradisi hukum, norma sosial, dan struktur negara berbeda. Sebuah mekanisme yang kuat dalam satu konteks dapat

menjadi lemah atau mengambil bentuk lain di konteks yang berbeda.

McLean et al. (2026) membandingkan persuasi, posisi identitas, dan pembingkaian isu dalam diskursus politik Inggris, Jerman, dan Slovakia. Studi semacam ini memperlihatkan bahwa perbandingan lintas budaya perlu memperhatikan sumber daya bahasa dan norma komunikatif, bukan hanya menerapkan kategori yang dianggap universal.

Teschendorf (2026) membandingkan pembingkaian COVID-19 di Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris dan memperlihatkan adanya perbedaan karakter pembingkaian pada konteks media nasional. Dalam penerapan model tanggung jawab, variasi semacam itu dapat diuji lebih lanjut melalui pertanyaan mengenai aktor yang dominan, sumber legitimasi, dan jenis respons yang dianggap wajar.

Perbandingan lintas negara juga perlu mempertimbangkan struktur institusional. Negara dengan tradisi regulasi kuat dapat menghasilkan legitimasi formal yang berbeda dari konteks yang lebih bergantung pada pasar atau komunitas. Demikian pula, hubungan antara media dan pemerintah dapat memengaruhi siapa yang memperoleh otoritas definisional.

Karena itu, model tidak menganggap konfigurasi awal sebagai standar global. Perbandingan lintas budaya harus digunakan untuk menemukan kondisi batas, mekanisme baru, dan variasi konseptual. Jika penelitian berulang menemukan legitimasi komunal, religius, ilmiah, atau politik yang konsisten, temuan tersebut dapat menjadi dasar perluasan model.

K. Adaptasi Model pada Wacana Multimodal

Wacana kontemporer hampir selalu melibatkan lebih dari bahasa verbal. Foto, video, tipografi, warna, tata letak, suara, musik, ikon, dan gestur dapat ikut menentukan bagaimana aktor diposisikan dan bagaimana tanggung jawab dibentuk. Karena itu, pengembangan model menuju data multimodal merupakan langkah logis.

Kress dan van Leeuwen (2021) menyediakan fondasi penting melalui tata bahasa desain visual yang menempatkan gambar sebagai sumber daya semiotik dengan struktur representasional, interaktif, dan komposisional. Kerangka ini memungkinkan model membaca agensi visual, jarak sosial, tatapan, saliens, dan penempatan aktor bersama pilihan bahasa.

Machin dan Mayr (2023) memperluas perangkat Analisis Wacana Kritis ke teks multimodal dan menunjukkan bagaimana pilihan verbal serta visual dapat bekerja bersama dalam membentuk ideologi dan kekuasaan. Dalam model tanggung jawab, pertanyaan utama menjadi apakah mode berbeda saling memperkuat, menetralkan, atau bahkan bertentangan dalam atribusi.

Simungala et al. (2025) memandang wacana media sosial sebagai himpunan multimodal yang menggabungkan berbagai repertoar semiotik. Sementara itu, Kopf (2025) menekankan perlunya model Studi Wacana Kritis media sosial yang sensitif terhadap karakter digital. Kedua sumber ini mendukung adaptasi model ke unggahan *platform* yang tidak dapat dipahami hanya melalui transkrip verbal.

Adaptasi multimodal tidak berarti menambahkan analisis gambar sebagai lampiran. Setiap mode harus dihubungkan dengan fungsi model: bagaimana aktor direpresentasikan, siapa diberi agensi, sumber legitimasi apa yang dibuat menonjol, dan respons apa yang dinormalisasi. Dengan prinsip tersebut, identitas konseptual model tetap terjaga meskipun material semiotik berubah.

L. Pengembangan Model di Luar Konteks Awal Perundungan

Konteks awal perundungan memiliki peran penting karena menyediakan kasus empiris yang memperlihatkan hubungan antara korban, pelaku, institusi, negara, legitimasi, respons, dan pencegahan. Namun, model tidak boleh menjadikan konfigurasi awal sebagai batas penggunaan. Nilai teoretis baru akan terlihat jika hubungan konseptual tersebut diuji pada fenomena yang berbeda.

Pengembangan ke isu teknologi merupakan salah satu contoh. Saurwein et al. (2025) menunjukkan jaringan tanggung jawab dalam wacana otomasi, sedangkan Baker et al. (2026) menunjukkan bagaimana tanggung jawab digital diproduksi dan diperdebatkan dalam forum kebijakan. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa objek non-insiden pun dapat memuat persoalan atribusi dan legitimasi yang kuat.

Pengembangan ke kebijakan publik dapat memanfaatkan pembacaan interpretatif seperti yang dijelaskan van Hulst et al. (2025). Pengembangan ke bencana dapat menggunakan relasi antara kegagalan otoritas dan agensi warga seperti yang diperlihatkan Castro-Martínez et al. (2025). Pengembangan ke

kesehatan dapat menguji apakah tanggung jawab terlalu diindividualisasi seperti yang dikritik Okuhara et al. (2026).

Dengan perluasan tersebut, beberapa komponen model perlu dibedakan antara inti dan konteks. Inti model adalah representasi, distribusi agensi, atribusi tanggung jawab, legitimasi, respons, dan evaluasi struktural. Konsep akuntabilitas pascainsiden hanya digunakan apabila objek memang memiliki peristiwa pemicu. Demikian pula, legitimasi formal, moral, dan administratif dipertahankan sebagai konfigurasi awal yang dapat diuji, bukan tiga kategori yang wajib ditemukan.

Pengembangan model yang sehat harus memungkinkan hasil negatif dan mekanisme tambahan. Jika suatu studi tidak menemukan hubungan yang diprediksi, temuan tersebut dapat memperjelas kondisi batas. Jika studi lain menemukan legitimasi ilmiah, komunal, religius, atau ekonomi yang konsisten, model dapat diperluas. Dengan cara ini, model berkembang melalui akumulasi bukti, bukan melalui pengulangan terminologi.

Ruang penerapan yang luas pada akhirnya bukan alasan untuk mengklaim universalitas. Justru keluasan tersebut merupakan agenda pengujian. Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab menjadi bernilai apabila ia membantu penelitian lintas domain menghasilkan pertanyaan yang dapat dibandingkan sekaligus cukup terbuka untuk menangkap perbedaan sosial, institusional, budaya, dan semiotik.

BAB 10
AGENDA PENGEMBANGAN TEORETIS

Bab penutup ini menempatkan Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab sebagai program teoretis yang masih terbuka. Model tidak dianggap selesai hanya karena komponen representasi, agensi, atribusi, legitimasi, respons, dan dimensi struktural telah dirumuskan. Nilai teoretisnya justru bergantung pada kemampuan penelitian berikutnya untuk menguji kondisi batas, menemukan konfigurasi yang berbeda, menantang relasi yang diasumsikan, dan memperluas model tanpa kehilangan koherensi. Dalam kerangka tersebut, *akuntabilitas pascainsiden* diposisikan sebagai salah satu formasi diskursif khusus yang dapat muncul dalam konteks tertentu, bukan sebagai batas universal seluruh model. Orientasi semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa kemajuan teori memerlukan keseimbangan antara abstraksi, koherensi, daya jelaskan, dan keterbukaan terhadap pengujian empiris (Köhler et al., 2025; Nosek et al., 2022; Sonntag & Nisic, 2026).

A. Status Teoretis Model Akuntabilitas Pascainsiden

Akuntabilitas pascainsiden sebaiknya tidak dinaikkan secara prematur menjadi teori universal. Status yang lebih tepat pada tahap ini adalah konstruksi teoretis menengah atau formasi

diskursif yang menjelaskan pola tertentu dalam distribusi tanggung jawab setelah suatu peristiwa memperoleh visibilitas publik. Formasi tersebut menghubungkan representasi aktor, atribusi penyebab dan kewajiban, mekanisme legitimasi, serta respons institusional. Status ini memberi ruang bagi pengujian tanpa mengharuskan setiap wacana memiliki struktur yang sama.

Bovens (2007) memberi dasar konseptual bagi akuntabilitas sebagai relasi keterjawaban antara aktor dan forum penilai. Namun, konsep akuntabilitas pascainsiden memperluas perhatian dari forum formal menuju proses diskursif yang mendahului, menyertai, atau mengelilingi keterjawaban tersebut. Wacana dapat membentuk siapa yang dianggap relevan untuk dimintai penjelasan bahkan sebelum mekanisme formal bekerja.

Gagrčin (2026) membantu memperjelas status ini dengan membedakan tanggung jawab sebagai sisi kewajiban dan legitimasi sebagai sisi pengakuan. Dalam akuntabilitas pascainsiden, kedua sisi tersebut bertemu: wacana tidak hanya menunjuk siapa yang harus bertindak, tetapi juga siapa yang dianggap berwenang dan patut untuk menyelidiki, melindungi, memutuskan, atau memulihkan. Hubungan itu bersifat kontekstual dan perlu dibangun ulang pada setiap arena.

Secara metodologis, status menengah tersebut lebih produktif daripada klaim universal. Köhler et al. (2025) menunjukkan bahwa teori kualitatif dapat dipertajam melalui *restudy* yang secara sistematis kembali pada temuan, konteks, atau situs penelitian sebelumnya untuk melakukan *retheorizing*. Akuntabilitas pascainsiden karena itu perlu diperlakukan sebagai klaim yang dapat diperkuat, dibatasi, atau direvisi melalui penelitian ulang.

Dengan posisi ini, akuntabilitas pascainsiden berada di bawah payung yang lebih luas, yaitu Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab. Model umum dapat digunakan pada wacana tanpa insiden, sedangkan formasi pascainsiden digunakan ketika data memperlihatkan peristiwa pemicu, visibilitas, tuntutan keterjawaban, dan respons. Pembedaan tingkat abstraksi ini penting untuk mencegah perluasan konsep yang berlebihan.

B. Batas Generalisasi dan Ketergantungan pada Konteks

Setiap model wacana menghadapi ketegangan antara kebutuhan generalisasi dan sifat kontekstual bahasa. Fairclough (1992, 2003) menempatkan wacana dalam hubungan dialektis dengan praktik sosial, sehingga bentuk representasi selalu berkaitan dengan institusi, sejarah, genre, dan relasi kekuasaan tertentu. Konsekuensinya, model tanggung jawab tidak dapat menganggap bahwa tanda kebahasaan yang sama selalu menghasilkan fungsi sosial yang sama pada konteks berbeda.

Batas generalisasi pertama terletak pada domain. Konfigurasi legitimasi yang kuat dalam pemberitaan kekerasan belum tentu sama dengan konfigurasi pada kebijakan teknologi atau krisis ekonomi. Pada satu domain, legitimasi hukum mungkin dominan; pada domain lain, legitimasi ilmiah, profesional, komunal, atau ekonomis dapat lebih menentukan. Karena itu, generalisasi sebaiknya berada pada relasi konseptual, bukan pada daftar indikator tekstual yang kaku.

Batas kedua terletak pada sistem media dan budaya. Zeng et al. (2026) menunjukkan melalui analisis lintas negara atas 18.746 artikel tentang kecerdasan artifisial bahwa wacana media

dapat membentuk profil nasional yang berbeda dalam hal keragaman, stabilitas, dan orientasi lintas negara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kategori analitis yang dapat dibandingkan tetap menghasilkan pola berbeda ketika konteks politik, ekonomi, dan sistem media berubah.

Baden et al. (2026) juga menunjukkan bahwa affordance *platform* perlu dipahami pada tingkat abstraksi menengah yang cukup umum untuk perbandingan, tetapi tetap sensitif terhadap jenis aktor, tujuan, dan kondisi politik-sosial. Prinsip ini relevan bagi Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab: komponen inti dapat dipertahankan, tetapi makna empiris tiap komponen harus dibaca kembali melalui konteks.

Generalisasi yang dikejar model karena itu bersifat analitis dan bersyarat. Penelitian tidak berusaha membuktikan bahwa semua wacana akan menghasilkan konfigurasi yang sama, melainkan mengidentifikasi kondisi ketika relasi tertentu muncul. Hasil yang berbeda bukan penyimpangan yang harus dihapus, tetapi informasi mengenai kondisi batas model.

C. Uji Konseptual pada Domain Wacana yang Berbeda

Pengembangan model membutuhkan pengujian pada domain yang secara substantif berbeda. Penggunaan hanya pada pemberitaan perundungan akan membuat model sulit dibedakan dari kerangka yang spesifik terhadap satu isu. Karena itu, agenda pertama adalah membawa relasi representasi, agensi, atribusi, legitimasi, respons, dan struktur ke wacana kesehatan, lingkungan, pemerintahan, teknologi, korporasi, bencana, atau konflik sosial.

Uji lintas domain bukan sekadar mencari kemiripan. Ji et al. (2025), dalam tinjauan sistematis terhadap 133 artikel berbasis teori atribusi pada situasi krisis, menunjukkan bahwa penelitian berkembang pada level individu, organisasi, dan masyarakat tetapi sering terpisah. Mereka mendorong integrasi yang lebih kuat, pendekatan multiaktor, dan perhatian pada *treatment responsibility*. Model tanggung jawab dapat mengambil agenda ini dengan membandingkan siapa yang dianggap menyebabkan dan siapa yang diwajibkan menangani.

Domain teknologi menawarkan uji yang menarik karena objek tanggung jawab tidak selalu berupa manusia atau institusi tunggal. Saurwein et al. (2025) menunjukkan bahwa diskursus media tentang otomasi membentuk jaringan tanggung jawab yang melibatkan pemerintah, industri, pakar, masyarakat, dan teknologi. Jika model dapat menjelaskan konfigurasi tersebut tanpa memaksakan pola yang lahir dari kasus kekerasan, daya transfernya akan lebih kuat.

Uji lintas domain juga dapat menggunakan pendekatan komputasional sebagai pelengkap. Hurtado Bodell et al. (2026) menunjukkan bahwa analisis teks komputasional dapat bergerak dari pendekatan berorientasi data menuju pendekatan berorientasi teori dan integrasi teori-data. Bagi model ini, skala komputasional dapat digunakan untuk menemukan pola distribusi aktor atau legitimasi, sementara pembacaan kualitatif tetap diperlukan untuk menilai fungsi diskursif dan konteks.

Agenda uji konseptual harus menetapkan terlebih dahulu apa yang dianggap sebagai dukungan, modifikasi, atau tantangan terhadap model. Model memperoleh nilai teoretis ketika penelitian baru dapat menyatakan secara jelas bahwa suatu hubungan bertahan, berubah, tidak muncul, atau digantikan oleh

mekanisme lain. Dengan demikian, lintas domain berfungsi sebagai arena pengujian, bukan sekadar demonstrasi aplikasi.

D. Pengayaan Dimensi Legitimasi

Tiga mekanisme legitimasi: formal, moral, dan administrative merupakan titik awal, bukan daftar final. Van Leeuwen (2007) telah menunjukkan bahwa legitimasi dapat dibangun melalui otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan narasi. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa sumber pengakuan lebih beragam daripada kategori yang ditemukan dalam penelitian awal model.

Pengembangan berikutnya perlu menguji kemungkinan legitimasi ilmiah atau epistemik. Dalam wacana kesehatan, iklim, atau kecerdasan artifisial, kewenangan dapat dibangun melalui data, ahli, konsensus ilmiah, standar profesional, atau metodologi. Legitimasi semacam ini tidak sepenuhnya identik dengan formalitas karena sumber pengakuannya berada pada kapasitas pengetahuan, bukan semata pada aturan atau jabatan.

Legitimasi komunal dan kultural juga dapat muncul pada konteks tertentu. Tradisi, adat, pengalaman lokal, atau otoritas komunitas dapat menjadi dasar yang membuat suatu tuntutan dianggap patut. Hal serupa berlaku bagi legitimasi religius atau ideologis. Model perlu mampu mengenali sumber-sumber tersebut tanpa mereduksinya ke legitimasi moral yang terlalu luas.

Steffek (2023) mengingatkan bahwa legitimasi dapat dipelajari melalui keyakinan, diskursus, dan tindakan institusional. Pembedaan ini penting bagi pengayaan model karena sumber legitimasi yang disebut dalam teks belum tentu

memperoleh penerimaan aktual. Analisis wacana dapat mengidentifikasi klaim legitimasi, sedangkan pengukuran penerimaan membutuhkan desain lain.

Agenda pengayaan legitimasi karena itu perlu menjaga dua prinsip. Pertama, kategori baru harus memiliki fungsi analitis yang berbeda dan konsisten. Kedua, perluasan tidak boleh menghasilkan proliferasi kategori tanpa batas. Model harus tetap cukup parsimonis untuk memungkinkan perbandingan, tetapi cukup terbuka untuk menangkap variasi yang secara empiris penting.

E. Relasi Akuntabilitas Pascainsiden dan Pencegahan Struktural

Salah satu agenda teoretis paling penting adalah memperjelas hubungan antara akuntabilitas pascainsiden dan pencegahan struktural. Penelitian awal menunjukkan kemungkinan bahwa wacana setelah peristiwa menjadi publik lebih mudah memusatkan perhatian pada investigasi, penderitaan, klarifikasi, pendampingan, atau tindakan administratif daripada pada perubahan kondisi sistemik. Namun, hubungan tersebut masih perlu diuji secara lebih luas.

Akuntabilitas reaktif dan tanggung jawab preventif tidak harus diposisikan sebagai dua kutub yang selalu bertentangan. Respons pascainsiden dapat menjadi pintu menuju reformasi struktural apabila investigasi menghasilkan perubahan kebijakan, mekanisme pengaduan, desain organisasi, atau distribusi kewenangan. Pertanyaan teoretisnya adalah kondisi apa yang membuat wacana bergerak dari penanganan kasus menuju perubahan struktur.

Ji et al. (2025) memberi dasar dengan membedakan atribusi tanggung jawab penyebab dan tanggung jawab penanganan. Model dapat memperluasnya dengan dimensi ketiga: tanggung jawab pencegahan. Pihak yang menyebabkan insiden, pihak yang menangani akibat, dan pihak yang memiliki kewajiban mencegah pengulangan dapat merupakan aktor yang berbeda.

Analisis struktural juga perlu menghindari asumsi bahwa ketidakhadiran pencegahan dalam satu teks selalu bermasalah. Berita singkat atau pernyataan awal mungkin secara wajar berfokus pada perkembangan terkini. Yang lebih bermakna adalah pola pada korpus: apakah pencegahan muncul ketika liputan berkembang, atau apakah struktur terus-menerus berada di latar belakang.

Ke depan, model dapat mengembangkan sumbu reaktif-preventif sebagai dimensi evaluatif yang tidak bersifat dikotomis. Wacana dapat sangat reaktif, sangat preventif, atau menggabungkan keduanya. Dengan cara ini, pencegahan struktural tidak menjadi kategori moral yang memaksa, tetapi alat untuk membaca keluasan cakupan tanggung jawab.

F. Relasi Model dengan Kajian *Framing*, Krisis, dan Responsibilitas

Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab berada di persimpangan beberapa tradisi teoretis. Kajian *framing* menjelaskan bagaimana aspek tertentu dari realitas diseleksi dan dibuat menonjol sehingga mendukung definisi masalah, interpretasi sebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan (Entman, 1993). Analisis Wacana Kritis memperdalam proses tersebut dengan

menghubungkan pilihan bahasa dengan agensi, ideologi, dan praktik sosial.

Dalam komunikasi krisis, SCCT menempatkan atribusi tanggung jawab sebagai variabel penting dalam menentukan strategi respons organisasi (Coombs, 2007). Coombs dan Tachkova (2023) memperluas kerangka tersebut dengan memasukkan kemarahan moral sebagai unsur penilaian krisis. Model tanggung jawab dapat memanfaatkan wawasan ini tanpa berubah menjadi teori efek, karena fokus utamanya tetap pada bagaimana atribusi dan legitimasi dibangun dalam wacana.

Tinjauan Ji et al. (2025) memperlihatkan bahwa teori atribusi, SCCT, teori framing, dan teori perbaikan citra sering dipadukan, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memodernisasi teori komunikasi krisis pada ekosistem media yang berubah. Model ini dapat berkontribusi melalui pembacaan multiaktor dan pembedaan yang lebih eksplisit antara penyebab, penanganan, dan pencegahan.

Konsep responsibilitas atau tanggung jawab juga perlu dipisahkan dari blame. Gagrčin (2026) menunjukkan bahwa tanggung jawab menyangkut siapa yang seharusnya bertindak, sedangkan legitimasi menyangkut siapa yang boleh atau patut bertindak. Pembedaan ini membuat model dapat menganalisis kewajiban tanpa selalu berangkat dari kesalahan. Negara, misalnya, dapat memiliki tanggung jawab protektif walaupun bukan penyebab langsung.

Integrasi dengan framing, krisis, dan responsibilitas sebaiknya dilakukan melalui pembagian fungsi. Framing menjelaskan seleksi dan saliens; teori krisis menjelaskan hubungan atribusi dengan respons; kajian legitimasi menjelaskan

dasar pengakuan; sedangkan AWK menjelaskan bagaimana semua hubungan tersebut direalisasikan melalui bahasa dan praktik sosial. Model memperoleh kekuatan justru apabila tidak mengklaim menggantikan teori-teori tersebut.

G. Pengembangan pada Media Sosial dan Ekosistem *Platform*

Media sosial mengubah arena konstruksi tanggung jawab karena produksi dan sirkulasi makna tidak lagi dimonopoli oleh media profesional atau institusi. Aktor dapat menjadi sumber, kurator, komentator, penguat visibilitas, atau perantara. Akibatnya, atribusi tanggung jawab dapat berubah ketika konten berpindah antarakun, antarkomunitas, dan antar*platform*.

Ohme et al. (2026) mengembangkan Dynamic Intermediary Model untuk menjelaskan bagaimana jurnalis, influencer, agen artifisial, atau aktor *platform* dapat mengubah relasi sumber-penerima melalui fungsi perantaraan. Wawasan ini penting bagi model tanggung jawab karena aktor yang tidak terlibat pada peristiwa awal dapat memperoleh peran besar dalam menentukan visibilitas, kredibilitas, dan arah atribusi.

Baden et al. (2026) menunjukkan bahwa affordance media sosial berbeda menurut jenis aktor, tujuan, dan konteks. *Platform* tidak sekadar saluran netral; arsitektur, fitur, biaya, dan peluang interaksi membentuk praktik komunikasi yang tersedia. Model tanggung jawab perlu memasukkan konteks *platform* ketika menganalisis mengapa suara tertentu memperoleh jangkauan dan suara lain tetap marginal.

Baden et al. (2025) juga mengonseptualisasikan opini publik digital sebagai negosiasi diskursif di arena yang multivokal dan diatur oleh logika institusional serta sosioteknis. Karena itu, istilah "orientasi makna publik" dapat dikembangkan dengan menganalisis bagaimana posisi yang berbeda saling menanggapi, menguatkan, atau menolak atribusi tanggung jawab. Namun, analisis konten tetap tidak identik dengan pengukuran opini populasi.

Agenda riset *platform* perlu bergerak dari satu unggahan ke rantai sirkulasi. Peneliti dapat melacak bagaimana sebuah klaim tanggung jawab diproduksi, diubah melalui *caption* atau komentar, diperkuat algoritme atau akun perantara, dan diterjemahkan kembali oleh media profesional atau institusi. Pengembangan ini akan menjadikan model lebih sesuai dengan wacana yang bersifat jaringan.

H. Pengembangan pada Analisis Multimodal dan Visual

Konstruksi tanggung jawab tidak selalu berlangsung melalui bahasa verbal. Foto, video, tata letak, grafik, musik, warna, gerak kamera, tipografi, dan hubungan antara teks dengan gambar dapat mendistribusikan agensi dan legitimasi. Karena itu, perluasan ke analisis multimodal merupakan arah yang penting bagi model.

Machin dan Mayr (2023) menempatkan Analisis Wacana Kritis multimodal sebagai cara membaca pilihan semiotik lintas bahasa, gambar, media sosial, dokumen institusional, infografik, dan video. Prinsip ini kompatibel dengan model tanggung jawab karena representasi aktor dapat dibangun melalui ukuran visual,

jarak, sudut kamera, posisi komposisional, serta hubungan dengan caption.

Bünzli dan Eppler (2024) menunjukkan bahwa teks verbal dapat membatasi atau mengarahkan interpretasi gambar melalui proses *anchoring*. Temuan ini memiliki implikasi langsung bagi berita: caption, judul, atau teks pada video dapat mengarahkan bagaimana gambar korban, pelaku, atau institusi dibaca. Analisis tanggung jawab perlu melihat apakah mode verbal dan visual saling menguatkan atau justru menghasilkan ketegangan.

Grzenkowicz dan Wildfeuer (2025) menunjukkan kompleksitas video pendek dengan mengembangkan skema multilevel yang mencakup shot, objek visual, suara, musik, filter, gerak kamera, peristiwa, dan partisipan. Kerangka semacam ini memberi contoh bahwa analisis *platform* video memerlukan unit yang lebih kompleks daripada kalimat. Model tanggung jawab dapat menggunakan prinsip tersebut tanpa harus mengadopsi seluruh skema teknisnya.

Agenda multimodal selanjutnya adalah merumuskan ekuivalensi konseptual. Agensi verbal dapat ditampilkan melalui struktur gramatikal, sedangkan agensi visual dapat dibangun melalui pusat perhatian, arah gerak, tatapan, atau sequencing. Legitimasi moral dapat muncul melalui deskripsi penderitaan maupun close-up visual. Pengembangan model harus menentukan hubungan lintas mode tersebut secara eksplisit agar analisis tidak sekadar menambahkan gambar sebagai ilustrasi.

I. Pengembangan Melalui Studi Komparatif

Studi komparatif diperlukan untuk membedakan komponen model yang benar-benar stabil dari komponen yang bergantung pada konteks. Perbandingan dapat dilakukan antarkasus dalam satu media, antarjenis media pada kasus yang sama, antarinstitusi, antarperiode, antar*platform*, atau antarnegara. Masing-masing desain menjawab jenis pertanyaan yang berbeda.

Zeng et al. (2026) menunjukkan manfaat perbandingan lintas negara dengan menggunakan dimensi yang sama untuk membaca variasi wacana AI di Tiongkok, Jerman, dan Amerika Serikat. Mereka menegaskan bahwa kerangka komparatif tidak harus mengklaim representativitas global; kasus dapat digunakan untuk menguji bagaimana konteks berbeda menghasilkan konfigurasi diskursif yang berbeda.

Baden et al. (2026) juga menekankan bahwa tingkat abstraksi menengah memungkinkan variasi penting tetap terlihat tanpa kehilangan kemampuan generalisasi. Prinsip ini sangat relevan bagi model tanggung jawab. Perbandingan sebaiknya menggunakan konstruk yang sama—representasi, agensi, atribusi, legitimasi, respons, struktur—tetapi tidak mengharuskan indikator tekstual yang identik.

Desain komparatif juga dapat menguji lintas waktu. Sebuah isu dapat dibandingkan sebelum dan sesudah perubahan regulasi, krisis besar, atau transformasi *platform*. Dengan cara ini, penelitian dapat menilai apakah struktur tanggung jawab berubah ketika konteks institusional berubah. Perbandingan temporal juga membantu menghindari anggapan bahwa satu konfigurasi merupakan sifat permanen suatu media atau budaya.

Köhler et al. (2025) memberikan dasar metodologis melalui konsep *qualitative restudies* yang memungkinkan peneliti kembali ke data, hasil, atau konteks penelitian sebelumnya untuk melakukan *retheorizing*. Studi komparatif model dapat menggunakan semangat ini: tujuan akhirnya bukan menemukan kesamaan sebanyak mungkin, melainkan mengetahui apa yang berubah dan apa artinya bagi teori.

J. Peluang Integrasi dengan Pendekatan Analisis Wacana Lain

Model AWK Konstruksi Tanggung Jawab dibangun di atas pendekatan dialektis-relasional Fairclough, tetapi tidak perlu tertutup terhadap tradisi Analisis Wacana Kritis lain. Wodak dan Meyer (2016) menunjukkan bahwa Critical Discourse Studies merupakan medan yang plural dengan pendekatan, konsep, dan strategi metodologis yang berbeda. Integrasi dapat memperkaya model selama fungsi setiap pendekatan dijelaskan.

Pendekatan sosio-kognitif van Dijk (2008) dapat memperluas pembacaan konteks dengan menekankan bagaimana peserta merepresentasikan situasi komunikatif melalui model konteks. Integrasi ini berpotensi membantu menjelaskan bagaimana kategori tanggung jawab menjadi relevan bagi aktor tertentu, tetapi penelitian harus berhati-hati agar tidak mengklaim kondisi kognitif tanpa data yang memadai.

Discourse-Historical Approach dapat memperkuat dimensi historis dan intertekstual. Wacana tanggung jawab sering menggunakan kategori yang terbentuk dari kasus terdahulu, kebijakan, hukum, atau memori kolektif. Pendekatan historis dapat membantu menelusuri bagaimana istilah seperti “korban”,

"kelalaian", "perlindungan", atau "tanggung jawab negara" berubah dan memperoleh legitimasi sepanjang waktu (Wodak & Meyer, 2016).

Corpus-assisted Critical Discourse Studies juga menawarkan peluang untuk menghubungkan kedalaman interpretasi dengan skala korpus. Hurtado Bodell et al. (2026) menunjukkan bahwa metode teks komputasional dapat digunakan dalam alur teori-pertama, data-pertama, atau integrasi teori-data. Model dapat memanfaatkan pencarian pola kolokasi, distribusi aktor, atau perubahan temporal sebagai alat untuk menuntun pembacaan kualitatif.

Integrasi tidak berarti mencampurkan semua pendekatan dalam satu penelitian. Kriteria utamanya adalah kontribusi analitis. Pendekatan tambahan harus menjawab kelemahan tertentu atau membuka dimensi yang tidak cukup dijelaskan oleh kerangka utama. Dengan demikian, pluralisme metodologis menjadi strategi pengembangan, bukan ornamen teoretis.

K. Agenda Validasi, Falsifikasi, dan Penyempurnaan Model

Model yang ingin berkembang harus menyediakan kemungkinan untuk gagal. Jika setiap hasil selalu dapat ditafsirkan sebagai dukungan, model tidak memiliki daya uji. Karena itu, agenda validasi perlu merumuskan proposisi yang cukup jelas untuk dinilai, tetapi tidak mengubah AWK menjadi model positivistik yang mengabaikan konteks.

Nosek et al. (2022) menekankan perbedaan antara replikabilitas, ketahanan, dan reproduksibilitas sebagai komponen penting kemajuan ilmu. Prinsip tersebut dapat

diterjemahkan secara hati-hati ke penelitian wacana. Replikabilitas konseptual berkaitan dengan apakah relasi model berguna pada data baru; ketahanan berkaitan dengan apakah interpretasi utama bertahan ketika korpus atau strategi analisis berubah; reproduksibilitas berkaitan dengan transparansi jejak analisis.

Sonntag dan Nisic (2026) menunjukkan bahwa pengembangan model memerlukan keseimbangan antara parsimoni, kecukupan deskriptif, dan koherensi dengan pengetahuan latar. Model tanggung jawab sebaiknya tidak diperluas hanya karena satu studi menemukan kategori baru. Kategori tambahan perlu diuji apakah benar meningkatkan daya jelaskan tanpa membuat model terlalu rumit.

Hurtado Bodell et al. (2026) juga menekankan bahwa pengembangan dan pengujian teori melalui teks membutuhkan standar yang jelas mengenai kualitas data, reproduksibilitas, dan klaim kausal. Bagi model ini, hal tersebut menegaskan kembali bahwa analisis teks tidak boleh menyimpulkan efek khalayak, efektivitas kebijakan, atau sebab institusional tanpa desain yang sesuai.

Penyempurnaan dapat dilakukan melalui beberapa jalur: menghapus komponen yang tidak konsisten, memperjelas definisi yang tumpang tindih, menambah mekanisme yang berulang pada berbagai studi, atau menentukan kondisi batas. Hasil yang menyanggah konfigurasi awal merupakan sumber kemajuan, bukan ancaman terhadap model. Prinsip falsifikasi dalam konteks ini dipahami sebagai keterbukaan sistematis terhadap bukti yang memaksa revisi.

Pada akhirnya, validasi model tidak dapat diselesaikan oleh satu studi. Ia membutuhkan program penelitian kumulatif yang mendokumentasikan konteks, data, interpretasi, dan modifikasi secara terbuka. Dengan demikian, model berkembang melalui sejarah pengujian, bukan melalui klaim kebaruan tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, H. A., Shakoor, J. A., & Basas, F. F. (2026). Awareness and barriers to reporting child abuse and neglect among primary school teachers. *Discover Public Health*, *23*, Article 73. https://doi.org/10.1186/s12982-026-01387-2

Alejandro, A., & Zhao, L. (2024). Multi-method qualitative text and discourse analysis: A methodological framework. *Qualitative Inquiry, 30*(6), 461–473. https://doi.org/10.1177/10778004231184421

Baden, C., Heft, A., Vaughan, M., & Pfetsch, B. (2026). Differential social media affordances: An actor type-centric, intermediate-level approach using the case of social movements. *Communication Theory*, *36*(3), 165–176. https://doi.org/10.1093/ct/qtaf030

Baden, C., Kligler-Vilenchik, N., Springer, N., Jungblut, M., Zelenkauskaite, A., Balčytienė, A., Salgado, S., Lipiński, A., Krstic, A., & Bączkowska, A. (2025). Public opinion negotiations in a digital media ecosystem: A conceptual framework. *International Journal of Public Opinion Research, 37*(3), Article edaf049. https://doi.org/10.1093/ijpor/edaf049

Baker, M., Free, C., & Gao, F. (2026). Battlelines of accountability: The discursive production of digital responsibility. *Journal of Business Ethics*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10551-026-06308-6

Bartley, L., & Trevisan, P. (2024). 'We can fix this. Let's get you out of trouble, son': An analysis of the transitivity and appraisal patterns in the Netflix TV show When They See Us. *Applied Linguistics*. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/applin/amae081

Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public Relations Review*, *23*(2), 177–186. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0

Boudana, S., & Segev, E. (2026). Fake news makes the news: Definitions and framing of fake news in mainstream media. *Journalism Practice, 20*(2), 679–698. https://doi.org/10.1080/17512786.2024.2379898

Boukes, M. (2022). Episodic and thematic framing effects on the attribution of responsibility: The effects of personalized and contextualized news on perceptions of individual and political responsibility for causing the economic crisis. *The International Journal of Press/Politics, 27*(2), 374–395. https://doi.org/10.1177/1940161220985241

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Brunborg, G. S., Bjørknes, R., & Bang, L. (2024). Personal barriers to reporting child maltreatment among early childhood education and care professionals. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, *7*, 221–240. https://doi.org/10.1007/s42448-023-00190-9

Bruns, A. (2023). From "the" public sphere to a network of publics: Towards an empirically founded model of contemporary public communication spaces. *Communication Theory, 33*(2–3), 70–81. https://doi.org/10.1093/ct/qtad007

Bünzli, F., & Eppler, M. J. (2024). How verbal text guides the interpretation of advertisement images: A predictive typology of verbal anchoring. *Communication Theory*, *34*(4), 191–204. https://doi.org/10.1093/ct/qtae012

Castro-Martínez, A., Torres-Martín, J.-L., & Villena-Alarcón, E. (2025). When authorities' response fails and citizens act: Social media responses to the DANA disaster in Spain. *International Journal of Disaster Risk Science*, *16*, 980–992. https://doi.org/10.1007/s13753-025-00686-7

Cheng, Y., Wang, Y., & Kong, Y. (2022). The state of social-mediated crisis communication research through the lens of global scholars: An updated assessment. *Public Relations Review*, *48*(2), Article 102172. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102172

Chouliaraki, L. (2006). *The spectatorship of suffering*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446220658

Clarke, N., Higgs, M., & Garavan, T. (2025). Legitimating organizational secrecy. *Journal of Business Ethics*, *197*(1), 19–38. https://doi.org/10.1007/s10551-024-05763-3

Conrad, P. (2007). *The medicalization of society: On the transformation of human conditions into treatable disorders*. Johns Hopkins University Press.

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, *10*(3), 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049

Coombs, W. T., & Tachkova, E. R. (2023). Integrating moral outrage in situational crisis communication theory: A triadic appraisal model for crises. *Management Communication Quarterly*, *37*(4), 798–820. https://doi.org/10.1177/08933189221151177

Corral de Zubielqui, G., & Harris, H. (2024). Why the COVID-19 crisis is an ethical issue for business: Evidence from the Australian JobKeeper initiative. *Journal of Business Ethics*, *190*, 123–136. https://doi.org/10.1007/s10551-023-05392-2

Coşkun, R., & Arslan, S. (2024). The role of organizational language in gaining legitimacy from the perspective of new institutional theory. *Journal of Management & Organization, 30*(6), 2003–2024. https://doi.org/10.1017/jmo.2023.7

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity.

Dahlborg, E., Boman, Å., Eriksson, H., & Tengelin, E. (2024). Encircling discourses—A guide to critical discourse analysis in caring science. *Scandinavian Journal of Caring Sciences, 38*(1), 177–184. https://doi.org/10.1111/scs.13194

Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, *17*, Article 75. https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0

de Fine Licht, J., Agerberg, M., & Esaiasson, P. (2022). "It's not over when it's over"—Post-decision arrangements and empirical legitimacy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *32*(1), 183–199. https://doi.org/10.1093/jopart/muab023

Drisko, J. W. (2025). Transferability and generalization in qualitative research. *Research on Social Work Practice*, *35*(1), 102–110. https://doi.org/10.1177/10497315241256560

Dwarika, M. S., Jordan-Dewhurst, T., Tidmarsh, G., Kolitsida, M., Sanchez, E., Quinton, M. L., & Cumming, J. (2026). Risk and protective factors for safeguarding and abuse prevention in dance: A scoping review. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/1612197X.2025.2611828

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.

Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. Edward Arnold.

Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.

Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.

Fife, S. T., & Gossner, J. D. (2024). Deductive qualitative analysis: Evaluating, expanding, and refining theory. *International Journal of Qualitative Methods*, *23*, Article 16094069241244856. https://doi.org/10.1177/16094069241244856

Fleisher, W., Cibralic, B., Basl, J., Ricks, V., & Smith, M. N. (2025). Responsibility and accountability in an algorithmic society. *Philosophy & Technology*, *38*, Article 144. https://doi.org/10.1007/s13347-025-00970-w

Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books. (Original work published 1969)

Frederick, E., Schmidt, S., & Pegoraro, A. (2024). The beginning of a reckoning: An application of situational crisis communication theory and image repair to the National Women's Soccer League. *Communication & Sport*, *12*(3), 530–555. https://doi.org/10.1177/21674795231174871

Freiling, I., Krause, N. M., Scheufele, D. A., & Chen, K. (2021). The science of open (communication) science: Toward an evidence-driven understanding of quality criteria in communication research. *Journal of Communication*, *71*(5), 686–714. https://doi.org/10.1093/joc/jqab032

Friemel, T. N., & Neuberger, C. (2023). The public sphere as a dynamic network. *Communication Theory*, *33*(2–3), 92–101. https://doi.org/10.1093/ct/qtad003

Fu, J., & Cooper, K. R. (2022). Reconsidering communication visibility in politically restrictive contexts: Organizational social media use in China. *Journal of Communication*, *72*(5), 540–552. https://doi.org/10.1093/joc/jqac024

Fu, J., & Yang, Y. (2025). The role of dialogic crisis communication strategy in repairing organizational reputation: A moderated mediation model. *Management Communication Quarterly*, *39*(4), 655–680. https://doi.org/10.1177/08933189251322907

Furtado, H. T., & Auchter, J. (2025). Demystifying trauma in international relations theory: From incomprehensibility to the liberatory real. *Security Dialogue*, *56*(1), 76–93. https://doi.org/10.1177/09670106241265637

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021a). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, *17*(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021b). What works in anti-bullying programs? Analysis of effective intervention components. *Journal of School Psychology*, *85*, 37–56. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002

Gagrčin, E. (2026). Who should act, when, and where? The SCOPE framework for establishing responsibility and legitimacy in digital citizenship. *Communication Theory*, *36*(2), 72–85. https://doi.org/10.1093/ct/qtaf029

Gizzarelli, E., Burns, S., & Francis, J. (2025). Exploring primary school staff responses to student reports of bullying in Australia: A qualitative study. *International Journal of Bullying Prevention*, *7*, 199–214. https://doi.org/10.1007/s42380-023-00190-w

Gong, J., Firdaus, A., Aksar, I. A., Alivi, M. A., & Xu, J. (2023). Intertextuality and ideology: Social actor's representation in handling of COVID-19 from China Daily. *Journalism*, *24*(12), 2741–2761. https://doi.org/10.1177/14648849231157243

Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2022). Legitimacy of algorithmic decision-making: Six threats and the need for a calibrated institutional response. *Perspectives on Public Management and Governance*, *5*(3), 232–242. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvac008

Grzenkowicz, M., & Wildfeuer, J. (2025). Addressing TikTok's multimodal complexity: A multi-level annotation scheme for the audio-visual design of short video content. *Digital Scholarship in the Humanities*, *40*(4), 1143–1166. https://doi.org/10.1093/llc/fqaf047

Gyamfi, P. A., & Tella, F. (2024). Conceptualizing financial crisis communication: Central bank's reputation management strategies during a crisis. *Business and Professional Communication Quarterly*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/23294906241287464

Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.

He, Y., Yang, S., Wang, Z., Zhang, K., Zhou, A., & Zou, Y. (2026). How to calm the storm and recover reputation? A fsQCA analysis of public relations effectiveness in sports organizations. *Communication & Sport*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/21674795261428589

Hensums, M., de Mooij, B., Kuijper, S. C., Cross, D., DeSmet, A., Garandeau, C. F., Joronen, K., Leadbeater, B., Menesini, E., Palladino, B. E., Salmivalli, C., Solomontos-Kountouri, O., Veenstra, R., Fekkes, M., & Overbeek, G. (2023). What works for whom in school-based anti-bullying interventions? An individual participant data meta-analysis. *Prevention Science*, *24*(8), 1435–1446. https://doi.org/10.1007/s11121-022-01387-z

Hurtado Bodell, M., Keuschnigg, M., Macanovic, A., & Menshikova, A. (2026). Computational text analysis for building and testing social theory. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, *78*, 1059–1088. https://doi.org/10.1007/s11577-026-01065-w

Hutton, A., Goodhew, M., Qur'aniati, N., Maund, K., Giggins, H., Gajendran, T., & Verdon-Kidd, D. (2026). The role of social media in community natural hazards communication: A scoping review. *Journal of Public Health*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10389-026-02707-1

Iyengar, S. (1991). *Is anyone responsible? How television frames political issues*. University of Chicago Press.

Ji, Y., Tao, W., & Wan, C. (2025). A systematic review of attribution theory applied to crisis events in communication journals: Integration and advancing insights. *Communication Research*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00936502251319843

Jordá Vallés, P. (2026). Comparative analysis of media coverage of the Tous Dam disaster. *International Journal of Disaster Risk Science*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s13753-026-00739-5

Jungherr, A. (2023). Artificial intelligence and the public arena. *Communication Theory*, *33*(2–3), 164–173. https://doi.org/10.1093/ct/qtad006

KhosraviNik, M. (2010). Actor descriptions, action attributions, and argumentation: Towards a systematization of CDA analytical categories in the representation of social groups. *Critical Discourse Studies*, *7*(1), 55–72. https://doi.org/10.1080/17405900903453948

Köhler, T., Rumyantseva, M., & Welch, C. (2025). Qualitative restudies: Research designs for retheorizing. *Organizational Research Methods*, *28*(1), 32–57. https://doi.org/10.1177/10944281231216323

Kopf, S. (2025). Unravelling social media critical discourse studies (SM-CDS)—Four approaches to studying social media through the critical lens. *Critical Discourse Studies*, *22*(2), 215–232. https://doi.org/10.1080/17405904.2025.2463622

Kress, G., & van Leeuwen, T. (2021). *Reading images: The grammar of visual design* (3rd ed.). Routledge.

Li, Y., Cheng, H., & Li, H. (2026). Seeking mechanisms underlying accountability in crises: A qualitative comparative analysis of 29 cases in China. *Public Policy and Administration*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/09520767251414832

Limatius, H. (2025). 'The impacts are not evenly distributed': Representation and inclusion of marginalized groups in authorities' COVID-19 communication. *Discourse & Society*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/09579265251353793

Lögdberg, U., Hammerin, Z., Hedin, G., Oldeide, O. B., Tjelta, T., Dahl, B. M., & Clancy, A. (2026). Discourses on children and health in national public health policy documents: Examples from Sweden and Norway. *Health Promotion International*, *41*(3), Article daag073. https://doi.org/10.1093/heapro/daag073

López-Deflory, C., Perron, A., & Miró-Bonet, M. (2023). Linguistic characteristics of texts: Methodological notes on a missed step in critical discourse analysis. *International Journal of Qualitative Methods, 22*, 1–11. https://doi.org/10.1177/16094069231156343

Machin, D., & Cheng, L. (2023). The law and critical discourse studies. *Critical Discourse Studies*, *20*(3), 243–255. https://doi.org/10.1080/17405904.2022.2102520

Machin, D., & Mayr, A. (2023). *How to do critical discourse analysis: A multimodal introduction* (2nd ed.). SAGE.

McCoy, S., Ye, K., Kenny, N., & O'Higgins Norman, J. (2026). Bullying in context: How families, schools, and social ecologies shape student perceptions in Ireland. *International Journal of Bullying Prevention*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s42380-026-00345-5

McLean, N., Alder, A., Leiss, M., & Sepesi, S. (2026). Persuasion, positioning and issue framing: A cross-cultural comparison of British, German and Slovak political discourse relating to the Ukraine conflict. *Language and Intercultural Communication*, *26*(2), 414–429. https://doi.org/10.1080/14708477.2025.2480572

Metze, T. A. P., van Hulst, M., Dewulf, A., de Vries, J., van Bommel, S., & van Ostaijen, M. (2024). Discourse, framing and narrative: Three ways of doing critical, interpretive policy analysis. *Critical Policy Studies*, *19*(1), 74–96. https://doi.org/10.1080/19460171.2024.2326936

Moeller, S. D. (2002). A hierarchy of innocence: The media's use of children in the telling of international news. *The Harvard International Journal of Press/Politics*, *7*(1), 36–56. https://doi.org/10.1177/1081180X0200700104

Morrison, R. (2024). Making the invisible visible: Critical discourse analysis as a tool for search engine research. *Journal of the Association for Information Science and Technology, 75*(5), 600–612. https://doi.org/10.1002/asi.24859

Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A step-by-step process of thematic analysis to develop a conceptual model in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*, Article 16094069231205789. https://doi.org/10.1177/16094069231205789

Neu, D., & Saxton, G. D. (2024). Twitter-based social accountability callouts. *Journal of Business Ethics*, *189*, 797–815. https://doi.org/10.1007/s10551-022-05316-6

Nosek, B. A., & Errington, T. M. (2020). What is replication? *PLOS Biology*, *18*(3), Article e3000691. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000691

Nosek, B. A., Hardwicke, T. E., Moshontz, H., Allard, A., Corker, K. S., Dreber, A., Fidler, F., Hilgard, J., Kline Struhl, M., Nuijten, M. B., Rohrer, J. M., Romero, F., Scheel, A. M., Scherer, L. D., Schönbrodt, F. D., & Vazire, S. (2022). Replicability, robustness, and reproducibility in psychological science. *Annual Review of Psychology*, *73*, 719–748. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-114157

Nuortimo, K., Harkonen, J., & Breznik, K. (2026). Exploring corporate reputation and crisis communication. *Journal of Marketing Analytics*, *14*, 4–25. https://doi.org/10.1057/s41270-024-00353-8

Ohme, J., Mayer, A.-T., Charlton-Czaplicki, T., Gaisbauer, F., Wedel, L., Fan, Y., & Neuberger, C. (2026). D[X]IM—the Dynamic Intermediary Model of communicative transaction on digital *platforms* in a networked public sphere. *Communication Theory*, *36*(1), 12–23. https://doi.org/10.1093/ct/qtaf025

Okuhara, T., Okada, H., & Furukawa, E. (2026). Health literacy reductionism: When individual deficits become the default explanation. *Health Promotion International*, *41*(4), Article daag118. https://doi.org/10.1093/heapro/daag118

Ong, S. H., Beaumont, M., Caine, V., & Slemon, A. (2024). Selecting approaches for discourse analysis: Thoughts on nursing research. *International Journal of Qualitative Methods, 23*, 1–10. https://doi.org/10.1177/16094069241299658

Patel, M.-G., & Quan-Haase, A. (2024). The social-ecological model of cyberbullying: Digital media as a predominant ecology in the everyday lives of youth. *New Media & Society*, *26*(9), 5507–5528. https://doi.org/10.1177/14614448221136508

Pérez-Durán, I. (2024). Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends. *International Review of Administrative Sciences, 90*(3), 546–562. https://doi.org/10.1177/00208523231211751

Pratt, M. G., Kaplan, S., & Whittington, R. (2020). Editorial essay: The tumult over transparency: Decoupling transparency from replication in establishing trustworthy qualitative research. *Administrative Science Quarterly*, *65*(1), 1–19. https://doi.org/10.1177/0001839219887663

Pratt, M. G., Sonenshein, S., & Feldman, M. S. (2022). Moving beyond templates: A bricolage approach to conducting trustworthy qualitative research. *Organizational Research Methods*, *25*(2), 211–238. https://doi.org/10.1177/1094428120927466

Ross, N., Brown, C., & Johnstone, M. (2023). Beyond medicalized approaches to violence and trauma: Empowering social work practice. *Journal of Social Work*, *23*(3), 567–585. https://doi.org/10.1177/14680173221144557

Sainio, M., Herkama, S., Torppa, M., Aro, T., & Hämeenaho, P. (2026). What explains the perception of having shared practices among school staff for anti-bullying work? *International Journal of Bullying Prevention*, *8*, 7–19. https://doi.org/10.1007/s42380-024-00271-4

Saleh, M. N. I., Hanum, F., & Rukiyati. (2025). Stakeholders' perspectives on whole-school approaches to prevent and address bullying and cyberbullying in Indonesian high schools. *Social Sciences & Humanities Open*, *12*, 102336. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102336

Saurwein, F., Brantner, C., & Möck, L. (2025). Responsibility networks in media discourses on automation: A comparative analysis of social media algorithms and social companions. *New Media & Society, 27*(3), 1752–1773. https://doi.org/10.1177/14614448231203310

Schöch, C. (2023). Repetitive research: A conceptual space and terminology of replication, reproduction, revision, reanalysis, reinvestigation and reuse in digital humanities. *International Journal of Digital Humanities*, *5*, 373–403. https://doi.org/10.1007/s42803-023-00073-y

Simungala, G., Jimaima, H., & Nkhata, L. (2025). Social media discourses as multimodal assemblages. *Journal of Multicultural Discourses*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/17447143.2025.2511745

Slemon, A. (2025). Absences and silences in critical discourse analysis: Methodological reflections. *International Journal of Qualitative Methods, 24*, 1–10. https://doi.org/10.1177/16094069251321250

Sonntag, N., & Nisic, N. (2026). Dynamics of model building: Challenges and prospects of the method of decreasing abstraction. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, *78*, 619–651. https://doi.org/10.1007/s11577-026-01077-6

Steffek, J. (2023). Triangulating the legitimacy of international organizations: Beliefs, discourses, and actions. *International Studies Review*, *25*(4), Article viad054. https://doi.org/10.1093/isr/viad054

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Sveinson, K., Hoeber, L., & Heffernan, C. (2021). Critical discourse analysis as theory, methodology, and analysis in sport management studies. *Journal of Sport Management, 35*(5), 465–475. https://doi.org/10.1123/jsm.2020-0288

Swearer, S. M., & Hymel, S. (2015). Understanding the psychology of bullying: Moving toward a social-ecological diathesis–stress model. *American Psychologist*, *70*(4), 344–353. https://doi.org/10.1037/a0038929

Tak, M., Kim, Y. J., & Rhind, D. J. A. (2024). Good use, non-use and misuse: Safe sport reporting systems in context. *International Journal of Sport Policy and Politics*, *16*(2), 255–270. https://doi.org/10.1080/19406940.2024.2323011

Tenor, C., & Himma-Kadakas, M. (2024). Voiceless youth – Reasons (not) to involve minors in news coverage. *Journalism Practice*, *18*(1), 137–157. https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2206810

Teschendorf, V. S. (2026). Understanding COVID-19 media framing: Comparative insights from Germany, the US, and the UK during Omicron. *Journalism Practice*, *20*(4), 1303–1324. https://doi.org/10.1080/17512786.2024.2412832

Theodorou, E. (2024). Constructing the child as refugee: Visual representations of refugee children in digital news media. *Childhood*, *31*(2), 247–264. https://doi.org/10.1177/09075682241227806

Tuval-Mashiach, R. (2021). Is replication relevant for qualitative research? *Qualitative Psychology*, *8*(3), 365–377. https://doi.org/10.1037/qup0000217

Vaara, E., Aranda, A. M., & Etchanchu, H. (2024). Discursive legitimation: An integrative theoretical framework and agenda for future research. *Journal of Management*, *50*(6), 2343–2373. https://doi.org/10.1177/01492063241230511

van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society, 4*(2), 249–283. https://doi.org/10.1177/0957926593004002006

van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and context: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.

van Hulst, M., Metze, T., Dewulf, A., de Vries, J., van Bommel, S., & van Ostaijen, M. (2025). Discourse, framing and narrative: Three ways of doing critical, interpretive policy analysis. *Critical Policy Studies*, *19*(1), 74–96. https://doi.org/10.1080/19460171.2024.2326936

van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication. *Discourse & Communication, 1*(1), 91–112. https://doi.org/10.1177/1750481307071986

van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.

Welsh, R. O., Rodriguez, L. A., & Joseph, B. (2024). Examining student perceptions of school climate, school personnel, and school discipline: Evidence from New York City. *Journal of School Psychology*, *107*, 101361. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2024.101361

Willey-Sthapit, C., Jen, S., Storer, H. L., & Gonzalez Benson, O. (2022). Discursive decisions: Signposts to guide the use of critical discourse analysis in social work. *Qualitative Social Work, 21*(1), 129–146. https://doi.org/10.1177/1473325020979050

Winkel, M. (2025). Society in charge: The connection of artificial intelligence, responsibility, and ethics in German media discourse. *AI and Ethics*, *5*, 2839–2866. https://doi.org/10.1007/s43681-024-00604-5

Wlezien, C. (2024). News and public opinion: Which comes first? *The Journal of Politics, 86*(1), 1–17. https://doi.org/10.1086/726940

Wlezien, C., & Soroka, S. (2024). Media reflect! Policy, the public, and the news. *American Political Science Review, 118*(3), 1563–1569. https://doi.org/10.1017/S0003055423000874

Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE.

Xiao, H., & Li, L. (2021). A bibliometric analysis of critical discourse analysis and its implications. *Discourse & Society, 32*(4), 482–502. https://doi.org/10.1177/0957926521992150

Yan, Y., & Ramesh, M. (2026). Accountability for policy decisions: Addressing gaps in theory and practice. *Policy Sciences*, *59*, 3–21. https://doi.org/10.1007/s11077-026-09601-3

Zeng, J., Mahl, D., Schäfer, M. S., Brause, S. R., & Katzenbach, C. (2026). Studying the discursive order of artificial intelligence: Cross-national media coverage in China, Germany, and the US (2012–2024). *Big Data & Society*, *13*(1). https://doi.org/10.1177/20539517261429196

Zhang, W., Koller, V., & Wang, H. (2026). Trust repair in China's milk tea industry: Crisis types, response strategies, and linguistic realizations. *International Journal of Business Communication*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/23294884261453064

BIOGRAFI PENULIS



Deasy Wahyu Hidayati

Deasy Wahyu Hidayati lahir di Jakarta pada 29 Desember 1992. Beliau merupakan akademisi dan dosen dengan jabatan fungsional Lektor pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Beliau memiliki perhatian utama pada bidang pendidikan bahasa, sastra, pragmatik, pembelajaran Bahasa Indonesia, BIPA, literasi, budaya, serta pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal dan kebangsaan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UHAMKA pada 2014 dan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Pascasarjana UHAMKA pada 2017. Dalam perjalanan akademiknya, ia pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan aktif mengampu mata kuliah seperti Bahasa Indonesia, Telaah Kurikulum dan Buku Teks, Kajian dan Kritik Prosa, Penulisan Ilmiah, Teori dan Apresiasi Sastra, serta Strategi Mengajar BIPA. Rekam jejak ilmiahnya mencakup penelitian dan publikasi mengenai pemerolehan bahasa, kesantunan berbahasa, kritik sastra, media pembelajaran, nilai religius, budaya lokal, serta pendidikan kebangsaan, termasuk publikasi pada jurnal nasional dan internasional. Ia juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, pelatihan, dan kolaborasi akademik. Produktivitas akademiknya tercermin dalam profil Google Scholar dan SINTA, dengan SINTA ID 6753244, Google Scholar H-index 3, G-index 3, SINTA Score Overall 180, dan SINTA Score 3 Years 81**.** Melalui

konsistensi dalam pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian, Deasy Wahyu Hidayati terus berkontribusi pada pengembangan keilmuan bahasa, sastra, pendidikan, dan budaya di Indonesia.



Prima Gusti Yanti

Prima Gusti Yanti lahir di Pekanbaru pada 7 Agustus 1966. Beliau merupakan Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Bidang keilmuan yang ditekuninya meliputi bahasa, sastra Indonesia, dan pendidikan bahasa. Dalam aktivitas akademiknya, beliau mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Teori Sastra, Kajian Prosa, Kajian Puisi, Kritik Sastra, dan Sastra Banding. Pendidikan sarjananya ditempuh pada program Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Padang/Universitas Negeri Padang pada 1986–1991. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan magister dalam bidang Sastra Indonesia di Universitas Indonesia pada 1994–1998 dan pendidikan doktor dalam bidang Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta pada 2007–2010. Sebagai akademisi dan peneliti, beliau aktif menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, khususnya dalam bidang bahasa, sastra, pendidikan, pembelajaran Bahasa Indonesia, dan kajian nasionalisme. Beberapa topik penelitiannya mencakup pendidikan karakter dan pemikiran pendidikan R.A. Kartini dalam cerita rakyat, kajian konflik dalam karya sastra, pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing, serta kajian nasionalisme peserta didik di wilayah perbatasan Indonesia. Rekam jejak akademik dan penelitiannya juga tercermin melalui

keterindeksan pada sejumlah pangkalan data ilmiah. Beliau tercatat memiliki Scopus Author ID 57192720803 dengan Scopus Index/H-Index 5, serta Google Scholar H-index 14 dan i10-index 27.



Imam Safi'i

Imam Safi'i lahir di Boyolali pada 20 April 1977. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral pada Program Studi Pendidikan Bahasa, Universitas Negeri Jakarta, pada 2015. Saat ini, ia merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Ia aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Bidang kajiannya meliputi pendidikan bahasa Indonesia, pembelajaran berbasis STEAM, literasi digital dan ekologis, pendidikan multikultural, asesmen pembelajaran, serta kearifan lokal. Beberapa karyanya antara lain *Menyemai Kreativitas dan Inovasi Guru dalam Merancang Pembelajaran Berbasis STEAM*, *Implementasi Pendidikan Multikultural: Survei dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA DKI Jakarta*, *Growing Green Minds: Understanding Primary Students' Perspectives on Ecological Literacy*, *Asesmen Formatif Berbasis Digital dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Analisis Bibliometrik*, serta *Codification of Local Wisdom Themes in Indonesian Language Teaching Materials to Foster National Defense Spirit in Border Regions*.

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Website: https://www.karyabukudanjurnalindonesia.com/

Produk: https://www.karyabukudanjurnalindonesia.com/product/membaca-tanggung-jawab-dalam-wacana-model-analisis-wacana-kritis-atas-representasi-legimitasi-dan-respons/

Shopee: https://id.shp.ee/fEfPiMw6